

UMULOLO

MEDIA INFORMASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo



Cagar Budaya Indonesia

Diterbitkan Oleh :

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset Dan Teknologi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
Drs. Mohammad Natsir, M.Pd

Koordinator :

Drs. Syahrawi Mannan, M.Pd

Pengarah Teknis :

Faiz, M.Hum

Redaktur :

Retno Sekarningrum, S.Sej

Penyunting/Editor :

Fitra, S.S
Sri Anjarsari, S.Si
Hastina Ambarwati, SSI

Design Grafis dan layout :

Fauzi Malabar, S.Kom
Yulianty Aliah, S.S., M.Med.Kom

Sekretariat :

Abdul Kahar Safutra, S.S
Rahmawati Pirus, SE
Ratih Puspita R. Adam, S.E
I Ketut Sudarsa, S.Pd

Alamat Redaksi :

Unit Dokumentasi dan Publikasi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
Jl. Anggur No. 01 Kel. Huangobotu
Kec. Duingingi Kota Gorontalo
Telp/Fax : (0435) 821070, 821070
Email : bp3_gorontalo@yahoo.com

Design Cover :

fauzimlbr

- Redaksi menerima sumbangan tulisan artikel yang berhubungan dengan visi dan misi Buletin.
- Redaksi berhak mengubah/menyempurnakan judul dan isi tulisan sejauh tidak menyimpang dari esensi tulisan.
- Tulisan yang berupa terjemahan hendaknya menyebutkan sumber tulisan.
- Tulisan yang dimuat akan diberikan imbalan.



PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Buletin Umulolo yang budiman,

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cagar budaya di Indonesia sendiri sangat beragam jenisnya, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, hingga kawasan yang ada di darat maupun di air. Semua itu berasal dari berbagai masa, mulai dari masa prasejarah hingga kemerdekaan. Karena nilai-nilai penting itulah, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, guna mendukung semangat pelestarian cagar budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo menerbitkan Buletin Umulolo Volume X Tahun 2021. Di dalam volume ini pembaca dapat menemukan delapan artikel pilihan bertema perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Selain itu, ada pula rubrik Info Budaya yang mengulas jejak-jejak Jalur Rempah di Gorontalo, serta rubrik Kilas Kegiatan yang memuat reportase beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BPCB Provinsi Gorontalo selama tahun 2021.

Semoga kehadiran Buletin Umulolo Volume X Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi mitra pelestarian dengan menciptakan investasi manusia berkebudayaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Salam lestari cagar budaya Indonesia.
Kunjungi, Lindungi, Lestarikan!

Redaktur

SAMBUTAN KEPALA BPCB PROVINSI GORONTALO



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namu buddhaya, Salam kebajikan.

Pembaca yang terhormat,

Revolusi 4.0 sudah di depan mata. Penggunaan teknologi di berbagai bidang kehidupan adalah sebuah keniscayaan, termasuk dalam bidang kebudayaan. Oleh karena itu, untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, pada bulan Mei 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo meluncurkan layanan informasi melalui teknologi Quick Response Code (kode QR) dan Virtual Reality (VR) pada Situs Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Dengan

teknologi tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi seputar Situs Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno secara online. Yang tak kalah menarik adalah masyarakat juga akan diajak menjelajah beberapa tempat di Gorontalo yang pernah dikunjungi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1951 secara virtual hanya dengan memanfaatkan gawai pintar di mana pun dan kapan pun. Pengaplikasian teknologi QR dan VR tentunya menjadi angin segar dalam upaya pelestarian cagar budaya. Semangat pelestarian cagar budaya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi guna kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kesejahteraan masyarakat itulah yang kemudian diangkat menjadi sampul depan Buletin Umulolo Volume X Tahun 2021 ini.

Kepada para penulis, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya mengirimkan ide gagasan guna mendukung upaya pelestarian cagar budaya, serta meluangkan waktu untuk penyempurnaan naskah sebelum akhirnya diterbitkan. Akhir kata, semoga Buletin Umulolo Volume X Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi para pembaca sekalian dimanapun berada.

Salam budaya.

Kunjungi, Lindungi, Lestarkan Cagar Budaya Indonesia!

Kepala BPCB Provinsi Gorontalo

Drs. Mohammad Natsir, M.Pd

DAFTAR ISI 2021

BULETIN CAGAR BUDAYA



**QUICK RESPONSE CODE DAN VIRTUAL REALITY:
ASIKNYA JELAJAH SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA
SITUS Pendaratan SOEKARNO DI GORONTALO**

Retno Sekarningrum

6



**PENGELOLAAN MUSEUM
DAN PROGRAM PUBLIK**

Yulianty Aliah

88

PENGANTAR REDAKSI

i

**SAMBUTAN KEPALA BPCB
PROVINSI GORONTALO**

ii

INFO BUDAYA

Faiz dan Fauzi Malabar

1

**POTENSI WISATA CAGAR BUDAYA
SEKOLAH BUNG KARNO**

Rio Febriannur Rachman

15

**PELESTARIAN BANGUNAN LAMA TIONGHOA
DI BANYUMAS JAWA TENGAH**

Diyah Wara Restiyati

58

KILAS KEGIATAN

Fitra

110

KLEIDOSKOP 2021

119



Ombilin, West Sumatra

**KERETA API SUMATERA BARAT
DULU, KINI DAN ESOK**

Gimin Saputra

75

**PARTISIPASI TERNATE HERITAGE
SOCIETY DALAM PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA DI TERNATE**

*Helmi Yanuar Dwi Prasetyo dan
Komang Ayu Suwindiatrini*

29

**TINGGALAN PILLBOX JEPANG DI
KOTA KENDARI: TINJAUAN NILAI
PENTING SUMBERDAYA ARKEOLOGI**

Amaluddin Sope

42

**PEMANFAATAN BANGUNAN KOLONIAL
DI KABUPATEN SOPPENG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dewi Susanti

99

JEJAK Jalur Rempah DI GORONTALO

Oleh : Faiz dan Fauzi Malabar

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo

Sebagai bandar niaga di kawasan Teluk Tomini, Gorontalo memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanannya. Pada abad XVI, Kerajaan Hulontalo (sekarang Kota Gorontalo) merupakan vasal Kesultanan Ternate. Kerajaan tersebut berselisih dengan Kerajaan Limutu (sekarang Kabupaten Gorontalo) yang kala itu dibantu oleh Kesultanan Gowa. Kedua kerajaan akhirnya bersatu kala Olongia (Raja) Eyato (Hulontalo) dan Olongia (Raja) Ilato (Limutu) melakukan perundingan untuk berdamai. Dari sana pula kemudian lahir Loudulluwa limo lo pahala'a (dua kerajaan mempersatukan kerajaan sekitarnya dalam lima kerajaan).

Babak baru Kerajaan Hulontalo-Limutu dimulai kala VOC berhasil memonopoli kekuasaan Ternate pada 1607 saat Sultan Mudaffar Syah I terpaksa menandatangani kontrak dengan VOC sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan untuk melawan Portugis dan Spanyol. VOC juga berhasil menaklukkan Gowa melalui Perjanjian Bongaya pada 1667. Kemudian, pada tahun 1677, VOC melalui Gubernur Maluku Robertus Padtbrugge datang ke Nusa Utara Sulawesi guna menyampaikan kesepakatan atas pelepasan vasal dari hegemoni Kesultanan Ternate dan Kesultanan Gowa. VOC pun menancapkan kekuasaannya di Kerajaan Hulontalo-Limutu. Adanya kekuasaan VOC di wilayah Hulontalo-Limutu kemudian melahirkan kantor dagang, pakhuis (gudang), dan benteng-benteng guna mengatur dan mempermudah arus perdagangan komoditas penting di wilayah tersebut, seperti tempurung penyu, damar, rotan, budak, dan emas. Komoditas-komoditas tersebut selanjutnya akan diperdagangkan dengan rempah-rempah di entrepot besar, seperti Makassar dan Ternate.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Botutihe (1720), pusat pemerintahan (batato) Kerajaan Hulontalo dipindahkan dari Duingingi ke Biawau yang lebih dekat dengan wilayah pesisir. Raja Botutihe juga membangun saluran air persawahan di Tanggikiki dan Tanggidaa, membuat jalan dan jembatan, menata kota, serta membangun pasar dan pelabuhan guna mengukuhkan posisi Gorontalo sebagai bandar dalam jaringan pelayaran niaga di Teluk Tomini.

Keberadaan tinggalan budaya seperti kota dan pelabuhan tua, serta benteng-benteng tersebut menjadi bukti dari jejak jalur rempah di Gorontalo.



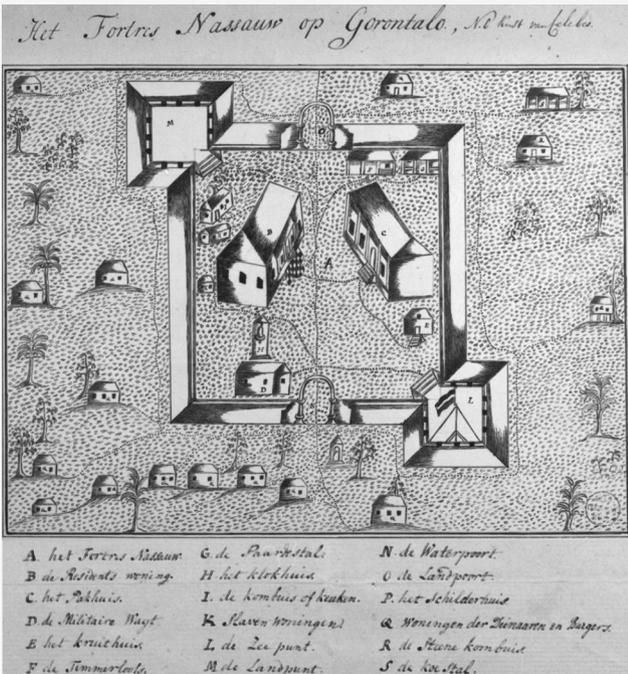
Kota dan Pelabuhan Tua Gorontalo

Kota dan pelabuhan tua terbangun setelah Raja Botutihe memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Hulontalo dari Dungi ke Biawau

pada abad XVIII. Kawasan ini merupakan ruang kota yang terus berkembang (ekstra muros) sejak abad XVIII sampai abad XIX.

Benteng Nassau

Benteng ini terletak di delta Sungai Bone-Teluk Tomini, Kota Gorontalo. Menurut laporan Rosenberg (1865), benteng ini dibangun pada tahun 1852. Kini lokasi berdirinya Benteng Nassau telah berubah menjadi Asrama Polisi Gorontalo.





Benteng Otanaha

Terletak di Bukit Dembe. Diperkirakan dibangun pada abad XVI saat Raja Eyato memimpin kerajaan Hulontalo (Gorontalo).

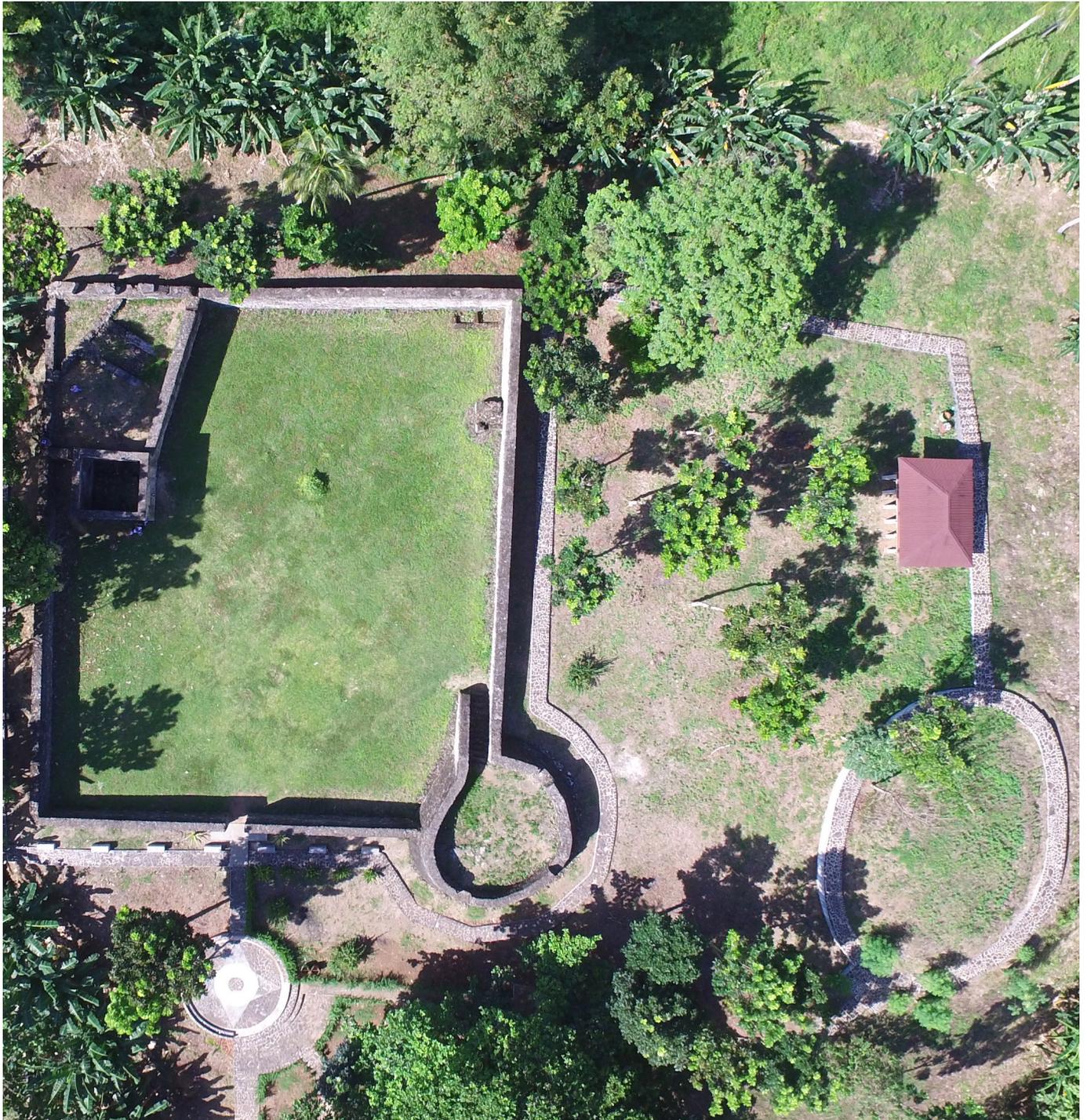
Benteng Kota Mas (Benteng Maas)

Terletak di Kwandang. Diperkirakan dibangun atas prakarsa Gubernur VOC di Ternate pada abad XVII saat Raja Bya memerintah Kerajaan Limutu.



Benteng Leiden (Benteng Oranje)

Terletak diatas bukit di Kwandang dan menjadi benteng pendamping dari Benteng Kota Mas. Diperkirakan dibangun atas prakarsa Gubernur VOC di Ternate pada abad XVII saat Raja Bya memerintah Kerajaan Limutu.



Tinggalan-tinggalan bendawi tersebut menunjukkan bahwa Gorontalo pernah terlibat aktif sebagai salah satu lokus dalam jaringan pelayaran niaga yang dilakukan oleh pedagang-pedagang dari berbagai bangsa di masa lalu. Persinggahan tersebut kemudian menyebabkan adanya interaksi dan melahirkan akulturasi budaya di Gorontalo, seperti dalam bidang kesenian, makanan, dan kriya.

Tari Dana-Dana

Merupakan salah satu seni budaya hasil akulturasi bernuansa islami yang hadir di Gorontalo pada abad XVI di masa pemerintahan Raja Amai.



Tabu Moitomo (Kuah Bugis)

Makanan berkuah yang berwarna kehitaman; di dalamnya terdapat 16 jenis rempah-rempah yang digunakan, seperti jahe, kunyit, lengkuas, serih, lada, kemiri, jintan, ketumbar, pala, kayumanis, cengkih dan lainnya. Mempunyai nama lain "Kuah Bugis" karena ada pengaruh Arab, Bugis, dan Ternate.



Panimbulo

Adalah ramuan tradisional berbahan dasar rempah dan akar pohon tertentu yang direndam dengan minyak kelapa kampung (yinulo bongo). Zaman dulu panimbulo juga menjadi media silaturahmi antar warga.

QUICK RESPONSE CODE DAN VIRTUAL REALITY: ASIKNYA JELAJAH SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA SITUS PENDARATAN SOEKARNO DI GORONTALO LEWAT TEKNOLOGI

Oleh : Retno Sekarningrum

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo

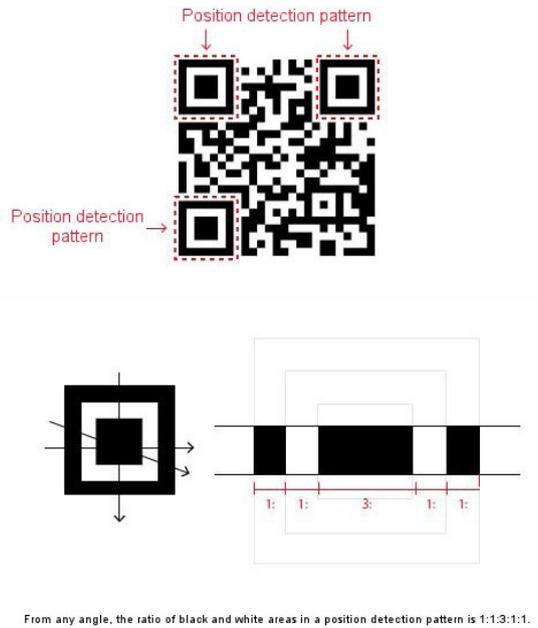
sekarningrumretno@gmail.com

Senin, 31/05/2021 – Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo merilis layanan informasi masyarakat terkait sejarah kedatangan Soekarno di Gorontalo pada tahun 1951. Tak seperti biasanya, kali ini layanan informasi tersebut dikemas dalam bentuk yang lebih interaktif dan menarik, yakni “quick response (QR) code” dan “virtual reality” (VR). Lalu, apa itu QR dan VR? Bagaimana kita bisa mengakses layanan informasi tersebut? Apa saja konten yang ada di dalamnya? Kita akan ulas satu per satu dalam artikel ini. Lewat artikel ini juga kita dapat secara langsung menjajal layanan QR dan VR yang disediakan, lho. Jadi, mari membaca dan siapkan gawai pintar kita!

Lebih Dekat dengan Quick Response Code dan Virtual Reality

Quick Response Code, yang kemudian disingkat QR Code (Kode QR), adalah kode batang matriks (atau kode batang dua dimensi) yang biasanya disusun dalam kotak putih kecil dengan bentuk geometris hitam, yang dapat dibaca oleh ponsel pintar atau perangkat pintar lain yang dilengkapi dengan kamera. Disebut sebagai Quick Response Code atau Kode Respon Cepat karena kode ini memungkinkan konten didekodekan dengan kecepatan tinggi. Kode QR sering disebut juga sebagai kode 2d, barcode 2d, atau kode seluler. Jenis kode batang ini dapat menyimpan lebih banyak informasi daripada kode batang biasa. Informasi yang dikodekan dalam QR dapat berupa URL, nomor telepon, pesan SMS, V-card, atau teks apa pun.¹

Sejarah kode QR bermula ketika pada tahun 1992, Masahiro Hara, yang terlibat dalam pengembangan pemindai kode batang dan perangkat pengenalan karakter optik (OCR) di Denso Wave (anak perusahaan Toyota), diminta oleh perusahaan untuk mengembangkan kode batang yang dapat dibaca dengan lebih cepat. Pada 1980-an, sistem kode batang memang telah digunakan di berbagai bidang, termasuk industri manufaktur, distribusi, dan ritel. Saat itu, batas kapasitas sistem kode batang dibuat dengan menggunakan lebih dari satu kode batang secara bersamaan. Namun, karena setiap kode batang hanya dapat menyimpan 20 karakter alfabet atau lebih, pekerja harus memindai sebanyak kurang lebih 1.000 kode batang per hari, sehingga pekerjaan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, Hara kemudian bertekad untuk mengembangkan kode batang yang dapat menyimpan lebih banyak informasi, termasuk karakter kanji dan kana, dan pada saat yang sama dapat dibaca dengan kecepatan lebih tinggi.



Gambar 1. Model kode QR yang pertama kali Hara kembangkan.
(Sumber: <https://www.denso-wave.com/en/technology/vol1.html>)

Tim pengembang yang dipimpin oleh Masahiro Hara mulai mengembangkan sistem kode 2D dengan hanya didampingi oleh dua orang anggota. Masalah yang paling menantang bagi tim pengembangan adalah bagaimana membuat kode 2D dibaca secepat mungkin, sebab lebih sulit bagi pemindai untuk mengenali lokasi kode 2D daripada kode batang. Suatu hari, Hara mendapat ide untuk menambahkan informasi yang menunjukkan lokasi ke dalam kode batang, yang mungkin bisa memecahkan masalah ini. Untuk mencegah pengenalan yang salah, pola deteksi posisi harus memiliki bentuk yang unik. Setelah satu setengah tahun penuh *trial and error* sejak awal proyek pengembangan, sistem QR Code yang mampu menyimpan sekitar 7.000 angka dengan kemampuan tambahan untuk mengkodekan karakter Kanji, berhasil dikembangkan. Kode ini juga dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar dan pada saat yang sama dapat dibaca 10 kali lebih cepat dari jenis kode lainnya.²



Gambar 2. Kode QR yang digunakan di di Denso Wave (anak perusahaan Toyota).
(Sumber: <https://www.denso-wave.com/en/technology/vol1.html>)

² Denso Wave. (08 Juni 2021). *QR Code Development Story*. <https://www.denso-wave.com/en/technology/vol1.html>

Virtual Reality atau yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Realitas Virtual adalah lingkungan yang dihasilkan oleh komputer yang mensimulasikan realitas tiga dimensi.³ Dengan VR pengguna dapat merasakan masuk ke dalam lingkungan yang dihasilkan oleh komputer yang mensimulasikan realitas melalui penggunaan perangkat interaktif, seperti kacamata (*goggles*), *headset*, sarung tangan (*gloves*), atau *body suits*. Ilusi seolah-olah “berada di dalam lingkungan yang ditampilkan komputer” (*telepresence*) dipengaruhi oleh sensor gerak yang menangkap gerakan pengguna dan menyesuaikan tampilan di layar secara *real time* (saat gerakan pengguna terjadi). Dengan demikian, pengguna dapat menjelajahi rangkaian kondisi dan lingkungan yang disimulasikan, mengalami perubahan sudut pandang dan perspektif seiring dengan putaran dan langkah kepala pengguna sendiri. Selain itu, dengan mengenakan sarung tangan data yang dilengkapi dengan perangkat umpan balik yang memberikan sensasi sentuhan, pengguna bahkan dapat mengambil dan memanipulasi objek yang dilihatnya di lingkungan *virtual*.⁴

Istilah *virtual reality* sendiri muncul pada tahun 1987 saat Jaron Lanier melakukan penelitian yang hasilnya menyumbangkan sejumlah produk ke industri VR yang baru lahir. Benang merah yang menghubungkan penelitian VR awal dan pengembangan teknologi di Amerika Serikat juga dapat ditarik dari peran pemerintah AS, khususnya Departemen Pertahanan, *National Science Foundation*, dan *National Aeronautics and Space Administration (NASA)*. Proyek-proyek yang didanai oleh lembaga-lembaga tersebut dan dilakukan di laboratorium penelitian berbasis universitas menghasilkan kumpulan personel berbakat yang luas di bidang-bidang seperti grafik komputer, simulasi, dan lingkungan jaringan serta menjalin hubungan antara pekerjaan akademis, militer, dan komersial.⁵

Ada beberapa jenis VR berdasarkan perangkat yang digunakan. Pertama ada VR seluler dengan menggunakan ponsel cerdas atau *tablet* yang terhubung ke VR *headset*. Kedua ada VR *standalone* dimana VR *headset* tidak memerlukan perangkat lain untuk beroperasi. Ketiga ada VR *desktop* dimana komputer berperforma tinggi terhubung ke VR *headset* untuk membantu menghasilkan lingkungan 3D. Masing-masing jenis perangkat VR tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, VR seluler sangat *portable*, tetapi biasanya memiliki daya yang jauh lebih sedikit daripada VR *standalone* atau *desktop*. Sementara itu, meskipun VR *desktop* adalah yang paling kuat, namun juga yang paling mahal, sehingga membuat banyak organisasi mengadopsi penggunaan VR *standalone* atau seluler.⁶

Dalam dunia budaya, beberapa negara telah mengadopsi teknologi QR dan VR. *The Smithsonian Institution* di Amerika Serikat telah menggunakan teknologi kode batang QR dalam berbagai kegiatan di museum dan festival. Selain itu, adapula Konzerthaus Berlin (Jerman) yang menyajikan desain dan implementasi musik secara *virtual reality*. Bahkan, sebagai bagian dari kampanye *#ShareOurHeritage*, UNESCO juga bekerja untuk mempromosikan bidang kebudayaan lewat pameran *online* interaktif yang menampilkan berbagai Warisan Budaya dari seluruh dunia yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun.⁷

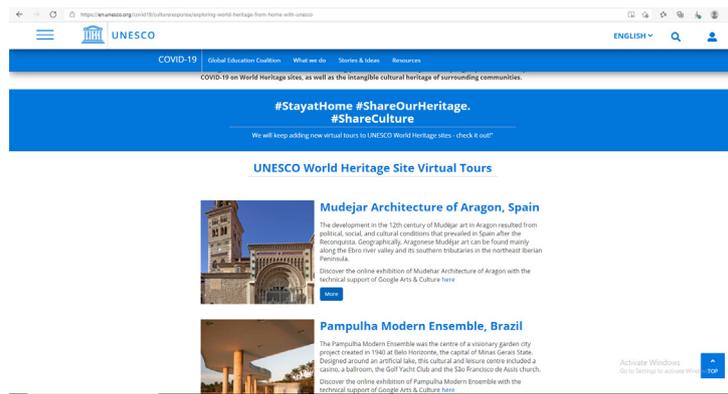
³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. realitas virtual. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses 16 Juni 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realitas%20virtual>

⁴ Britannica. Virtual reality. Dalam *Encyclopedia Britannica*. Diakses 16 Juni 2021, dari <https://www.britannica.com/technology/virtual-reality>

⁵ *Ibid.*

⁶ Forbes. What Is Virtual Reality, And How Can It Be Used In The Workplace? Dalam *Forbes Business Council*. Diakses 16 Juni 2021, dari <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/04/05/what-is-virtual-reality-and-how-can-it-be-used-in-the-workplace/?sh=138099b07a1e>

⁷ UNESCO. Exploring World Heritage from home with UNESCO. Dalam *UNESCO World Heritage Site Virtual Tours*. Diakses 16 Juni 2021, dari <https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse/exploring-world-heritage-from-home-with-unesco>



Gambar 3. Tampilan website UNESCO yang mempromosikan bidang kebudayaan lewat pameran online interaktif. (Sumber: <https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse/exploring-world-heritage-from-home-with-unesco>)

Ayo Akses Layanan Informasinya

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Gorontalo merilis layanan informasi masyarakat melalui teknologi QR dan VR. Pada kesempatan pertama tersebut, BPCB Provinsi Gorontalo memilih Situs Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno yang terletak di Desa Iluta, Kabupaten Gorontalo sebagai situs percontohan. Situs tersebut dipilih karena pernah menjadi saksi sebuah peristiwa penting yang menandai peran dan posisi Gorontalo dalam proses pembentukan nasionalisme dan persatuan Indonesia pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1951.

Ya, pada tanggal 20 November 1951, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengunjungi Gorontalo dengan menggunakan pesawat amfibi *Catalina* yang mendarat di Danau Limboto (Desa Iluta) guna merajut kesatuan dan persatuan Indonesia. Kala itu, Presiden Soekarno tak hanya singgah di Iluta saja, namun juga mengunjungi Tanah Lapang (kini Lapangan Taruna Remaja), rumah jabatan Residen Koordinator Wartabone (kini rumah jabatan Walikota Gorontalo), dan gedung Bioskop Ideal (terletak di sebelah barat Lapangan Taruna Remaja dan kini tak lagi terpakai) untuk melaksanakan beberapa agenda kenegaraan, seperti rapat raksasa, "resepsi"/perjamuan, dan rapat umum. Oleh karena itu, **rekonstruksi sejarah dan layanan informasi yang disajikan lewat QR dan VR menjadi semakin menarik, karena dalam satu kali penjelajahan, masyarakat dapat mengakses informasi di beberapa lokasi sekaligus**, khususnya lokasi yang pernah didatangi oleh Presiden Soekarno selama masa kunjungannya di Gorontalo pada tahun 1951.



Foto 1. Suasana saat pesawat *Catalina* yang ditumpangi oleh Presiden Soekarno dan rombongan mendarat di Danau Limboto. Terlihat perahu-perahu rakyat yang menyambut Presiden. (Sumber: *Arsip Nasional Republik Indonesia*, "Rakyat Gorontalo menyambut Presiden dengan perahu di Pantai Gorontalo", Foto Kempen Sulut 1951-1965/5R/7 Lembar, 20 November 1951, Nomor Definitif 511120 TT 1-1)

Lalu bagaimana cara mengakses layanan informasi QR dan VR yang telah disediakan oleh BPCB Provinsi Gorontalo tersebut? Mudah. Kita hanya perlu memindai kode batang yang telah disediakan dengan perangkat pintar, seperti ponsel atau *tablet* yang memiliki kamera. Beberapa perangkat pintar biasanya telah diperbarui sistemnya, sehingga kita dapat memindai secara langsung kode batang yang tersedia lewat kamera perangkat tersebut tanpa perlu mengunduh aplikasi pemindai kode batang. Namun, untuk perangkat yang belum diperbarui, maka kita perlu menggunakan aplikasi pemindai kode batang yang biasanya dapat dipasang secara bebas dari *Play Store* (*Android*) atau *App Store* (*iOS*).



Gambar 4. Kode QR untuk akses *Virtual Reality* “*Merajut Kebangsaan Samudra Timur Indonesia: Kunjungan Presiden Ir. Soekarno di Gorontalo Tahun 1951*”.
(Sumber: Dok. BPCB Provinsi Gorontalo, 2021)

Dengan memindai kode batang di atas, kita akan diarahkan menuju halaman awal *Virtual Reality* “*Merajut Kebangsaan Samudra Timur Indonesia: Kunjungan Presiden Ir. Soekarno di Gorontalo Tahun 1951*”. Adapun tampilan halaman yang akan muncul adalah seperti berikut.



Gambar 5. Halaman awal *virtual reality* (Tangkapan layar dengan perangkat laptop)
(Sumber: Dok. Penulis, 2021)



Gambar 6. Gulir layar ke bawah dan halaman awal *virtual reality* akan menunjukkan tampilan seperti di atas. Klik ikon “AYO JELAJAH” untuk memulai tur sejarah secara virtual. (Tangkapan layar dengan perangkat laptop) (Sumber: Dok. Penulis, 2021)

Pada sudut kiri atas terdapat logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan tulisan nama instansi BPCB Provinsi Gorontalo (Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo). Pada sudut kanan atas terdapat ikon menu dengan pilihan akses menuju Beranda, Testimoni, Tim Kerja, dan atau Kontak.

Ketika kita menggulir layar ke bawah, halaman awal akan menunjukkan sinopsis singkat perihal latar belakang kunjungan Presiden Soekarno di Gorontalo pada tahun 1951. Kemudian, di bawah teks sinopsis tersebut terdapat ikon “AYO JELAJAH”. Kita dapat mengklik ikon tersebut untuk memulai tur virtual “*Merajut Kebangsaan Samudra Timur Indonesia: Kunjungan Presiden Ir. Soekarno di Gorontalo Tahun 1951*”

Di dalam *virtual reality* kita akan diajak berkeliling di beberapa tempat yang pernah dikunjungi oleh Presiden Soekarno selama di Gorontalo pada tahun 1951. Guna memudahkan kita menemukan dan menelusuri tempat-tempat tersebut, lokasi bersejarah yang pernah dikunjungi oleh Presiden Soekarno telah ditandai dengan ikon “Tut Wuri Handayani” di dalam VR. Sebagai contoh adalah lokasi Danau Limboto di Desa Iluta, Kabupaten Gorontalo yang menjadi situs pendaratan pesawat amfibi Presiden Soekarno. Pada bagian ini nampak ikon “Tut Wuri Handayani”. Jika kita mengarahkan titik VR ke ikon tersebut, maka kita akan diajak menelusuri sejarah kedatangan Presiden Soekarno pada tahun 1951 di Gorontalo dengan perantara suara narasi, foto dan video. Menarik bukan?

Setelah puas melakukan jelajah secara virtual di seputaran Danau Limboto, kita dapat beranjak ke lokasi berikutnya. Adapun cara untuk berpindah lokasi tersebut pun mudah. Kita hanya perlu kembali mengarahkan titik VR menuju ikon “Tut Wuri Handayani” yang lainnya. Secara berturut-turut, beberapa lokasi bersejarah lain yang pernah dikunjungi Presiden Soekarno di Gorontalo pada tahun 1951 adalah Lapangan Taruna Remaja, bekas Gedung Bioskop Ideal (di sebelah barat Lapangan Taruna Remaja), dan rumah dinas Walikota Gorontalo. Sama halnya dengan lokasi Danau Limboto, pada ketiga lokasi tersebut kita juga akan diajak menelusuri sejarah dengan perantara suara narasi, foto dan video.

Nah, layanan informasi berbasis teknologi QR yang disediakan oleh BPCB Provinsi Gorontalo ternyata tak hanya lewat *virtual reality* saja, lho. Kita juga bisa membaca naskah sejarah yang memuat kronologi perjalanan kunjungan Presiden Soekarno di wilayah Indonesia Timur pada tahun 1951 dan 1957. Jadi di dalam naskah tersebut kita akan tahu, selain Gorontalo, daerah mana saja yang dikunjungi Presiden Soekarno pada saat itu. Naskah sejarah tersebut dapat kita akses dengan cara memindai kode batang di bawah ini.



Gambar 7. Kode QR untuk akses naskah sejarah “Merajut Kebangsaan Samudra Timur Indonesia: Kunjungan Presiden Ir. Soekarno di Gorontalo Tahun 1951 dan 1957” (Sumber: Dok. BPCB Provinsi Gorontalo, 2021)



Gambar 8. Setelah kode batang QR dipindai, akan muncul halaman awal naskah sejarah seperti di atas. (Tangkapan layar dengan perangkat laptop) (Sumber: Dok. Penulis, 2021)



Gambar 9. Tampilan naskah sejarah. Pembaca diajak untuk merasakan sensasi membaca buku elektronik. (Tangkapan layar dengan perangkat laptop) (Sumber: Dok. Penulis, 2021)

Jelajah Budaya Makin Asyik, kan?

Setelah kita mengakses layanan informasi yang disediakan oleh BPCB Provinsi Gorontalo tersebut, kita kini tahu bahwa dengan teknologi, masyarakat dapat mengakses konten dan informasi kebudayaan dengan lebih mudah dan lebih luas. Apalagi **di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dimana masyarakat disarankan untuk lebih banyak beraktivitas dari dalam rumah, teknologi QR dan VR jelas sangat membantu agar kita tetap terhubung dengan dunia luar sekaligus terus menghidupkan dunia kebudayaan.**

Selain teknologi QR dan VR, lalu ada inovasi apalagi yang juga dapat dilakukan oleh lembaga kebudayaan untuk terus mendongkrak keterbukaan dan kemudahan akses informasi di tengah pandemi? Adalah teknologi *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) atau yang biasa disingkat *AI*. Mulai dikembangkan sejak tahun 1956⁸, *AI* telah menarik perhatian berbagai disiplin bidang, termasuk kebudayaan, dengan kemudahan dan inovasi yang ditawarkan. *AI* dapat membuka potensi koleksi gambar digital dengan menandai, menyortir, dan menghubungkan *database* lembaga budaya, seperti museum. *AI* juga dapat melacak dan menafsirkan sejumlah besar informasi dengan cara yang berguna bagi museum modern saat arsip/koleksi bertambah. *AI* dapat pula mengotentikasi isi museum dengan cara mengidentifikasi pemalsuan. Selain itu, hal yang sangat menarik dari teknologi *AI* adalah kemampuannya untuk personalisasi mesin dalam hal komunikasi. Jika kita pernah melihat film fiksi yang memperlihatkan visualisasi wajah seseorang yang dapat berbicara atau menyampaikan sesuatu, demikianlah gambaran singkat bagaimana *AI* bekerja. Sebagai contoh, kurator museum dapat berinovasi dengan kecerdasan buatan yang menampilkan visualisasi tokoh Presiden Soekarno yang dapat bercerita kepada pengunjung tentang detik-detik Proklamasi Kemerdekaan. Dengan demikian, pengunjung museum akan merasakan seolah-olah mendengarkan cerita secara langsung dari Presiden Soekarno sendiri. Pengaplikasiannya *AI* semacam ini dapat dilakukan melalui gawai pintar. Dengan demikian, selain menambah daya tarik *AI* juga akan meningkatkan aspek keterjangkauan. Adapun beberapa lembaga budaya di dunia yang telah mengaplikasikan *AI* dalam kegiatannya adalah *National Museum of American History*, *The National Gallery* (London), dan *The Norwegian National Museum*.⁹

Akhirnya, nilai-nilai penting sejarah dapat ditemukan dalam cagar budaya. Jika sejarah merupakan cerita, maka cagar budaya adalah bukti fisik dari cerita tersebut. Maka tak heran jika nilai-nilai tersebut harus terus dipegang, dijaga, dan diwariskan kepada generasi muda agar dapat memberikan dampak kepada Gorontalo yang lebih baik di masa yang akan datang. Kini, upaya pewarisan semangat dan nilai penting tersebut menjadi semakin menarik dan interaktif lewat perkembangan teknologi, seperti QR, VR, ataupun *AI*. Lewat teknologi tersebut, diharapkan generasi muda akan semakin tertarik belajar sejarah dan dunia cagar budaya. Lewat teknologi pula, diharapkan jangkauan penyebaran informasi kebudayaan kepada masyarakat akan semakin luas dan tak terbatas ruang/waktu, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Semoga upaya-upaya positif pelayanan masyarakat lewat moda interaktif seperti QR dan VR (ataupun juga *AI*) dapat dikembangkan dan diaplikasikan di situs-situs lain, tak hanya di Gorontalo, namun juga di seluruh Indonesia.

8 Wikipedia. *Artificial intelligence*. Diakses 10 September 2021, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

9 Bennat Berger. (2017, November 6). *AI-enabled technologies could help museums survive the digital age*. VentureBeat. <https://venturebeat.com/2017/11/06/ai-enabled-technologies-could-help-museums-survive-the-digital-age/>

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia*, "Rakyat Gorontalo menyambut Presiden dengan perahu di Pantai Gorontalo", Foto Kempen Sulut 1951-1965/5R/7 Lembar, 20 November 1951, Nomor Definitif 511120 TT 1-1
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. realitas virtual. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses 16 Juni 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realitas%20virtual>
- Berger, B. (2017, November 6). *AI-enabled technologies could help museums survive the digital age*. VentureBeat. <https://venturebeat.com/2017/11/06/ai-enabled-technologies-could-help-museums-survive-the-digital-age/>
- Britannica. Virtual reality. Dalam *Encyclopedia Britannica*. Diakses 16 Juni 2021, dari <https://www.britannica.com/technology/virtual-reality>
- Denso Wave. (08 Juni 2021). *QR Code Development Story*. <https://www.denso-wave.com/en/technology/vol1.html>
- Forbes. What Is Virtual Reality, And How Can It Be Used In The Workplace? Dalam *Forbes Business Council*. Diakses 16 Juni 2021, dari <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/04/05/what-is-virtual-reality-and-how-can-it-be-used-in-the-workplace/?sh=138099b07a1e>
- Kharat, Santosh Abaji dan B.M. Pange. (2013). *QR (Quick Response) Codes and Academic Libraries: Reaching to Mobile Users A Best Practices*. *Journal of Library and Information Science (IJLIS)*, 2(1), 01-18.
- UNESCO. Exploring World Heritage from home with UNESCO. Dalam *UNESCO World Heritage Site Virtual Tours*. Diakses 16 Juni 2021, dari <https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse/exploring-world-heritage-from-home-with-unesco>
- Wikipedia. *Artificial intelligence*. Diakses 10 September 2021, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
- Ovit volorumquia dent offictae pera dolectio. Nequis eatiis ea nus sinvere puditatur, audis aut hillendi dolupta tiureritaque pos simpore lab issequam fugiam, sum harunt qui nobis alitibus vid que ommolupta es conse nulparum fugia conserumqui dundae pa eum aut acepers perrori tes explabore, iducidunt, sit officitur? Bor secusda nullaborunt officatur?
- Elliquo beatem a sintendus aut quat fugia quaero commolu picissime sinvellaut harciate saeptiore sunt, aut raturem delenis sincipiciis et apiento il eum dolo officab oreriam lam volupta temquibus et elendit ex estium quid ut aut eatem quatem qui id quo voluptas audam nobit re im int.
- Occume simusandae nis corrupqui se voluptur, non nosti omnimus.
- Sitae volland andaepe rfernam reriae latem quunt volupta tetur, cus dolorpo repudant, endanih itioest es ante ne numque ipsamus, cus enis eaque volorerumque pellor aut laciundaere volorio blam ut pro doluptium aboruntor ad ent, veniaectem que maionsed quisitat expandus, consequ atusdam as debis core apedit, solo et pedis rem ressitaspel el earion parchit omniae eniendit, alis aut exerum quamus excaquos ut occae iumquodio. Andi conse et molector as natior sum sectempora dereperovit late propria cus rem doluptis velis vent, quam sin preperibusda dolutem nullaute nem nus.
- To voluptatio iure, namus, voluptatiur? Ovit in nonsequi quunt andis es qui occatibusto quam fugit qui nonsequ aerciis modi dolore commollam adis perum natioriore mi, volestia voluptet, offic tempor aut la porporion peris est quibusamenis et am reptassequi is sam, et officiet recte sequae nos exerspe rnatur sam eumet hiciente consecusda que omnisinus, simusae non rerum quatur maios eaquidus, ut aut voluptae volupid eatur?
- Evel mo beatia di blaborporum sundit que omnihilia qui de volorro officienis res utemporectem faceati ommodit asperch iliquun tecaepo rovitaqui aditiore volum is id qui odit ent exped quid mo magnitatur accum volorestio offic tempori busdam ducim

POTENSI WISATA CAGAR BUDAYA SEKOLAH BUNG KARNO

Rio Febriannur Rachman

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

riofrachman21@gmail.com

Pencanangan SDN Purwotengah dan SMPN 2 Kota Mojokerto sebagai cagar budaya dan objek wisata memiliki banyak muatan positif. Asalkan dikemas dengan apik, dua sekolah Bung Karno di masa kecil itu dapat menjadi pemicu semangat nasionalisme dan memunculkan sumbu ekonomi kerakyatan.

Ada banyak bangunan bersejarah yang layak dijadikan objek wisata di Nusantara (Abdullah & Panghastuti, 2018). Bukan hanya karena memiliki nilai historis yang edukatif, namun juga karena keindahan arsitektur lawas pada situs tersebut. Bangunan bersejarah yang dimaksud, banyak ditemui di Kota Mojokerto, di antaranya berstatus sebagai cagar budaya dan mempunyai nilai eksotis termasuk dua sekolah tempat proklamator negeri ini yaitu tempat Soekarno (Bung Karno) menuntut ilmu ketika masih

kecil di *Tweede Inlandsche School* atau Sekolah Ongko Loro, yang saat ini bernama SDN Purwotengah, dan *Europesche Legore School (ELS)*, yang sekarang SMPN 2 Kota Mojokerto. Sejarah mencatat kalau Bung Karno tinggal di Kota Mojokerto pada rentang tahun 1908 hingga 1916 (Djaya, 1983).

Dua sekolah tadi dicanangkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah daerah setempat pada 2019 lalu. Selama ini, cagar budaya berupa bangunan atau kawasan kerap dimanfaatkan sebagai objek wisata. Hal itu juga diperkuat oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, pasal 85 ayat 1, tentang cagar budaya. Poin penting dari regulasi tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Asalkan semua itu dilaksanakan dengan orientasi kesejahteraan masyarakat (Spillane, 1994).

Bangunan bernilai historis dan terlegitimasi sebagai cagar budaya, di mana terdapat benda-benda bersejarah di dalamnya, merupakan warisan penting guna membangun kesadaran identitas nasional (Syaiyullah & Wibowo, 2017). Menariknya, selain mempunyai muatan nilai kebangsaan, cagar budaya bersejarah juga punya potensi pariwisata.

Bangunan cagar budaya dapat menjadi objek wisata edukasi yang menginspirasi. Oleh sebab itu, pemerintah setempat yang ingin menjadikannya sebagai objek wisata dengan kemasan menarik serta kekinian, harus diapresiasi positif (Suwena, 2017). Sejauh ini, Pemerintah Kota Mojokerto sudah mulai berupaya menjadikan dua sekolah Bung Karno sebagai objek wisata sejarah serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.



Gambar 1. Patung Bung Karno Kecil di SMPN 2 Mojokerto

Revitalisasi bangunan cagar budaya, yang selama ini sudah dan masih digunakan sebagai objek wisata, memiliki setidaknya dua pokok perhatian. Pertama, cagar budaya perlu untuk diteliti secara mendalam, mengingat tentu telah terjadi percampuran dan penambahan akibat renovasi bangunan ataupun hal lain selama ini. Kedua, optimalisasi objek wisata cagar budaya harus dilakukan dengan tujuan utama untuk menjaga nilai kebangsaan serta identitas bangsa, dan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan (Wijaya, 2017).

Sejauh ini, Pemerintah Kota Mojokerto sudah menjalankan banyak program untuk merealisasikan cita-cita mewujudkan objek wisata historis sekolah Bung Karno. Dalam banyak kesempatan, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mempromosikan hal ini pada khalayak luas. Dilaksanakan pula sejumlah kajian awal untuk mendukung realisasi keinginan tersebut. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, juga mensosialisasikan keberadaan cagar budaya sekolah Bung Karno dan rencana pemanfaatannya sebagai objek wisata dalam program Srawung di TVRI Jawa Timur pada 18 Agustus 2020.

Pada 1 Juni 2020, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama aparat sipil negara melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila di SDN Purwotengah. SDN Purwotengah berada di Jalan Taman Siswa nomor 16, Kelurahan Purwotengah, Kecamatan Kranggan. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Taman Siswa, sebelah barat berbatasan dengan persil Jalan Taman Siswa 20, sebelah timur berbatasan dengan warung Aneka Sambal, dan sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman. Jarak

antara SDN Purwotengah ke pusat kota atau alun-alun Kota Mojokerto sekitar 800 meter. Pemerintah Kota Mojokerto membangun patung Bung Karno kecil di halaman sekolah tersebut. Patung tersebut dibuat oleh seniman lokal Putut Nugroho.

Sementara itu, pada 17 Agustus 2020, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama aparat sipil negara melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di SMPN 2 Kota Mojokerto Jl. Ahmad Yani No.15, Mergelo, Kelurahan Purwotengah, Kecamatan Magersari. Upacara peringatan hari jadi Jawa Timur pada 12 Oktober 2020 juga dilaksanakan di sana. Sekolah itu memiliki batas utara Jalan Ahmad Yani, batas barat dengan Jalan Purwotengah gang V, batas timur dengan Jalan Purwotengah gang 8, dan batas selatan dengan kantor pegadaian Jalan WR Supratman. Jarak antara SMPN 2 Kota Mojokerto ke pusat kota atau alun-alun Kota Mojokerto sekitar 300 meter. Di salah satu titik sekolah tersebut juga berdiri patung Bung Karno kecil dibuat oleh seniman lokal Putut Nugroho.

Fokus kajian ini adalah melihat bagaimana implementasi kebijakan optimalisasi cagar budaya sekolah Bung Karno sebagai objek wisata historis. Tujuannya adalah mendeskripsikan pandangan tentang upaya optimalisasi cagar budaya sekolah Bung Karno yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk bahan riset selanjutnya. Selain itu, bisa sebagai penambah khazanah untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang kajian cagar budaya.

Teori yang dipakai dalam kajian ini adalah kebijakan publik. Berangkat dari asumsi bahwa Semua instansi pemerintah di level pusat sampai daerah, perlu berinovasi terhadap kemajuan zaman untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik (Cohen, 2014).

Optimalisasi bangunan cagar budaya penting untuk membentuk kepercayaan diri terhadap identitas bangsa dan bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan di era globalisasi dan pasar bebas seperti sekarang ini. Pengembangan sebuah objek wisata memiliki hubungan erat dengan kebijakan publik. Harapannya, semua kebijakan publik di bidang apapun termasuk pariwisata dan ekonomi, dapat memberikan manfaat konkret bagi warga di daerah tersebut (Anderson, 1984).

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan cara membaca data kepustakaan, termasuk yang bersifat audio visual, khususnya tayangan mengenai kebijakan optimalisasi sekolah Bung Karno sebagai objek wisata yang disampaikan pejabat publik Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Dinas Pendidikan Amin Wachid dalam bentuk audio visual pada program Srawung di TVRI Jawa Timur 18 Agustus 2020 yang lalu.

Teori pokok yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep kebijakan publik yang dipopulerkan oleh Thomas R. Dye, yakni, tentang keharusan pemerintah membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi kehidupan warganya. Di Kota Mojokerto, ada keunikan dan potensi kawasan yang tidak ada di tempat lain. Salah satunya, keberadaan bangunan cagar budaya sekolah Bung Karno, tepatnya di SDN Purwotengah dan SMPN 2 Kota Mojokerto.

Pemerintah setempat perlu untuk melakukan optimalisasi bangunan cagar budaya itu demi membangun masyarakat. Dalam hal ini, membangun jiwa nasionalisme melalui nilai-nilai historis bangunan cagar budaya dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Poin yang dilihat dari implementasi kebijakan publik adalah kebermanfaatannya, mengingat kebijakan aplikatif pasti memiliki dampak positif bagi warga setempat (Dunn, 2000).

Kajian ini menggunakan sejumlah riset terdahulu antara lain, yang ditulis oleh Kasaruran (2017) berjudul *Strategi Pengembangan Objek Wisata Sejarah Rumah Pengasingan Soekarno Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Pelajar Di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur*. Meskipun lokasi riset tersebut di Ende, Nusa Tenggara Timur, ada elemen kesamaan dengan kajian ini, yakni tentang ketokohan dan kebersejarahannya sosok Bung Karno. Referensi lain adalah karya C.A. Nugroho dan A.W Purwanti (2018) berjudul *Penerapan Teori Linkage Dalam Penataan Kawasan Wisata Pusaka Soekarno Di Blitar*. Riset tersebut membahas bagaimana strategi membangun objek wisata sejarah tentang Bung Karno di Blitar. Yang tentu saja, punya elemen kesamaan di aspek ketokohan Bung Karno, dengan kajian yang berlokasi di Kota Mojokerto ini.

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memaparkan kondisi sosial yang faktual dalam suatu populasi masyarakat (Hasan, 2002). Dalam konteks kajian ini, populasi yang dimaksud adalah warga Kota Mojokerto. Ada pun bidang kajian yang dijadikan fokus adalah kebijakan publik sehubungan dengan optimalisasi cagar budaya sekolah Bung Karno.

Kajian ini memakai pendekatan kepustakaan, di mana bahan-bahan perpustakaan dijadikan sumber utama memperoleh data (Zed, 2008). Sumber-sumber pustaka yang digunakan tidak lepas dari topik kajian. Sumber audio visual berupa rekaman wawancara dan pernyataan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Dinas Pendidikan Amin Wachid dalam bentuk audio visual pada program Srawung di TVRI Jawa Timur 18 Agustus 2020 yang lalu juga dijadikan rujukan. Analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah reduksi, penyajian, dan perumusan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Hasil analisis dipaparkan berdasarkan kategorisasi dan disesuaikan dengan temuan demi memperoleh gambaran terstruktur mengenai topik yang dibahas (Bogdan & Taylor, 1990).

Semangat Kebangsaan **Bung Karno**

Sejumlah literatur, termasuk dokumen *Staatsblad* Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1918 Nomor 24 tentang status Kota Mojokerto sebagai *Stadsgemeente*, menyebutkan bahwa Kota Mojokerto terbentuk pada 20 Juni 1918 (Yulianingsih, 2012). Kota yang termasuk dalam provinsi Jawa Timur ini berada di jalur transportasi regional lintas selatan yang menghubungkan Surabaya–Jogjakarta–Jakarta (Nuraini, 2017). Oleh karena itu, kawasan ini memiliki posisi strategis guna pengembangan kegiatan pembangunan di Jawa Timur (Adianti, 2019). Jarak Kota Mojokerto dari Ibu kota Jawa Timur Surabaya adalah 52 kilometer. Artinya, Kota Mojokerto merupakan salah satu penyangga kota metropolitan Surabaya (Syafi'i, 2018).

Sejumlah teori sosial menggariskan, manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan, baik kondisi tempat tinggal maupun orang-orang di sekitar (Kenrick, 2015). Lingkungan mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berhubungan seorang manusia. Terlebih, jamak diketahui kalau secara umum, manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa jauh dari masyarakat. Dengan kata lain, apa yang dilakukan individu, pasti dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungannya. Sosok Bung Karno yang visioner pasti ikut dibentuk oleh lingkungannya, termasuk lingkungan di Kota Mojokerto. Beranjak dari teori yang mengatakan bahwa sistem sosial di dalam sebuah komunitas ikut membangun kepribadian seseorang (Durkheim, 1982).

Menumbuhkan Nasionalisme

Salah satu manfaat non-material dalam upaya pengelolaan cagar budaya adalah menumbuhkan rasa nasionalisme di masyarakat. Hal itu menjadi pemicu Pemerintah Kota Mojokerto untuk berusaha agar rencana revitalisasi sekolah Bung Karno bisa berjalan dengan baik serta segera terwujud. Cagar budaya erat kaitannya dengan nuansa kesejarahan.

Dalam program Srawung di TVRI Jawa Timur, Wali Kota Mojokerto Ita Puspitasari menyebutkan, pengembangan potensi objek wisata cagar budaya sekolah-sekolah Bung Karno di Mojokerto memiliki banyak manfaat, termasuk di ranah edukasi kesejarahan. Edukasi tersebut bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang, antara lain, aspek heroisme atau kepahlawanan. Kesejarahan bisa diartikan sebagai aspek pengetahuan. Masyarakat perlu tahu bahwa ada jejak-jejak proklamator di Kota Mojokerto.

Selama ini, yang banyak diketahui adalah kiprah Bung Karno di Surabaya, perkuliahan Bung Karno di Institut Teknologi Bandung, dan makam Bung Karno di Blitar. Masyarakat, paling tidak warga Kota Mojokerto dan Jawa Timur, mesti paham pula bahwa kawasan ini bersejarah sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan rasa cinta tanah air. Mengingat, Bung Karno adalah tokoh bangsa.

Sementara itu, dari sudut pandang heroisme atau kepahlawanan, sudah barang tentu **optimalisasi cagar budaya sekolah Bung Karno bisa memercikkan semangat rela berkorban pada khalayak. Tokoh ini merupakan pejuang yang inspiratif tidak hanya di dalam negeri. Namun juga, populer hingga level internasional.**

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mengenalkan sekolah-sekolah Bung Karno yang memiliki nilai-nilai sejarah pada masyarakat. Agar masyarakat tertular semangat Bung Karno dan bangga pada kota ini. Demikian yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid dalam program Srawung di TVRI Jawa Timur.

Pernyataan Amin Wachid menggambarkan urgensi penumbuhan jiwa patriotisme di era globalisasi seperti sekarang ini. Di masa lalu, Bung Karno selalu ingin menjadikan Nusantara bangsa yang merdeka dari penjajahan. Di era kekinian, masyarakat Indonesia seharusnya tetap menjaga nilai-nilai luhur kemerdekaan. Tidak boleh berkiblat pada budaya asing yang meruntuhkan nilai-nilai keindonesiaan.

Tentu saja, karena sasarannya adalah masyarakat, dan apa yang ada dalam pandangan Ika Puspitasari maupun Amin Wachid merupakan sebuah pola kebijakan publik, warga setempat punya peran penting dalam merealisasikan rencana ini. Apalagi dalam studi cagar budaya, partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya merupakan prioritas yang harus tercapai. Kesadaran masyarakat untuk turut menjaga cagar budaya

dan mensosialisasikan nilai-nilai kesejarahan dalam bangunan cagar budaya adalah hal pokok. Langkah yang juga ditempuh Pemerintah Kota Mojokerto adalah memasukkan pelajaran tentang sekolah Bung Karno dalam muatan lokal serta kurikulum sekolah-sekolah di Kota Mojokerto.

Di samping itu, sosialisasi mengenai cagar budaya sekolah Bung Karno terus dilaksanakan, termasuk melalui media massa maupun dengan diadakannya banyak upacara hari nasional di sana. Materi sosialisasi dari Pemerintah Kota Mojokerto berisi tentang manfaat pengelolaan cagar budaya sebagai objek wisata. Manfaat yang dimaksud antara lain, di aspek sosial budaya dan ekonomi. Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif menjaga warisan leluhur itu. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian (Wirastari & Suprihardjo, 2012).

Perwujudan objek wisata berbasis cagar budaya memang berbeda dengan objek wisata lainnya. Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa. Di dalamnya ada pesan-pesan, baik tersurat maupun tersirat, tentang identitas diri bangsa Indonesia. Pengelolaan cagar budaya dengan baik, termasuk cagar budaya sekolah-sekolah Bung Karno adalah usaha yang memerlukan dukungan semua pihak, demi memperkokoh kesadaran atas hasil budaya bangsa, kepentingan pariwisata dan kepentingan nasional lainnya. Oleh sebab itu, selama ini Pemerintah Kota Mojokerto sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, termasuk eksponen masyarakat (Diskominfo Kota Mojokerto, 2020).

Strategi pengelolaan cagar budaya yang dilakukan pemerintah perlu mempertimbangkan empat elemen penting, yakni legalitas, kelembagaan, fisik bangunan, dan pembiayaan. Dalam konteks sekolah-sekolah Bung Karno di Mojokerto, keempat aspek itu sudah bisa dijelaskan sejak awal, oleh karena bangunan sekolah saat ini sudah merupakan aset pemerintah daerah. Jadi, secara legal formal, kelembagaan, fisik, dan pembiayaannya dapat dengan mudah dikelola. Apabila bangunan cagar budaya itu dikelola oleh pihak di luar pemerintah, optimalisasi yang dijalankan oleh pemerintah setempat akan lebih rumit atau terkendala di empat elemen tadi.

Pengelolaan cagar budaya dikenal dengan ungkapan konservasi. Konservasi bangunan cagar budaya harus mempertahankan nilai-nilai penting yang otentik dan melekat padanya. Nilai-nilai tersebut adalah Identitas "*Sense of Place*", historis atau kesejarahan, arsitektural, manfaat ekonomis, pariwisata dan rekreasi, inspiratif, dan edukatif (Febrianto, dkk, 2018). Melihat komitmen dan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tampak kalau nilai-nilai yang dimaksud telah diakomodasi secara optimal.

Pengelolaan objek wisata cagar budaya umumnya memakai model zonasi. Pembagian zona dapat memudahkan proses pengembangan dari waktu ke waktu. Pasalnya, pengembangan objek wisata tentu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan. Zona yang dimaksud antara lain, zona inti (kawasan utama cagar budaya), zona penyangga (radius 50 meter dari batas zona inti terluar), zona pengembang (radius 500 meter dari batas zona penyangga terluar), dan zona penunjang (radius 500 meter dari batas zona pengembang terluar). Dalam tiap zona bisa diisi dengan elemen-elemen yang dibutuhkan, seperti panggung kebudayaan, pasar seni, objek wisata tambahan, dan lain

sebagainya (Umaternate, dkk, 2016). Pemerintah Kota Mojokerto perlu mempertimbangkan soal zonasi ini saat melakukan pengembangan objek wisata cagar budaya sekolah Bung Karno.



Gambar 3. Salah satu ruangan bersejarah di SMPN 2 Kota Mojokerto

Karakter Bung Karno yang selalu ingin jadi nomor satu, selalu ingin melindungi orang lain, selalu ingin berjuang, ditempa saat ia masih kecil. Sejumlah sumber menyebutkan, tatkala sekolah di Kota Mojokerto, Bung Karno gemar bermain dengan kawan-kawannya, dari berbagai latar belakang. Dia juga tidak suka melihat ada teman-teman yang berkelahi. Bung Karno secara khusus bersahabat dengan orang dari Belanda, agar bisa belajar bahasa Belanda. Artinya, kegigihan untuk belajar atau kehausan akan ilmu telah tampak.

Tidak heran bila kemudian Bung Karno menjadi tokoh terdepan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Informasi atau pelajaran semacam ini perlu ditularkan pada anak-anak sekolah, bahkan masyarakat secara umum. Bila diperhatikan secara lebih mendalam, pengembangan potensi objek wisata cagar budaya sekolah Bung Karno punya dampak positif bagi khazanah pengetahuan sejarah proklamator Indonesia. Manfaatnya bisa dirasakan warga republik ini secara keseluruhan.

Terdapat beberapa konsep, selain konservasi, yang perlu dipahami pihak-pihak pelestari cagar budaya (Sari, dkk, 2017). Konsep-konsep yang dimaksud bisa menjadi garis pembatas mana yang boleh dan tidak boleh, karena cagar budaya bisa menjadi entitas yang sakral bagi keberlangsungan sejarah. Konsep yang juga perlu diketahui oleh Pemerintah Kota Mojokerto itu adalah preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, serta demolisi.

Preservasi merupakan pelestarian cagar budaya dengan tetap menjaga seperti kondisi asli bangunan tanpa perubahan sedikit pun. Usaha mencegah penghancuran

bangunan cagar budaya masuk dalam kategori Preservasi. Ada pun restorasi atau dikenal pula dengan sebutan rehabilitasi adalah usaha mengembalikan kondisi suatu cagar budaya di keadaan semula. Termasuk di dalamnya, menghilangkan tambahan-tambahan yang sempat ada serta memasang kembali komponen-komponen yang seharusnya ada seperti sedia kala.

Sedangkan rekonstruksi adalah usaha mengembalikan kondisi cagar budaya yang dianggap mengalami perubahan, semirip mungkin dengan keadaan pada awalnya. Proses pengembalian tersebut bisa memakai bahan-bahan atau material lama maupun baru. Sementara itu, adaptasi atau biasa disebut pula revitalisasi merupakan upaya mengubah cagar budaya seminimal mungkin agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai dalam hal kegunaannya, tanpa perubahan drastis. Ada pun demolisi merupakan usaha mendekonstruksi cagar budaya yang sudah sangat rusak dan bila dipertahankan, dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat sekitar.

Di seputar Mojokerto, baik di Kabupaten Mojokerto maupun Kota Mojokerto, terdapat banyak objek wisata. Destinasi wisata di sana memiliki beragam jenis, mulai wisata cagar budaya seperti situs trowulan, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata alam, wisata edukasi, dan lain sebagainya (Lestari, 2016). Apabila Pemerintah Kota Mojokerto mengoptimalkan cagar budaya sekolah Bung Karno sebagai objek wisata, pasti akan menambah khazanah pariwisata di kawasan Mojokerto. Bahkan, ke depan, dapat pula dibuat paket khusus sinergis melancong ke tempat-tempat wisata di daerah ini secara terpadu. Muaranya, objek wisata yang bagus di satu daerah, bisa pula berimbas positif ke daerah lainnya (Ding & Pilgram, 1995).

Menguatkan Ekonomi

Pemerintah Kota Mojokerto selalu berupaya meningkatkan taraf perekonomian warga. Terdapat beraneka program yang telah dijalankan. Termasuk, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif berikut menata sistem hukum di daerah (Zulaikha & Paribrata, 2017). Transparansi dan reformasi birokrasi bisa meningkatkan investasi yang punya dampak baik bagi perekonomian.

Di lain pihak, adanya destinasi wisata baru yang dikemas secara apik pasti akan ikut menggerakkan ekonomi rakyat. Analoginya, keberadaan objek wisata yang representatif pasti menciptakan rantai pasok ekonomi yang panjang (Pitana & Gayatri, 2005). Mulai dari penyediaan transportasi, pusat jajanan/oleh-oleh, penginapan, rumah makan, dan lain sebagainya. Meski demikian, ada tantangan yang mesti dijawab oleh Pemerintah Kota Mojokerto, yakni, jangan sampai rantai ekonomi dari hulu ke hilir itu justru dikuasai konglomerasi.

Dalam program Srawung di TVRI Jawa Timur Wali Kota Mojokerto Ita Puspitasari meyakini bahwa keberadaan objek wisata baru yang berbasis cagar budaya pasti berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Untuk merealisasikan cita-cita itu, Pemerintah Kota Mojokerto pasti akan membuat regulasi ketat agar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pengembangan objek wisata atau museum cagar budaya ini diperuntukkan merata bagi rakyat Kota Mojokerto.

Cagar budaya adalah kekayaan bangsa yang punya makna besar bagi masyarakat. Baik di aspek nilai moral, sejarah, maupun pengetahuan. Sehingga, tidak pas apabila

dijadikan komoditas yang hanya mengenyangkan kelompok tertentu atau konglomerasi. Tujuan pengelolaan cagar budaya adalah memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, termasuk untuk kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum (Hendriati, 2016). Terlebih, situs ini merupakan peninggalan yang berhubungan dengan Bung Karno. Seorang tokoh yang selalu punya jargon kerakyatan serta keadilan sosial.

Bung Karno selalu punya visi memajukan ekonomi kerakyatan. Demokrasi yang ada di Indonesia juga bertolak dari pandangan: dari, oleh, dan untuk rakyat. **Pada era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sistem ekonomi mesti pula memanfaatkan teknologi canggih. Konteksnya, mempromosikan objek wisata mesti pula melalui internet.** Lebih jauh lagi, semua kegiatan ekonomi pendukung objek wisata cagar budaya sekolah-sekolah Bung Karno mesti pula dipromosikan melalui internet atau media sosial berbasis digital (Ri'aeni, 2015).

Upaya melestarikan situs cagar budaya mesti didukung oleh semua pihak (Hadiwinoto, 2002). Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Mojokerto mesti bisa memberi motivasi masyarakat dan mengundang sinergitas pihak-pihak lain, swasta maupun akademisi, untuk turut mensosialisasikan dan membangun objek wisata cagar budaya sekolah-sekolah Bung Karno itu. Artinya, pelestarian cagar budaya bisa berjalan dengan baik jika ditopang spirit kemitraan. Apalagi, jika berbasis kearifan lokal serta kekuatan swadaya masyarakat.

Terdapat sejumlah motivasi yang bisa disosialisasikan pada masyarakat oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Eksekutif perlu aktif menyampaikan motivasi-motivasi tersebut. Muatan motivasi itu antara lain berisi, ajakan untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan cagar budaya dari generasi ke generasi. Selain itu, harus juga disampaikan bahwa menjaga cagar budaya bisa meningkatkan pengetahuan dan kecintaan terhadap nilai-nilai sejarah kebangsaan. Apabila masyarakat mencintai dan memelihara cagar budaya di daerahnya masing-masing, keragaman lokalitas di Indonesia akan terjaga. Motivasi yang paling kuat bagi masyarakat adalah adanya peluang perputaran roda ekonomi. Masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi detail mengenai ini sehingga semangat mereka untuk menjaga dan melestarikan objek wisata berbasis cagar budaya lebih tebal. Salah satu karakteristik cagar budaya adalah eksistensi jati diri atau identitas daerah. Sudah barang tentu, warga di sekitar situs cagar budaya, secara historis, punya ikatan erat dengan cagar budaya yang dimaksud.

Salah satu poin menarik dari cagar budaya sekolah-sekolah Bung Karno di kota Mojokerto adalah arsitekturnya yang menawan. Sejumlah pakar menyebutkan, kalau arsitektur sekolah-sekolah di era 1900-an awal di Indonesia masuk kategori aliran transisi (Purnomo, 2017; Handinoto & Hartono, 2006). Bangunan semacam ini sukar untuk diimplementasikan di era kekinian, karena memang tidak umum atau bukan aliran tradisional yang punya kedekatan dengan spirit masyarakat. Meski demikian, bukan berarti bangunan transisi tidak menarik untuk disimak bahkan dinikmati eksotismenya (Handinoto, 2012). Justru kajian mengenai bangunan transisi di Nusantara menjadi topik tersendiri di kalangan arsitek (Gideon, 1971).

Pelestarian cagar budaya perlu pula memberi atensi pada unsur-unsur penting, yakni, integritas (*integrity*), keaslian (*authenticity*) serta kemanfaatan (*sustainability use*).

Kemanfaatan dalam konteks kebijakan publik, bidang apa pun jua, mesti melingkupi elemen ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi. Dengan demikian, keuntungan (*benefit*) yang dapat dirasakan oleh masyarakat sifatnya komprehensif (Hermawan, 2018).

Demi mewujudkan kebermanfaatan yang dimaksud, Pemerintah Kota Mojokerto harus mengambil langkah-langkah strategis di segala lini hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai. Bagaimana pun juga, optimalisasi cagar budaya untuk objek wisata pasti membutuhkan anggaran konkret. Persoalan keuangan ini bisa pula didiskusikan dengan jajaran samping seperti pemerintah provinsi Jawa Timur, Balai Pelestarian Cagar Budaya setempat, bahkan pihak swasta atau komunitas masyarakat yang peduli dengan cagar budaya. Dengan kata lain, ada sinergitas antar pemerintah daerah setempat dan pihak swasta serta eksponen masyarakat.

Pada bagian lain, demi menguatkan pelayanan wisata, bisa saja dibuatkan rute terusan atau rute wisata terintegrasi. Misalnya, ada program *tour* wisata terpadu di kawasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Mengingat di dua daerah ini ada banyak lokasi wisata. Khususnya, wisata berbasis cagar budaya. Di Kabupaten Mojokerto, ada banyak situs cagar budaya, salah satu yang terkenal adalah situs Trowulan. Melalui cara ini, potensi ekonomi bisa makin digali dan dimanfaatkan. Sejumlah riset menyebutkan, kemasan yang apik dan kreatif dari rute wisata terintegrasi memiliki imbas positif di aspek ekonomi yang lebih besar dari pada jika wisata dikemas terpisah (Aliflyantera, 2016).

Model rute wisata terintegrasi semacam ini serupa dengan tiket parsial atau terusan pada wahana wisata buatan modern, contohnya di Wisata Bahari Lamongan. Para wisatawan diberikan pilihan, ingin berwisata secara parsial atau menikmati wisata secara keseluruhan. Tentu saja, konsep ini perlu dimatangkan dan dikaji sedemikian rupa agar menarik dan menjadi pilihan pelancong (Hakim, 2016). Ini tugas berat yang diemban tidak hanya oleh Pemerintah Kota Mojokerto, namun juga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana pun juga, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab memajukan daerahnya. Yang jelas, Pemerintah Kota Mojokerto tetap menjadi *leading sector*. Analisis secara menyeluruh atau kajian mengenai SWOT (*Strengths* atau kekuatan, *Weaknesses* atau kelemahan, *Opportunities* atau peluang, dan *Threats* atau ancaman) perlu dilaksanakan. Dengan demikian, bisa diketahui apa saja yang penting, yang genting, dan penentuan skala prioritas pekerjaan optimalisasi.

Ada sebuah teori perkotaan yang bisa dikontekstualisasikan dengan isu pengelolaan cagar budaya di sebuah daerah, seperti kota Mojokerto. Teori yang dimaksud bernama *Integral Urbanism* (Ellin, 2006). Dalam teori itu dipaparkan, sebuah sistem perkotaan idealnya saling terintegrasi. Aspek-aspek yang saling terintegrasi itu antara lain elemen hibriditas, konektivitas, keterbukaan, keaslian, dan kerentanan.



Gambar 4. Buku dan foto Bung Karno dipajang di SDN Purwotengah

Pada 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada masa depan dunia yang lebih baik. Segenap negara di dunia berikut pemerintah di level mana pun, diharapkan merumuskan program atau kebijakan yang selaras dengan satu atau lebih dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Tujuh belas poin itu adalah *No Poverty* atau mengakhiri kemiskinan, *Zero Hunger* atau mengakhiri kelaparan, *Good Health and Well-Being* atau memastikan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan masyarakat, dan *Quality Education* atau memastikan pendidikan berkualitas. Poin lainnya adalah *Gender Equality* atau kesetaraan gender, *Clean Water and Sanitation* atau mewujudkan air bersih dan sanitasi yang sehat, *Affordable and Clean Energy* atau memastikan akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan dan *Decent Work and Economic Growth* atau memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, ada pula poin *Industry, Innovation and Infrastructure* atau merealisasikan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat mendukung industrialisasi inklusif serta inovasi, *Reduced Inequalities* atau mengurangi kesenjangan sosial, *Sustainable Cities and Communities* atau membangun kota dan komunitas yang lestari, *Responsible Consumption and Production* atau mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang seimbang, serta *Climate Action* atau peduli pada perubahan iklim.

Tujuan lainnya adalah *Life Below Water* atau mengelola sumber daya air dengan baik, *Life on Land* atau melestarikan sumber daya di daratan, *Peace, Justice, and Strong Institutions* atau mewujudkan masyarakat yang damai, adil, yang diperkuat kelembagaan, serta *Partnership for The Goals* atau menguatkan kemitraan antar pihak.

Bila beranjak dari perspektif tujuan pembangunan berkelanjutan, kebijakan optimalisasi cagar budaya sekolah Bung Karno sebagai objek wisata selaras dengan sejumlah poin. Di antaranya, pada poin *Decent Work and Economic Growth* atau memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, karena kebijakan ini juga berupaya membangun pertumbuhan ekonomi. Juga, pada poin *Sustainable Cities and Communities* atau membangun kota dan komunitas yang lestari, karena kebijakan ini menjaga kearifan lokal di kawasan Kota Mojokerto. Tentu saja, pelestarian cagar budaya ini dapat membangkitkan kebanggaan masyarakat. Yang tak kalah penting, kebijakan ini juga selaras dengan poin *Partnership for The Goals*, karena memantik kemitraan semua elemen yang berkenaan dengan pengembangan wisata cagar budaya di Kota Mojokerto. Baik dari pemerintah daerah lain, swasta, maupun eksponen masyarakat.

Simpulan

Pemerintah Kota Mojokerto memiliki komitmen untuk membuat objek wisata sejarah di cagar budaya sekolah-sekolah Bung Karno, yakni, di SDN Purwotengah dan SMPN 2 Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto menganggap keberadaan objek wisata sejarah itu setidaknya memiliki dua manfaat utama. Pertama, sebagai stimulus menguatkan rasa nasionalisme warga Kota Mojokerto. Kedua, sebagai salah satu katalisator pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan objek wisata sejarah berbasis cagar budaya yang baik juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang digariskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setidaknya ada tiga poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan ini, yakni, *Decent Work and Economic Growth*, *Sustainable Cities and Communities*, dan *Partnership for The Goals*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Pangastuti, T. (2018). Analisis Hubungan Antara Bangunan Bersejarah, Mitos, Budaya Masyarakat Lokal Dengan Motivasi Wisatawan Berkunjung Di Daya Tarik Wisata Tamansari Yogyakarta. *Journal of Tourism and Economic*, 1(1).
- Adianti, S. Y. (2019). *Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Perspektif Stakeholders (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Anderson, James E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Cipta Adi Pustaka. (1994). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 15, PT Cipta Adi Pustaka: Jakarta
- Cohen, B. (2014). *The Smartest Cities In The World 2015*. <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>
- Dewantara, A. (2017). *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia Dalam Kacamata Soekarno)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ding, Peiyi & John Pilgrim. (1995). Environmental Audit: An Emerging Concept in Sustainable Tourism Development. *The Journal of Tourism Studies*. Vol. 6.No.2. The Department of Tourism James Cook University. Queensland.
- Diskominfo Kota Mojokerto. 2020. *Kemendikbud Kagum Soekarno Centre yang Disajikan Wali Kota Mojokerto*. 1 Oktober 2020. Diakses di <https://diskominfo.mojokertokota.go.id/berita/kemendikbud-kagum-soekarno-centre-yang-disajikan-walikota-mojokerto.html>
- Djaya, Tamar. (1983). *Soekarno Hatta Ada Persamaan dan Perbedaannya*. Jakarta: Sastra Hudaya
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Durkheim, E. (1982). What is a social fact?. In *The rules of sociological method* (pp. 50-59). Palgrave, London.
- Dye, Thomas R. (1972). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gideon, Siegfried. (1971). *Architecture And The Phenomena Of Transition*. Cambridge, Massachussttes: Harvard University Press.
- Handinoto, H., & Hartono, S. (2006). Arsitektur Transisi di Nusantara Dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa pada Peralihan Abad 19 ke 20). *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 34(2), 81-92.
- Handinoto. (2012). *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada masa Kolonial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hermawan, R. (2018). Akselerasi Pembangunan Manusia Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Kawasan (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Mojokerto). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1).
- Hermawan, W. H. (2010). *Soekarno And Pancasila (Political Idea Growth of Soekarno About Pancasila)* (Doctoral dissertation, FISIP Undip).
- Kasaruran, S. L. (2017). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Sejarah Rumah Pengasingan Soekarno Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Pelajar Di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Kenrick, D., Neuberg, S. L., & Cialdini, R. B. (2015). *Social psychology*. USA: Pearson Education
- Lestari, D. W. T. (2016). *TA: Perancangan Media Promosi Batik Kota Mojokerto Melalui Ambient sebagai Upaya Mendukung Program Mojokerto Service City* (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya).
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publishing Inc
- Nikasari, R. (2017). *Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Nugroho, C. A., & Purwantiastning, A. W. (2018). Penerapan Teori Linkage Dalam Penataan Kawasan Wisata Pusaka Soekarno Di Blitar. *PURWARUPA Jurnal Arsitektur*, 1(2), 29-34.
- Nuraini, I. (2017). Kualitas pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di jawa timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15.
- Pemerintah Kota Mojokerto. (2017). *RPJMD*. Mojokerto: Pemerintah Kota Mojokerto tersedia di <https://www.mojokertokota.go.id/picture/lkip/223651Revisi%20RPJMD%20Kota%20Mojokerto%20revisi%2014%20Agustus%202017.pdf>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2015. *About the Sustainable Development Goals*. Tersedia di <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Diakses pada 11 September 2018
- Pitana, I Gede & Putu G. Gayatri. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Purnomo, H., Waani, J. O., & Wuisang, C. E. (2017). Gaya & Karakter Visual Arsitektur Kolonial Belanda di Kawasan Benteng Oranje Ternate. *Media Matrasain*, 14(1), 23-33.
- Ri'aeni, Ida. "Penggunaan New Media dalam Promosi Pariwisata Daerah Situs Cagar Budaya di Indonesia." *Jurnal komunikasi* 9.2 (2015): 187-197.
- Sanusi, A. (2018). Pemikiran Transformatif Soekarno Dalam Politik Islam (Pendekatan Transformatif Bill Gould, Karl Stenbrink, dan Kontowijoyo). *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(2).
- Spillane, James. (1994). *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukirno, Setyo, F. I. R. L. A. (2017). Pergeseran Gaya Hidup Masyarakat Sub Urban Area Di Kota Mojokerto. *Paradigma*, 5(1).
- Suwena, I Ketut & Widyatmaja, I Gusti Ngurah, (2017), *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar: Pustaka Larasan
- Syafi'i, M. (2018). Perancangan Video Profil Kota Mojokerto Sebagai Media Promosi Pariwisata. *SKRIPSI Jurusan Seni dan Desain-Fakultas Sastra UM*.
- Syaifullah, M., & Wibowo, B. (2017). Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Sebagai Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Masyarakat Sekitar di Kota Pontianak Kalimantan Barat. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 10(2), 222-233.
- UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Jakarta
- Wijaya, Harry Iskandar, (2017), "Cagar Budaya dan Pariwisata", tersedia di <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsbsumbar/cagar-budaya-dan-pariwisata/>, diakses pada 2 Januari 2020
- Yoeti, Oka A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa
- Yoeti, Oka A. (1997). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Yulianingsih, W. (2012). Sejarah Kota Mojokerto (1918-1942). *SKRIPSI Jurusan Sejarah-Fakultas Ilmu Sosial UM*.
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 131-162.

PARTISIPASI TERNATE HERITAGE SOCIETY DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI TERNATE

Helmi Yanuar Dwi Prasetyo dan Komang Ayu Suwindiatrini
Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
helmi.arkeo@gmail.com dan ayu.suwindia@gmail.com

"Menyampaikan sejarah masa lampau dan menghadirkan kembali di masa kini sebagai pembelajaran untuk masa yang akan datang merupakan salah satu cara terbaik dalam penanaman kesadaran pelestarian cagar budaya kepada masyarakat terutama kepada kaum muda sebagai generasi penerus bangsa."

Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak warisan budaya baik itu bersifat kebendaan (*tangible*) atau tak benda (*intangible*), hal tersebut merupakan kekayaan budaya yang perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai-nilai kebudayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia pasal 32 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa adanya keinginan Bangsa Indonesia untuk selalu memajukan kebudayaan nasional dan memelihara nilai-nilai kebudayaan untuk menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi penerus bangsa (Abdillah, 2020). Menurut Aksa dalam Riris Purbasari (2018) menyebutkan bahwa warisan budaya dapat diartikan sebagai suatu yang dilestarikan dari generasi masa lalu kemudian diwariskan kepada generasi sekarang, yang kemudian akan mewariskannya untuk generasi yang akan datang.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dengan demikian, keberadaan cagar budaya dianggap penting karena memiliki nilai penting yang terkandung di dalamnya yang bisa dijadikan pelajaran bagi generasi penerusnya, oleh karena itu keberadaannya harus terus dilestarikan. Perlu dipahami pula bahwa pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau akan tetapi justru sebaliknya, pelestarian harus berwawasan ke masa kini dan masa depan, karena nilai-nilai penting itu sendiri diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan (Mulyadi, 2019).

Berbicara tentang pelestarian cagar budaya memang bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota akan tetapi pelestarian cagar budaya semestinya menjadi tanggung jawab bersama yang dikerjakan secara sinergis dan berkelanjutan. Hakikat dari pelestarian cagar budaya adalah suatu kegiatan berkesinambungan (*sustainable activity*)

yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya (Mulyadi, 2011). Oleh karenanya, dalam pelestarian cagar budaya sebisa mungkin pemilik sah dari cagar budaya yakni masyarakat itu sendiri harus terlibat. Masyarakat perlu diajak “menghidupkan” warisan budaya di sekitarnya agar warisan budaya tersebut dapat “menghidupi” mereka baik secara lahir maupun batin (Sulistyanto, 2011). Hal tersebut sejalan dengan undang-undang no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa setiap orang dapat berperan dalam pelestarian cagar budaya, baik dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya.

Perlu diingat bahwa upaya pelestarian cagar budaya tidak hanya sekedar menjamin keberadaan fisik sebuah cagar budaya namun juga nilai penting yang terkandung di dalamnya. Terdapat dua aspek dalam pelestarian yakni aspek fisik dan non-fisik. Secara fisik, pelestarian mencakup tindakan konservasi bangunan dan situs oleh para ahli, sedangkan pelestarian secara non-fisik dapat diawali dengan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya, perasaan *handarbeni* atau memiliki harus mengakar dalam hati dan pikiran setiap orang melalui proses pendidikan baik formal maupun non-formal (Haryono, 2009). Kepedulian dan rasa memiliki terhadap warisan budaya akan tertanam dalam benak masyarakat dengan mengetahui sejarah dan nilai penting yang terkandung di dalamnya sehingga menumbuhkan kesadaran melestarikan dan rasa bangga kepada warisan budaya yang mereka miliki.

Dalam rangka mencapai tujuan pelestarian dari suatu cagar budaya, Yadi Mulyadi (2011) menyebutkan bahwa ada beberapa tahap yang perlu dilaksanakan yakni; 1. meneliti dan mengungkapkan nilai-nilai penting cagar budaya; 2. melindungi sebagian atau seluruh cagar budaya agar dapat bertahan lebih lama dalam sistem budaya; 3. sedapat mungkin menghambat kerusakan atau merosotnya nilai-nilai pentingnya; 4. menyajikan dengan sebaik-baiknya nilai-nilai penting cagar budaya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, perumusan nilai penting tentu harus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi untuk membantu dalam menghambat merosotnya nilai-nilai penting dengan cara menyajikan dan menyebarkanluaskannya kepada khalayak umum untuk mewujudkan kesadaran bersama akan pentingnya sebuah cagar budaya dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu contoh keterlibatan masyarakat melalui komunitas yang peduli terhadap pelestarian warisan budaya di Ternate telah dilakukan oleh *Ternate Heritage Society (THS)* sejak tahun 2008. Pulau Ternate memang dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan warisan budaya yang berlimpah baik *tangible* maupun *intangible*, sebagai salah satu kesultanan di nusantara dan pernah menjadi pusat pemerintahan VOC menjadikan Ternate sebagai pusat peradaban sehingga tidak mengherankan jika di pulau kecil ini memiliki berbagai warisan budaya mulai dari benda-benda dan bangunan bersejarah hingga adat istiadat yang sangat kuat. Oleh karena itu warisan budaya yang ada, patut untuk dilestarikan agar keberadaannya dapat menjadi kebanggaan dan jati diri masyarakat di Ternate.

Sejak berdirinya *Ternate Heritage Society* yang menaruh perhatian pada pelestarian warisan budaya telah berperan serta dalam melestarikan warisan budaya yang ada di Ternate dan sekitarnya melalui kegiatan-kegiatan yang dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dari kaum muda di Ternate. Menyampaikan sejarah masa lampau dan menghadirkan kembali di masa kini sebagai pembelajaran untuk masa yang akan datang merupakan salah satu cara terbaik dalam penanaman kesadaran pelestarian cagar

budaya kepada masyarakat terutama kepada kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Tulisan ini menggambarkan bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh *Ternate Heritage Society* dalam pelestarian cagar budaya di Ternate.

Pembahasan

Pelestarian dalam konteks cagar budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Mulyadi, 2019). Pengelolaan cagar budaya harus senantiasa memperhatikan kebermanfaatannya baik untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya pelestarian cagar budaya melihat masyarakat sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, paradigma pelestarian cagar budaya pada masa kini harus berubah tidak hanya pada upaya konservasi fisik situs (sumber daya arkeologi) saja, tetapi juga harus memperhatikan kebermaknaan sosial situs tersebut bagi masyarakat di sekitarnya (Byrne dalam Sulistyanto, 2011). Partisipasi masyarakat dalam sebuah pengelolaan cagar budaya diharapkan dapat terciptanya pelestarian cagar budaya secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, agama, sosial dan pariwisata yang berwawasan pelestarian.

Salah satu bentuk pengelolaan cagar budaya yang bersifat partisipatoris dengan masyarakat sebagai pelaku utama ialah pengelolaan berbasis komunitas. Yadi Mulyadi (2014) menjelaskan bahwa dalam kerangka konseptual pengelolaan cagar budaya berbasis komunitas menekankan pada konsep pembangunan masyarakat sebagai suatu proses "aksi sosial" di mana masyarakat mengorganisir diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan; merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan non-pemerintah di luar masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam sebuah proses pelestarian cagar budaya, masyarakat berhak menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upayanya melestarikan cagar budaya dengan cara mereka sendiri sesuai dengan kapasitasnya. Bentuk pengelolaan berbasis komunitas pada prinsipnya sejalan dengan pemanfaatan cagar budaya dewasa ini yang tidak hanya dilihat dari konteks arkeologi, melainkan lebih pada keterkaitan antara tinggalan arkeologi sebagai cagar budaya tersebut dengan kehidupan masyarakat kini, baik yang menyangkut kepentingan akademis, sosial, ideologis, ekonomis dan kepentingan-kepentingan lainnya (Mulyadi, 2011). Pengelolaan cagar budaya berbasis komunitas dengan memanfaatkan cagar budaya sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sarana pendidikan non-formal dalam rangka menanamkan kesadaran akan nilai penting dan sejarah suatu cagar budaya telah dilakukan oleh komunitas *Ternate Heritage Society*.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas merupakan kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Kelompok orang atau masyarakat yang peduli dengan pelestarian warisan budaya di Ternate kemudian tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama *Ternate Heritage*

Society. Menurut Maulana Ibrahim (40 tahun), salah satu pendiri dari *Ternate Heritage Society* mengungkapkan bahwa komunitas ini terbentuk pada tahun 2008 yang dipicu oleh keinginan sekelompok anak muda untuk membuat sebuah wadah sebagai tempat belajar bersama tentang warisan budaya yang ada di Ternate, bermula dari ketertarikan akan warisan budaya yang ada kemudian belajar bersama dan pada akhirnya mengetahui serta mengenal warisan budaya yang mereka miliki. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya kekhawatiran mereka akan musnahnya warisan budaya di Ternate jika tidak ada kesadaran masyarakat terutama kaum muda untuk mulai menjaga dan melestarikan warisan budaya di Ternate untuk diwariskan kepada generasi mendatang karena kurangnya pemahaman terhadap nilai penting dan sejarah warisan budaya milik mereka sendiri.



Gambar 1. Logo Ternate Heritage Society
(Sumber : Ternate Heritage Society)

Senada dengan Ko Molid (panggilan akrab Maulana Ibrahim), Didith Prahara (32 tahun) selaku Ketua *Ternate Heritage Society* menyebutkan bahwa tujuan utama dari komunitas ini adalah mengedukasi masyarakat umum terutama generasi muda tentang warisan budaya di Ternate dengan cara belajar bersama melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas ini. Dengan metode belajar bersama dan saling berbagi cerita tentang warisan budaya di Ternate diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya di Ternate sebagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada anak cucu di kemudian hari. Penanaman kesadaran mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai salah satu identitas bangsa kepada generasi muda sangatlah tepat karena penerus bangsa ini yang harus menjaga dan mempertahankan keberadaan cagar budaya agar dapat dinikmati pula oleh generasi-generasi yang akan datang (Winarni, 2018).

Pada awalnya, kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas ini adalah Bacarita Pusaka Ternate (awalnya bernama Diskusi Pusaka) dan Jelajah Pusaka Ternate. Bacarita Pusaka Ternate merupakan kegiatan bincang-bincang yang membahas isu-isu terkini mengenai permasalahan warisan budaya Ternate bersama berbagai narasumber yang handal di bidangnya. Pada beberapa kesempatan, kegiatan ini diselenggarakan di tempat-tempat bersejarah misalnya di Benteng Oranje, Benteng Kalamata, Museum Rempah dan Masjid Kesultanan Ternate. Pembahasan isu pelestarian warisan budaya mulanya disampaikan secara ringan dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam sebagai bahan diskusi dan berbagi cerita, namun pada perkembangannya seringkali

terjadi perdebatan antara narasumber dan peserta yang justru lebih “menghidupkan” jalannya kegiatan. Dalam kegiatan ini juga acap kali melahirkan kesimpulan yang memberikan masukan kepada pemerintah setempat dalam mengambil sebuah kebijakan pelestarian warisan budaya di Ternate.



Bacarita Pusaka
Masjid-Masjid Tua di Ternate

Gambar 2. Kode QR video Bacarita Pusaka Ternate di Masjid Kesultanan Ternate
(Silakan dipindai)

Sedangkan Jelajah Pusaka Ternate merupakan kegiatan jalan-jalan menyusuri tempat bersejarah sambil membahas materi yang disampaikan oleh narasumber. Kegiatan Jelajah Pusaka Ternate merupakan kegiatan belajar bersama dengan cara mengunjungi dan menyusuri sudut-sudut kota, pesisir pantai hingga sisi jalan yang bersejarah di Ternate. Kegiatan ini dibuka untuk umum dengan pembatasan peserta 25-30 orang untuk menjaga kenyamanan dan kualitas interaksi. Kegiatan yang selalu dilaksanakan di akhir pekan ini dipublikasikan melalui akun *Instagram @ternateheritage*. Jelajah Pusaka Ternate merupakan kegiatan yang ditunggu oleh beberapa masyarakat Ternate ditandai dengan respon yang positif oleh warganet ketika kegiatan ini dipublikasikan di media sosial dan selalu diikuti dengan antusias oleh pesertanya.

Kegiatan seperti ini memang sudah lebih dahulu diterapkan di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, Malang, Surakarta, Yogyakarta dan kota lainnya. Akan tetapi menurut Ko Molid, ada yang membuat Jelajah Pusaka Ternate berbeda dari kegiatan jelajah lainnya. Menurutnya, kota besar lain sudah sangat sering mengadakan kegiatan sejenis ini, namun ikatan emosional belum tentu terjalin dengan baik. Jelajah Pusaka Ternate yang digarap oleh *THS* memberikan ruang besar bagi para peserta untuk bercerita sesuai versi yang diketahuinya, sehingga membuat interaksi lebih hidup. Hal tersebut juga sesuai dengan budaya di wilayah Indonesia Timur di mana budaya tutur lebih kental dan masyarakat Ternate pada khususnya sangat suka bercerita.

Saling berbagi cerita sesuai versi dan pengetahuan setiap peserta memberikan sudut pandang yang baru dan memperkaya pengetahuan masyarakat awam dalam memahami nilai penting dan sejarah warisan budaya di sekitar mereka. Banyak peserta yang baru sadar dan tersadarkan bahwa lokasi-lokasi yang sering mereka lewati, benda-benda yang biasa mereka lihat, dan perilaku yang kerap dikerjakan sehari-hari memiliki sejuta cerita dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari budaya yang luhur warisan nenek moyang. Pembelajaran warisan budaya langsung di lokasi bersejarah dan saling bertukar cerita seperti ini mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah dan ruang perkuliahan, membahas tentang kebudayaan pada pembelajaran formal biasanya terkesan sangat kaku dan dirasa membosankan. *Ternate Heritage Society* dengan kegiatan Jelajah Pusaka Ternate mencoba mengedukasi tentang pentingnya pelestarian warisan budaya kepada masyarakat luas melalui pembelajaran non-formal yang lebih ringan dan santai namun berkesan sehingga apa yang disampaikan bisa membekas di dalam benak dan hati para pesertanya.

Hingga saat ini, terdapat 7 (tujuh) seri kegiatan Jelajah Pusaka Ternate yang digelar di setiap tahunnya. Berikut adalah seri jelajah yang rutin diselenggarakan :

1. Jelajah Ibukota Kesultanan Ternate (*Soa Sio*)
Ikon dari Kota Ternate tidak lain adalah Kesultanan itu sendiri. Dalam seri ini, peserta dapat menikmati berbagai peninggalan arsitektur di kawasan *Soa Sio* mulai dari Bolulu Madehe hingga bangunan-bangunan lain yang terkait dengan Kedaton.
2. Jelajah Kampung Makassar-Malayo
Dimulai dari Kadato Ici (Kedaton Kecil) dengan cerita menarik yang tersimpan di dalamnya, menyusuri sejarah di Kampung Makassar hingga berakhir di Malayo (Benteng Oranje).
3. Jelajah Kampung Cina dan Kampung Tengah
Jelajah Kampung Cina biasanya diselenggarakan bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Berjalan menyusuri bangunan-bangunan kuno seperti Bioskop Benteng, Rumah Kapita Arab, Kampung Palembang dan berakhir di klinteng untuk mendengarkan cerita dari para saudara yang sedang merayakan Imlek.
4. Jelajah Pusaka Falajawa
Kelebihan dari jelajah ini adalah peserta bisa menikmati arsitektur khas fala kanci dan rumah indis. Peserta diajak menikmati proses pembuatan kue yang memang dikenal sebagai andalan di Falajawa. Namun tidak hanya pembuatannya saja, peserta dapat berburu takjil dengan bebas di “pasar kaget” yang menjual panganan khas, tentunya hal ini hanya ada di bulan puasa saja.
5. Jelajah Residen
Dimulai dari kawasan Gamalama, yang tidak jauh dari Falajawa. Jelajah ini melihat bagaimana kondisi bangunan-bangunan yang dulu pernah digunakan sebagai kantor residen pemerintah kolonial Hindia Belanda, Gereja Batu yang dibangun oleh orang Belanda, serta menyambangi bekas kediaman Sultan Tidore dan berakhir di Pelabuhan Residen.
6. Jelajah Tongole
Diadakan sewaktu-waktu tergantung pihak *Cengkeh Afo and Gamalama Spices (CAGS)* tentunya sebagai pengelola kawasan tersebut. Kegiatan ini memiliki konsep menjelajahi perkebunan cengkeh, pala dan kayu manis, Air Tege-Tege dan juga jejak cengkeh tertua di dunia yang dinamai Cengkeh Afo.
7. Jelajah Foradiahi – Kastela
Jelajah edisi khusus yang hanya dijalankan di akhir tahun sekaligus merayakan Hari Jadi Kota Ternate (HJT). Jelajah ini akan membawa peserta menuju awal sejarah Kesultanan Ternate dan kedatangan Bangsa Eropa, diawali dengan penuh perjuangan mengunjungi makam Pahlawan Nasional Sultan Babullah yang terletak di ketinggian Kampung Foradiahi dan menyusuri sisa kawasan Benteng Kastela (*Nostra Senora del Rosario*) yang dibangun oleh Portugis.





Foto 1. Kegiatan Jelajah Pusaka Ternate di Berbagai Seri
(Sumber: Ternate Heritage Society, 2019)

Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, *Ternate Heritage Society* menyelenggarakan kegiatan baru berupa Festival Pusaka Ternate. Kegiatan ini merupakan upaya pengenalan warisan budaya Ternate dengan mengusung konsep pertunjukan seni dan budaya yang digelar di tempat bersejarah seperti Benteng Oranje dan Benteng Kalamata. Dalam festival ini tak hanya pertunjukan seni dan budaya saja yang ditonjolkan namun juga dilaksanakan pameran foto, pemutaran film karya sineas lokal di Maluku Utara, serta lomba menggambar bersama anak-anak. Semua kegiatan tersebut dikemas dengan menarik dan tetap mengusung tema pelestarian warisan budaya di Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Sayangnya, kegiatan Festival Pusaka Ternate belum bisa diselenggarakan kembali karena terkendala oleh pandemi *Covid-19*.





Foto 2. Lomba menggambar anak-anak dan pertunjukan seni budaya pada Festival Pusaka Ternate (Sumber : Ternate Heritage Society, 2017)

Sejak munculnya pandemi Covid-19 memang Ternate Heritage Society sempat hiatus sejenak karena kegiatan yang diselenggarakan masih dibatasi dengan alasan penanggulangan penyebaran Virus Corona. Di awal munculnya Covid-19 di Indonesia seluruh kegiatan dilarang mengumpulkan banyak orang dan diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan segala keterbatasan dalam melakukan kegiatan saat itu, Ternate Heritage Society mencoba mendobrak kebiasaan di mana kegiatan yang selama ini dilakukan di lokasi-lokasi bersejarah dipindahkan ke dunia maya. Memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media sosial, akhirnya teretuslah ide kegiatan melalui siaran *live Instagram* yang lebih mudah diakses dan santai penyampiannya dari teman-teman relawan THS yang berada di luar negeri yang juga terdampak pandemi ini. **“Habar Dokasa” adalah suatu kegiatan virtual Ternate Heritage Society di masa pandemi yang mengangkat isu pandemi Covid-19 secara global.** Sejatinya, kegiatan yang sudah berjalan 4 episode ini memang tidak membahas hal-hal yang berbau “Heritage” namun lebih mencoba untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terhadap penyebaran Virus Corona baik di dalam maupun di luar negeri yang saat itu lebih penting daripada hanya sekadar berbicara tentang pelestarian cagar budaya.



Foto 3. Poster Habar Dokasa Seri-3, bincang santai melalui *live Instagram* untuk meningkatkan kewaspadaan saat pandemi Covid-19 (Sumber : Ternate Heritage Society, 2020)

Setelah Habar Dokasa dan kondisi yang membaik, *Ternate Heritage Society* kembali membuat kegiatan *virtual* lain tentang warisan budaya yang ada di Ternate. Bekerja sama dengan Pokja Lanskap Budaya, kegiatan tur *virtual* diselenggarakan di kawasan Cengkeh Afo, pohon cengkeh tertua di Ternate. Kemudian *Ternate Heritage Society* yang berkolaborasi dengan komunitas Saya Pejalan Bijak dan *National Geographic* menyelenggarakan tur *virtual* yang berjudul “Avotur Daring, Ron Kampung Cina Ternate dan Sekitarnya”. Kegiatan *virtual* tersebut dianggap sukses dan dapat menjadi solusi dalam pembelajaran warisan budaya di Ternate di masa pandemi. Walaupun kondisi pandemi seperti saat ini, semangat untuk memberikan edukasi warisan budaya kepada masyarakat tidak boleh redup agar warisan budaya yang ada dapat terus dilestarikan kepada generasi penerusnya.



Foto 4. Poster *Avotur Daring*, kerjasama THS dengan *National Geographic* dan Komunitas Saya Pejalan Bijak (Sumber: *Ternate Heritage Society*, 2021)

Kemunculan *Ternate Heritage Society* dalam upaya pengenalan dan memberikan pemahaman terhadap nilai penting dan sejarah sebuah warisan budaya kepada masyarakat luas terutama generasi muda merupakan salah satu bentuk partisipasi untuk melestarikan warisan budaya di Ternate baik *tangible* maupun *intangible*. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum (2011) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) bentuk partisipasi masyarakat, yakni: 1. partisipasi dalam pengambilan keputusan, merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan; 2. partisipasi dalam pelaksanaan, merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwujud kontribusi; 3. partisipasi dalam kemanfaatan, merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat; 4. keikutsertaan dalam evaluasi, merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan yang telah dilakukan oleh *Ternate Heritage Society* merupakan salah satu partisipasi dalam bentuk kemanfaatan di mana keberadaan *Ternate Heritage Society* memberikan manfaat positif bagi warisan budaya itu sendiri dan masyarakat secara luas. *Ternate Heritage Society* hadir membawa sebuah seruan serta ajakan untuk melestarikan warisan budaya melalui berbagai kegiatannya dengan cara mereka sendiri untuk disebarluaskan kepada masyarakat awam. Hal ini juga mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, terbukti bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh *Ternate Heritage Society* selalu diikuti dengan antusias oleh pesertanya dan kegiatannya selalu dinanti oleh masyarakat.

Bentuk partisipasi lain yang dilakukan oleh *Ternate Heritage Society* ialah turut serta dalam pendaftaran benda-benda bersejarah sebagai Cagar Budaya pada sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dan *Ternate Heritage Society* menjadi salah satu komunitas di Ternate yang memiliki akun resmi dalam sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Hal tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata dengan berperan aktif dalam upaya penetapan Cagar Budaya sebagai program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dengan keterlibatan ini menunjukkan bahwa *Ternate Heritage Society* juga berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan memberikan kontribusinya pada program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Melihat apa yang dilakukan oleh *Ternate Heritage Society* memang tidak bisa dikesampingkan begitu saja, tidak banyak komunitas di Ternate yang peduli terhadap pelestarian cagar budaya secara konsisten. Pada beberapa kesempatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Maluku Utara sebagai instansi yang bertanggung jawab akan pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya, menggandeng *Ternate Heritage Society* sebagai mitra dalam pelestarian. Sebagai mitra pemerintah, *Ternate Heritage Society* memberikan kontribusinya untuk menjalin kerjasama yang baik dan memberikan masukan yang bisa dilakukan BPCB Maluku Utara dalam sebuah pelestarian cagar budaya di Ternate. Oleh karenanya, pada tahun 2017 yang bertepatan dengan peringatan Hari Purbakala, komunitas ini mendapatkan penghargaan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara sebagai apresiasi atas sumbangsuhnya dalam pelestarian cagar budaya di Ternate.



Pemberian Penghargaan

Gambar 4. Kode QR upacara perayaan Hari Purbakala serta pemberian penghargaan kepada juru pelihara dan komunitas THS (Silakan dipindai)

Pengelolaan cagar budaya berbasis komunitas dengan memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata yang berwawasan pelestarian khususnya di Kota Ternate perlu untuk lebih ditingkatkan. Satu hal yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengelolaan cagar budaya adalah bentuk pemanfaatan yang berwawasan pelestarian, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif agar mereka pun memperoleh manfaatnya (Mulyadi, 2014). Dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian cagar budaya di sekitarnya. Selain itu, pemerintah harus memberikan dukungan penuh baik dukungan teknis maupun non-teknis agar semangat melestarikan warisan budaya seperti yang dilakukan oleh *Ternate Heritage Society* dengan "aksi sosial"-nya dapat ditumbuh kembangkan di berbagai daerah lain terutama di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pelestarian cagar budaya yang dilakukan tidak akan mencapai tujuan utama seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jika tidak dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masyarakat perlu dilibatkan agar pelestarian cagar budaya berdampak positif. Pelestarian cagar budaya dengan adanya partisipasi masyarakat lebih efektif dalam

menjaga kelestarian cagar budaya tersebut dibandingkan hanya sebatas penetapan peraturan perlindungan saja (Wirastari dan Supriharjo, 2012). Selain itu, upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan cagar budaya, sehingga masyarakat lah nanti yang akan lebih berperan, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian (Wibowo, 2014).

Penutup

Pelestarian cagar budaya memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja namun harus diikuti oleh peran serta masyarakat dalam upaya menjaga dan mewariskannya kepada generasi penerus. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya merupakan bentuk kesadaran bersama tentang pentingnya keberadaan cagar budaya sebagai kekayaan budaya Indonesia yang memiliki nilai penting dan sejarah untuk memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Indonesia. Pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata yang berwawasan pelestarian dengan pengelolaan cagar budaya berbasis komunitas di mana masyarakat sebagai aktor utamanya, diharapkan dapat menciptakan iklim pelestarian cagar budaya yang mandiri karena dalam pengelolaan tersebut mendorong masyarakat untuk merencanakan upaya pelestarian dan melaksanakan rencananya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi secara mandiri sesuai kapasitasnya dengan tetap mengutamakan kelestarian cagar budaya.

Melalui komunitas *Ternate Heritage Society* dengan berbagai kegiatannya yang terencana dan terorganisir merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang berperan dalam penyebaran nilai penting dan sejarah cagar budaya di Kota Ternate. Usahanya dalam mengedukasi dan menanamkan kesadaran masyarakat umum terutama generasi muda tentang pelestarian warisan budaya dirasa sangat efektif dan efisien. Dengan metode belajar bersama yang dikemas secara santai dan menarik mampu menghilangkan rasa canggung selama kegiatan yang diselenggarakan karena semua orang memiliki tujuan mulia yakni sama-sama belajar mengenai warisan budaya yang ada di Ternate, selain itu juga dapat menghapus anggapan bahwa belajar tentang kebudayaan merupakan hal yang membosankan. Metode tersebut terbukti ampuh dalam menarik perhatian masyarakat terutama kaum muda Ternate yang selama ini jarang mendapatkan pembelajaran tentang warisan budaya yang mereka inginkan dari pendidikan formal. Banyak orang setelah mengikuti kegiatan yang digelar oleh *Ternate Heritage Society* kembali diingatkan tentang betapa kayanya warisan budaya yang mereka miliki yang sangat disayangkan jika kekayaan tersebut hilang ditelan jaman.

Menanamkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan cagar budaya agar bisa dinikmati manfaatnya di kemudian hari memang bukan perkara yang mudah, namun dengan upaya yang dilakukan secara terus-menerus serta menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan sasaran maka akan sangat membantu dalam meminimalisir masalah yang dihadapi. Melihat semangat *Ternate Heritage Society* dalam melestarikan warisan budaya di Ternate melalui edukasi dan penyebaran nilai-nilai penting dan sejarah cagar budaya di Ternate, besar harapan bahwa masyarakat Ternate akan sadar dan ikut menjaga serta melestarikan kebudayaan yang mereka miliki, karena hanya dengan itu ketahanan budaya akan terwujud dan masyarakat Bangsa Indonesia tidak kehilangan karakter dan jati dirinya di tengah gempuran budaya-budaya populer saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Juniadi. (2020). Analisis Peran Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 187 – 191.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryono, Timbul. (2009). *The Role of Heritage Tourism in Community Planning and Development*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mulyadi, Yadi. (2011). *Optimalisasi Peran Komunitas dalam Pengelolaan Cagar Budaya Kompleks Benteng Otanaha di Gorontalo*. https://www.academia.edu/2923535/Optimalisasi_Peran_Komunitas_dalam_Pengelolaan_Cagar_Budaya_Kompleks_Benteng_Otanaha_di_Gorontalo, diakses pada 2 Mei 2021.
- Mulyadi, Yadi. (2014). *Pemanfaatan Cagar Budaya dalam Perspektif Akademik dan peraturan perundangan*. https://www.academia.edu/8128325/Pemanfaatan_Cagar_Budaya_dalam_Perspektif_Akademik_dan_peraturan_perundangan, diakses pada 29 April 2021.
- Mulyadi, Yadi. (2019). *Paradigma Pelestarian Cagar Budaya*. <https://www.kompasiana.com/rumaharkeologi/5ccfafdb95760e7b70179012/paradigma-pelestarian-cagar-budaya?page=2>, diakses pada 4 Mei 2021.
- Purbasari, Riris. (2018). Strategi Pengelolaan Warisan Budaya Berbasis Peran Masyarakat di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. *Jurnal Planologi*, 15(2), 115 – 133.
- Sulistyanto, Bambang. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pertanggungjawaban Sosial Arkeolog*. <https://hurahura.wordpress.com/2011/07/06/pemberdayaan-masyarakat-sebagai-pertanggungjawaban-sosial-arkeolog/>, diakses pada 4 Mei 2021.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Wibowo, Agus Adi. (2014). Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat: Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, 8(1), 58 – 71.
- Winarni, Fajar. (2018). Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya. *Mimbar Hukum*, 30 (1), 96 – 108.
- Wirastari, Volare Amanda dan Supriharho, Rimadewi. (2012). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya). *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), 63 – 67.

TINGGALAN *PILLBOX* JEPANG DI KOTA KENDARI: TINJAUAN NILAI PENTING SUMBERDAYA ARKEOLOGI

Amaluddin Sope

Mahasiswa Magister Arkeologi Universitas Gadjah Mada

amaluddin.sope@mail.ugm.ac.id

“Pillbox adalah salah satu bukti eksistensi Jepang pada masa Perang Pasifik yang masih dapat disaksikan di Kota Kendari. Namun, pesatnya perkembangan pemukiman dan kota, ternyata memiliki banyak persoalan dalam hal penghancuran, pengrusakan, pemindahan dan sebagainya. Persoalan tersebut menjadi ancaman keberadaan sumberdaya arkeologi saat ini maupun kedepannya”

Pendahuluan

Sangat disesalkan banyak sumber daya arkeologi¹ baik itu tinggalan kolonialisme Belanda atau Jepang yang memiliki nilai penting dihancurkan karena berbagai alasan yang tidak rasional. Hal ini menjadi kontroversi, sebab sumberdaya arkeologi tersebut sering dianggap sebagai bukti kelam sejarah masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal tinggalan tersebut merupakan aset yang memberi karakter budaya yang khas bagi daerah. Kejadian di masa lalu berupa penjajahan yang dialami masyarakat Indonesia baik itu Belanda maupun Jepang telah menambah keragaman budaya di masing-masing daerah di Indonesia melalui sejarah dan tinggalannya yang masih dapat kita jumpai saat ini.

Kota Kendari memiliki beragam jejak peristiwa, salah satunya masa pendudukan Jepang yang masih dapat disaksikan saat ini. Keberadaan tinggalan Jepang di Kota Kendari menjadi saksi bisu berbagai peristiwa yang pernah dialami masyarakat Kota Kendari yang hidup di zamannya. Tinggalan-tinggalan Jepang yang tersebar di Kota Kendari merefleksikan posisi Kendari yang strategis bagi pihak Jepang dalam masa pendudukannya di Indonesia saat pecahnya Perang Pasifik. Oleh sebab itu, tinggalan tersebut mempunyai nilai yang terkandung didalamnya. Keberadaan suatu sumberdaya arkeologi yang masih tetap bertahan di tengah pesatnya perkembangan kota akan menambah nilai-nilai yang terkandung didalamnya, misalnya nilai sejarah dan arsitekturnya.

Tinggalan Jepang tersebut bila ditinjau dari status hukum yang berlaku, baru ada 1 (satu) yang mendapatkan status sebagai Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari, nomor 148 tahun 2021, yaitu Baterai Mata. Namun, tulisan ini tidak menguraikan tinggalan tersebut hanya fokus pada *pillbox* hasil tinggalan pendudukan Jepang dan tinjauan terhadap nilai penting yang melekat untuk arah pengelolaan kedepannya.

Kondisi terkini memperlihatkan dengan jelas banyak sumberdaya arkeologi berupa tinggalan sisa eksistensi Jepang di Kota Kendari yang mengalami penghancuran,

¹ Istilah sumberdaya arkeologi (*Achaeological Resource*) dalam penerapannya hanya mencakup situs, fakta-fakta fisik yang mencakup lansekap dari masyarakat masa lampau, serta semua fakta fisik perilaku manusia masa lampau yang dapat digunakan untuk merekonstruksi cara-cara hidup masyarakat masa lampau (Carman, 2002).

pengrusakan, pemindahan dari posisi semula akibat perkembangan pemukiman dan fisik Kota Kendari. Selain itu, keadaan ini dipersulit dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap tinggalan tersebut yang dinilai masih kurang. Oleh karena itu, untuk arah kedepannya dalam rangka mengaktualkan kembali sumberdaya arkeologi tersebut di masa kini, maka perlu diadakannya peninjauan nilai penting yang melekat sebagai langkah awal yang strategis demi tercapainya pengelolaan yang baik dan benar, sehingga upaya pelestarian dapat dilakukan begitupun dengan pemanfaatan sumberdaya arkeologi untuk kesejahteraan masyarakat.

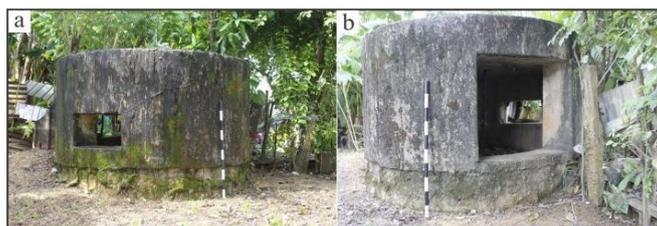
Tinjauan nilai penting yang melekat pada sumberdaya arkeologi menarik untuk dibahas, karena nilai adalah alasan terbesar dibalik adanya pengelolaan, baik itu pelestarian untuk mempertahankan keberadaannya dan pemanfaatan untuk memperkuat eksistensinya. Pada dasarnya benda-benda arkeologis memiliki nilai penting yang tinggi untuk menambah pengetahuan melalui penelitian, membangkitkan kreativitas seni, media pendidikan, tujuan wisata, membangun solidaritas, ataupun dalam menjaga stabilitas dan ketahanan budaya (Darvill, 1987). Selain itu, karena sumberdaya arkeologi dalam hal ini tinggalan Jepang di Kota Kendari yang tidak berasal dari masa kini, maka sudah tentu memiliki sifat tidak diperbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), mudah rapuh dan spesifik.

Sumberdaya yang terbatas (*finite*) dengan pengertian bahwa sumberdaya arkeologi memiliki jumlah tertentu dan memiliki batas kemampuan bertahan (*survival condition*) hingga sekarang. Sebagai sumberdaya yang tak diperbaharui (*non-renewable*) dengan pengertian bahwa sumberdaya arkeologi seperti artefak, fitur dan struktur memiliki keterbatasan dalam keragaman jumlah dan jenis serta mutunya. Selain hal tersebut, ada pula sumberdaya arkeologi yang mudah rapuh (*fragile*) karena akan mengalami kemerosotan atau penurunan dalam mutu karena aus akibat perkembangan masa (Suhartono, 2008).

PILLBOX KECAMATAN BARUGA

Pillbox Lepo-Lepo I

Letak astronomis 04°01'18,4" LS dan 122°30'06" BT. Kondisi bangunan *pillbox* utuh, ditumbuhi lumut pada bagian dinding dan ruangan dijadikan tempat pembuangan sampah.



Gambar 1. (a) Lubang bidik dan (b) pintu masuk
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 1. Ukuran Pillbox Lepo-Lepo I

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik			
	Luar	Dalam	Luar 1	Dalam	Luar 2	Dalam
Lebar	77 cm	70 cm	60 cm	40 cm	96 cm	74 cm
Tinggi	80 cm		35 cm		36 cm	

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Lepo-Lepo II

Letak astronomis $04^{\circ}01'20,4''$ LS dan $122^{\circ}30'1,5''$ BT. Kondisi bangunan masih utuh, namun ruangan *pillbox* dijadikan sebagai tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Terdapat jejak *vandalisme* pada dinding bagian luar.



Gambar 2. (a) Lubang bidik dan (b) atap
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 2. Ukuran Pillbox Lepo-Lepo II

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik			
	Luar	Dalam	1		2	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	90 cm	68 cm	100 cm	78 cm	100 cm	80 cm
Tinggi	80 cm	-	35 cm	-	35 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Lepo-Lepo III

Letak astronomis $04^{\circ}01' 24,6''$ LS dan $122^{\circ} 29'53,4''$ BT. Kondisi *pillbox* terbengkalai, sebagian badan *pillbox* tertimbun oleh tanah sehingga hampir menutupi lubang bidik dan pintu masuk. Terdapat pagar beton yang dibangun tepat di atas *pillbox* sehingga memisahkan lokasi antara pintu masuk dan lubang bidik.



Gambar 3. (a) Bagian pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 3. Ukuran Pillbox Lepo-Lepo III

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik			
	Luar	Dalam	1		2	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	90 cm	-	70 cm	-	50 cm	-
Tinggi	30 cm	-	12 cm	-	12 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Lepo-Lepo IV

Letak astronomis $04^{\circ} 01' 22,6''$ LS dan $122^{\circ} 30' 10,5''$ BT. Kondisi *pillbox* masih utuh, namun posisi *pillbox* telah terjatuh dengan pintu masuk mengarah ke atas. Bagian ruangan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Posisi bangunan yang terjatuh memperlihatkan bagian pondasi *pillbox* dengan ukuran tinggi 35 cm.



Gambar 4. (a) Bagian ruangan dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 4. Ukuran Pillbox Lepo-Lepo IV

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik 1	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	90 cm	70 cm	58 cm	42 cm
Tinggi	79 cm	-	37 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Lepo-Lepo V

Letak astronomis $04^{\circ}01'38,7''$ LS dan $122^{\circ}29'59,4''$ BT. Kondisi *pillbox* telah terbalik dengan posisi badan *pillbox* miring ke arah selatan. Hampir keseluruhan badan *pillbox* tertimbun oleh tanah dengan tumpukan sampah. Pintu masuk tertutupi oleh tanah dan sampah menyisakan dua lubang bidik yang muncul di permukaan tanah.



Gambar 5. (a) Bagian ruangan dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 5. Ukuran Pillbox Lepo-Lepo V

Dimensi	Lubang Bidik			
	1		2	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	100 cm	75	74 cm	55 cm
Tinggi	35 cm	-	35 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Lepo-Lepo VI

Letak astronomis $04^{\circ}1' 39,7''$ LS dan $122^{\circ}30'2,3''$ BT. Kondisi *pillbox* ini tidak terawat, terjadi kerusakan pada bagian pintu masuk sehingga terlihat tulang besi *pillbox*. Pada bagian ruangan terdapat material bekas bangunan dan sampah.



Gambar 6. (a) Bagian pintu masuk (a) dan lubang bidik (Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 6. Ukuran Pillbox Lepo-Lepo VI

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik					
	Luar	Dalam	1		2		3	
Lebar	90 cm	70 cm	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Tinggi	88 cm	-	60 cm	37 cm	60 cm	37 cm	60 cm	37 cm
			35 cm	-	40 cm	-	25 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Wanggu

Letak astronomis $04^{\circ}01'15,84''$ LS dan $122^{\circ}30'35,54''$ BT. Kondisi *pillbox* permukaan dinding, atap *pillbox* ditumbuhi lumut dan akar pohon beringin yang masuk ke dalam ruangan *pillbox* melalui lubang ventilasi dan lubang bidik.



Gambar 7. (a) Kondisi pintu masuk dan (b) lubang bidik (Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 7. Ukuran Pillbox Wanggu

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik					
			1		2		3	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	77 cm	58 cm	81 cm	58 cm	82 cm	60 cm	90 cm	70 cm
Tinggi	62 cm	-	36 cm	-	27 cm	-	26 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

PILLBOX KECAMATAN KADIA KOTA KENDARI

Pillbox Ahmad Yani I

Letak astronomis 03°59' 13,5" LS dan 122°30'29,8" BT. Kondisi sebagian badan *pillbox* tertimbun tanah sehingga tidak memungkinkan untuk memasuki ruangan *pillbox*. Permukaan dinding dan atap bagian luar *pillbox* ditumbuhi lumut. Terjadi pengelupasan semen pada bagian atap *pillbox*. Pada bagian ruangan *pillbox* terdapat tumpukan sampah.



Gambar 8. (a) Kondisi lubang bidik dan (b) atap
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 8. Ukuran Pillbox Ahmad Yani I

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik			
	Luar	Dalam	1		2	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	90 cm	74 cm	60 cm	40 cm	60 cm	40 cm
Tinggi	36 cm	-	8 cm	-	6 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Ahmad Yani II

Letak astronomis 03°59' 13,5" LS dan 122°30'29,8" BT. Kondisi sebagian badan *pillbox* bersatu dengan struktur trotoar jalan. Ruangan *pillbox* terisi oleh material tanah dan sampah, sehingga pintu masuk dan lubang bidik tertutup. Pada dinding dan atap *pillbox* terjadi pengelupasan semen. Terdapat *vandalisme* berupa tempelan stiker pamflet di dinding *pillbox*.



Gambar 9. (a) Bagian pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 9. Ukuran Pillbox Ahmad Yani II

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang bidik					
	Luar	Dalam	1		2		3	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	86 m	70 cm	60 cm	40 cm	60 cm	40 cm	-	-
Tinggi	42 cm	-	28 cm	-	21 cm	-	-	-

(Sumber: Penulis, 2020)

PILLBOX KECAMATAN MANDONGA

Pillbox Made Sabara

Letak astronomis 03°58'22,90" LS dan 122°31'1,09" BT. Kondisi *pillbox* telah mengalami kerusakan dan penghancuran di dinding dan bagian atap. Terdapat retakan pada dinding mulai dari pintu masuk hingga lubang bidik 1. Dinding pada bagian bawah lubang bidik satu dan dua mengalami kerusakan parah. Terdapat tumpukan material sampah di atap dan didalam ruangan *pillbox*.



Gambar 10. (a) Pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 10. Ukuran Pillbox Made Sabara

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik			
	Luar	Dalam	1		2	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	90 cm	70 cm	60 cm	37 cm	60 cm	37 cm
Tinggi	80 cm	-	30 cm	-	30 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Malik Raya

Letak astronomis 03°58'15,72" LS dan 122°31'06,55" BT. Kondisi sebagian badan *pillbox* tertutupi oleh susunan *paving block* hingga hampir menutupi keseluruhan lubang bidik. Terjadi pengelupasan lapisan semen pada dinding dan atap. Ruangannya *pillbox* dipenuhi oleh sampah.



Gambar 11. (a) bagian pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 11. Ukuran Pillbox Malik Raya

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik			
	Luar	Dalam	1		2	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	80 cm	70 cm	42 cm	33 cm	45 cm	42 cm
Tinggi	75 cm	-	30 cm	-	33 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

PILLBOX KECAMATAN KENDARI

Pillbox Kampung Salo

Letak astronomis $03^{\circ}58'06,18''$ LS dan $122^{\circ}35'23.32''$ BT. Posisi badan *pillbox* miring ke arah barat daya, sehingga bagian badan hingga bagian atap tertimbun tanah. Terdapat material besi bekas jembatan yang menutupi pintu masuk. Adanya pengelupasan lapisan semen pada bagian pintu sehingga terlihat besi cetakan pintu dan sedikit pengelupasan pada bagian atap.



Gambar 12. (a) Lubang bidik dan (b) atap
(Sumber: Dok, Penulis, 2019)

Tabel 12. Ukuran Pillbox Kampung Salo

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	74 cm	-	57 cm	30 cm
Tinggi	60 cm	-	30 cm	-
Tebal	28 cm	-	30 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Yos Sudarso

Letak astronomis $03^{\circ}58'33,89''$ LS dan $122^{\circ}35'33.98''$ BT. Keletakan *pillbox* telah berpindah dari posisi awal. Menurut masyarakat *pillbox* ini telah bergeser sekitar 18 m dikarenakan *pillbox* terjatuh di badan jalan. Kemudian, bangunan *pillbox* digeser masyarakat ke lahan kosong milik warga agar tidak menutupi badan jalan. Pada bagian pintu bagian atas telah dihancurkan hingga bagian atap. Terdapat tumpukan sampah dan material bekas bangunan di dalam ruangan *pillbox*.



Gambar 13. Kondisi *Pillbox* Yos Sudarso
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

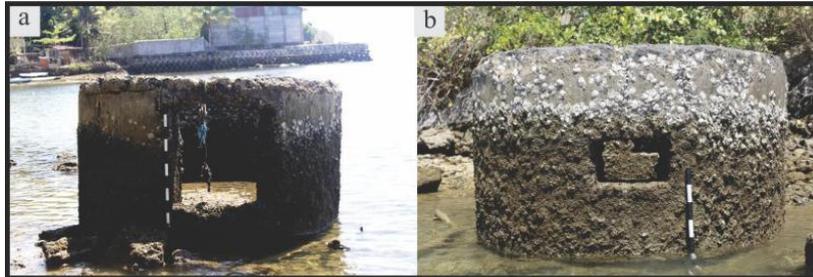
Tabel 13. Ukuran Pillbox Yos Sudarso

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik			
			1		2	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	80 cm	70 cm	42 cm	33 cm	45 cm	42 cm
Tinggi	75 cm	-	30 cm	-	33 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Kasilampe

Letak astronomis $03^{\circ}58'17,18''$ LS dan $122^{\circ}36'14.43''$ BT. Kondisi *pillbox* terbengkalai, keletakan *pillbox* telah berubah dari posisi awalnya, terbalik karena jatuh dari atas tebing. Akibat terjatuh posisi *pillbox* terbalik sehingga bagian landasan *pillbox* mengarah ke atas. Sebagian badan *pillbox* terendam air laut saat terjadi pasang dan terdapat tiram yang menempel pada dinding luar dan dalam *pillbox*.



Gambar 14. (a) Pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 14. Ukuran Pillbox Kasilampe

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik					
			Lubang Bidik 1		Lubang Bidik 2		Lubang Bidik 3	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	86 cm	67 cm	39 cm	36 cm	38 cm	36 cm	45 cm	36 cm
Tinggi	80 cm	-	28 cm	-	26 cm	-	27 cm	-

(Sumber: Penulis, 2020)

PILLBOX KECAMATAN ABELI

Pillbox Poasia I

Letak astronomis $03^{\circ}58'46,72''$ LS, dan $122^{\circ}35'31.60''$ BT. Kondisi sebagian badan *pillbox* tertimbun oleh tanah, namun ruangan *pillbox* masih dapat dimasuki. Terdapat pengelupasan semen pada permukaan dinding dalam bagian bawah. Atap luar tampak tampak sedikit cembung ke atas dan terdapat besi pada sisi atap dengan jumlah 10 buah.



Gambar 15. (a) Pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 15. Ukuran Pillbox Poasia I

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik							
			1		2		3		4	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	91 cm	64 cm	88 cm	58 cm	55 cm	35 cm	55 cm	35 cm	55 cm	36 cm
Tinggi	75 cm		27 cm							

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Poasia II

Letak astronomis 03°58'44'77'' LS dan 122°35'23,12'' BT. *Pillbox* ini berada di perkebunan milik warga saat ini. Bagian ruangan *pillbox* dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Posisi *pillbox* telah terjatuh sehingga posisi lantai mengarah ke atas akibat terjatuh dari tebing dengan ketinggian tebing sekitar 6 m.



Gambar 16. (a) Lubang bidik dan (b) Ruangan
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

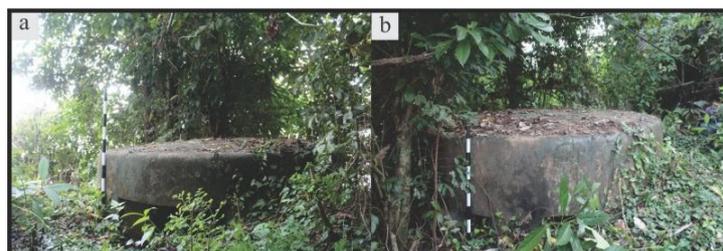
Tabel 16. Ukuran Pillbox Poasia II

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik							
			1		2		3		4	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	92 cm	60 cm	57 cm	38 cm	57 cm	38 cm	57 cm	38 cm	57 cm	38 cm
Tinggi	60 cm		29 cm							

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Poasia III

Letak astronomis 03°58'45'61'' LS dan 122°35'21,87'' BT. Kondisi *pillbox* masih dapat dimasuki, namun sebagian badan *pillbox* tertimbun tanah hingga di bawah lubang bidik. Dinding luar banyak ditumbuhi lumut dan rumput merambat. Pada bagian tengah atap terdapat empat lubang ventilasi dengan ukuran diameter 6 cm.



Gambar 17. (a) Pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 17. Ukuran Pillbox Poasia III

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik							
			1		2		3		4	
	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	99 cm	60 cm	58 cm	37 cm	58 cm	37 cm	57 cm	38 cm	57 cm	38 cm
Tinggi	47		27							

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Poasia IV

Letak astronomis 03°58'50'27''LS dan 122°35'32,13'' BT. Kondisi *pillbox* tampak utuh, sebagian badan *pillbox* tertimbun tanah dan struktur bangunan milik warga sehingga menutupi lubang bidik 1 dan 2. Permukaan dinding *pillbox* ditumbuhi lumut dan tumbuhan rumput liar. Terdapat pengelupasan semen pada pintu masuk bagian luar.



Gambar 18. (a) Kondisi pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 18. Ukuran Pillbox Poasia IV

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik							
	Luar	Dalam	1		2		3		4	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	80 cm	60 cm	56 cm	40 cm	56 cm	40 cm	56 cm	40 cm	56 cm	40 cm
Tinggi	62 cm		35 cm		35 cm		36 cm		35 cm	

(Sumber: Penulis, 2020)

PILLBOX KECAMATAN NAMBO

Pillbox Nambo I

Letak astronomis 04°00'17'86 LS dan 122°37'51,52'' BT. Kondisi *pillbox* masih dapat dimasuki, namun sebagian badan tertimbun tanah hingga hampir menutupi lubang bidik. Dinding dan atap banyak ditumbuhi lumut dan semak belukar. Lubang bidik satu tertutup tumpukan kayu dan lubang bidik dua yang ditutupi gundukan tanah sehingga lubang bidik tidak dapat teramati dari arah luar.



Gambar 19. (a) Kondisi pintu masuk dan (b) sisi Kanan *pillbox*
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 19. Ukuran Pillbox Nambo I

Dimensi	Pintu Masuk		Lubang Bidik			
	Luar	Dalam	1		2	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	87 cm	-	125 cm	40 cm	120 cm	40 cm
Tinggi	140 cm	-	-	10 cm	-	10 cm
Tebal	39 cm	-	80 cm	-	-	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Nambo II

Letak astronomis 04°00'12.48'' LS dan 122°38'32,08'' BT. Kondisi *pillbox* masih utuh, namun permukaan dinding dan atap *pillbox* ditumbuhi lumut dan rumput liar. Permukaan dinding luar dan dalam tidak dihaluskan.



Gambar 20. (a) Pintu masuk dan (b) lubang intai
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

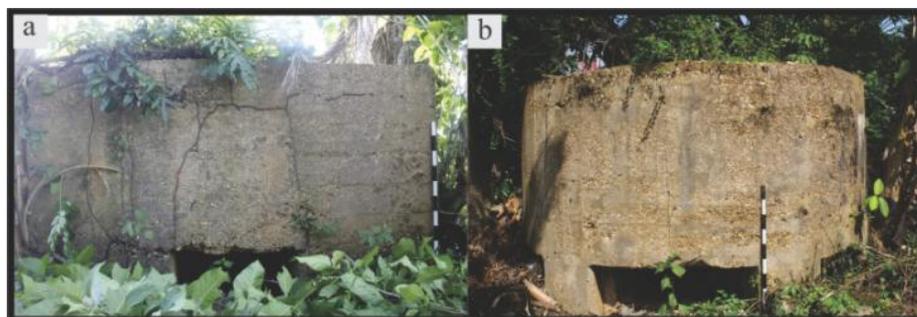
Tabel 20. Ukuran Pillbox Nambo II

Dimensi	Pintu		Lubang Bidik					
	Luar	Dalam	1		2		3	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	86 cm	95 cm	120cm	42 cm	120 cm	40 cm	120 cm	40 cm
Tinggi	72 cm	-	-	50 cm	-	50 cm	-	42 cm
Tebal	41 cm	-	80 cm	-	-	-	-	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Pillbox Nambo III

Letak astronomis 4°00'12,18'' LS dan 122°38'40,18'' BT. Kondisi permukaan dinding dan atap luar *pillbox* ditumbuhi lumut dan rumput liar. Sebagian badan *pillbox* tertimbun tanah hingga di bagian bawah lubang bidik dan sebagian pintu masuk. Permukaan dinding luar dan dalam *pillbox* tidak dihaluskan sehingga tampak bekas cetakan pada permukaan dinding luar dan dalam bangunan *pillbox*. Ruangan *pillbox* dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.



Gambar 21. (a) Pintu masuk dan (b) lubang bidik
(Sumber: Dok. Penulis, 2019)

Tabel 21. Ukuran Pillbox Nambo III

Dimensi	Pintu		Lubang Bidik					
	Luar	Dalam	1		2		3	
			Luar	Dalam	Luar	Dalam	Luar	Dalam
Lebar	90 cm	-	127cm	40 cm	127 cm	40 cm	130 cm	40 cm
Tinggi	50 cm	-	-	39 cm	-	46 cm	-	41 cm
Tebal	41 cm	-	81 cm	-	-	-	-	-

(Sumber: Penulis, 2020)

Kerangka Konseptual

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) meluncurkan sebuah *campaign* internasional pada tahun 1954 yang bertujuan untuk melindungi tinggalan-tinggalan masa lalu dan tahun 1972 *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* (Marshall, 2011) yang menandai dimulainya pendaftaran tinggalan masa lalu secara legal yang memiliki nilai penting. Di Indonesia tinggalan masa lalu yang dianggap mempunyai nilai penting disebut Cagar Budaya.

Sumber untuk kriteria Cagar Budaya termuat dalam Bab III pasal 5; Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria;

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya lebih menekankan pada sudut pandang nilai penting keilmuan dan kepentingan negara. Padahal, sebagai suatu *entitas* di tengah masyarakat yang hidup, cagar budaya memiliki nilai yang beragam berdasarkan penilaian atau pemaknaan masyarakat yang hidup disekitarnya. Dalam mengelola cagar budaya, perbedaan nilai penting sering menjadi pemicu munculnya konflik kepentingan di antara pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan peninjauan nilai penting memiliki dimensi yang luas dan tidak hanya berhenti pada penetapan termasuk atau tidak termasuk Benda Cagar Budaya, tetapi juga menentukan nilai-nilai apa saja yang ada pada sumberdaya dan seberapa tinggi derajat nilai penting yang terkandung sumberdaya arkeologi tersebut. Hasil penilaian, yaitu nilai penting sumberdaya arkeologi diperlukan dan harus dijadikan landasan utama dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan pelestariannya, karena **pada hakikatnya kegiatan pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan nilai penting sumberdaya arkeologi agar tidak berkurang ataupun hilang sama sekali** (Pearson dan Sullivan, 1995; McGimsey dan Davis, 1977) (Tanudirjo, 2004a).

Dalam penerapannya, belum ada pedoman yang mengatur tentang pengukuran nilai penting suatu benda cagar budaya. Meskipun demikian, minimal terdapat empat nilai penting yang sering digunakan dalam penilaian sumberdaya arkeologi. Nilai penting sejarah apabila sumberdaya arkeologi tersebut dapat menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi pada masa prasejarah dan sejarah, berkaitan erat dengan tokoh-tokoh sejarah, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu. Nilai penting Ilmu pengetahuan, jika sumberdaya arkeologi mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu (Tanudirjo, 2004b), Nilai Penting ekonomis, apabila suatu sumberdaya arkeologi dapat berpeluang untuk dimanfaatkan, misalnya dalam industri pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Nilai penting kebudayaan, apabila sumberdaya budaya tersebut dapat mewakili hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jati diri (*cultural identity*) bangsa atau komunitas tertentu (Tanudirjo, 2004a).

Nilai Penting Sejarah

Dalam perjalanan sejarahnya, pecahnya Perang Dunia ke-II yang di Asia dikenal dengan Perang Pasifik (pihak Jepang menyebut Perang Asia Timur Raya) membuat Kendari dilirik Jepang sebagai tempat strategis dalam strategi perang yang mereka anut, yakni operasi "Gurita".

Kendari merupakan wilayah penting bagi Jepang karena akan dijadikan sebagai pangkalan utama angkatan udara untuk menyerang Kupang dan Surabaya. Sebelum mendarat di Kendari, Jepang terlebih dahulu mengirim orang Jepang untuk tinggal di Kendari. Suruhan tersebut merupakan orang yang ditugaskan Jepang untuk melancarkan propaganda anti Belanda kepada rakyat. Selain itu, orang-orang tersebut juga menjadi mata-mata dan bertugas untuk melacak setiap tempat yang strategis sekaligus mengirimkan berita tentang kekuatan tentara Belanda. Pasukan Jepang mendarat pada malam 23 Januari 1942, terdiri dari pasukan gabungan angkatan darat dan Angkatan Laut serta pasukan khusus *Special Naval Landing Force* (SNLF) bergerak menyusuri sisi Timur pantai Sulawesi menuju ke arah Selatan pulau Sulawesi yakni di Kendari (Hayunira, 2013)

Kemudian pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang mendarat dan langsung menggempur pos-pos pertahanan Belanda di Kendari. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 1942 Jepang telah menguasai Kendari dan mulai mengatur pemerintahannya. Jepang juga telah membangun pertahanannya di Kendari dan sekitarnya. Sedangkan Teluk Kendari dipersiapkan untuk perbaikan kapal-kapal Jepang (Tim Penulis, 1979) dan titik awal invasi wilayah berikutnya.

Pada saat Jepang berkuasa di Sulawesi Tenggara, Jepang memindahkan ibu kota *Afdeling Buton end Laiwoi* dari Bau-Bau ke Kendari. Pejabat tertinggi di tingkat *Afdeling* yakni *residen* pada masa Belanda yang kemudian pada masa Jepang diganti dengan *Kontikos*. Akibat perubahan ini maka Kendari berada lebih tinggi posisinya dari *Onderafdeling* pada masa Belanda (Melamba et al., 2011). Namun, tidak ada perkembangan Kendari di periode Jepang berkuasa menggantikan Belanda, bahkan Jepang merusak beberapa fasilitas Belanda yang ditinggalkan. Karena Jepang hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana militernya untuk mempertahankan daerahudukannya, yakni Kendari dan sekitarnya.

Dari uraian singkat diatas, pendudukan Jepang turut memberikan pengaruh terhadap karakter Kota Kendari saat ini. Hal ini terlihat dengan kehadiran tinggalan *pillbox* militer Jepang yang melimpah di Kota Kendari yang masih dapat dijumpai saat ini. Tinggalan *pillbox* tersebut secara nyata punya peran strategis dan merupakan bagian penunjang dari upaya militer Jepang dalam mempertahankan wilayah yang didudukinya. Oleh karena itu, tinggalan *pillbox* tersebut adalah saksi bisu jejak peristiwa yang pernah terjadi di Kota kendari masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap bangunan *pillbox* Jepang yang tersebar di Kota kendari dapat digunakan untuk studi beberapa ilmu, yaitu;

(a) ilmu arkeologi yang fokus pada tinggalan *tangible* (bendawi) pada masa lalu, maka tinggalan arkeologis masa pendudukan Jepang berupa *pillbox* layak menjadi objek kajian arkeologi baik itu penelitian arkeologi murni maupun terapan seperti penelitian arkeologi

bidang manajemen sumberdaya budaya.

(b) ilmu teknik sipil; kehadiran *pillbox* dengan konstruksi yang berbeda dari bangunan biasanya, menarik untuk menjadi bahan diskusi ilmiah terkait tujuan penggunaan *pillbox* pada kondisi pertempuran.

(c) ilmu kimia; berkaitan dengan pelapukan *khemis* dan kerusakan *fisis* yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti air, penguapan, suhu, angin dan kelembaban lingkungan situs yang mempengaruhi kondisi fisik *pillbox* yang lambat laun rentan terhadap kerusakan.

(d) ilmu pariwisata; berkaitan dengan bentuk *pillbox* yang unik dan memiliki kekhasan berpotensi dikaji untuk tujuan wisata.

(e) ilmu biologi; berkaitan dengan pelapukan biologis yang disebabkan oleh adanya kegiatan mikroorganisme pada *pillbox*, seperti pertumbuhan *jasad*.

(f) ilmu militer; berkaitan dengan keberadaan *pillbox* yang tersebar di Kota Kendari menarik untuk kajian strategi perang.

Nilai Penting Ekonomi

Kehadiran tinggalan Jepang berupa *pillbox* yang masih dapat dijumpai saat ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata. Tentu saja dalam melihat peluang pariwisata, sumberdaya arkeologi yang secara jelas dalam undang-undang memiliki nilai ekonomi dari upaya pemanfaatan yang berimplikasi dengan bertambahnya pendapatan daerah dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar situs. Pemanfaatan sumberdaya arkeologi dalam industri pariwisata merupakan bagian dari upaya memberi dampak positif dari kehadiran benda budaya kepada masyarakat dan mewadahi kepentingan *stakeholders* terkait.

Sumberdaya arkeologi memiliki sifat yang unik dan khas sehingga menarik minat wisatawan melakukan perjalanan wisata untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan sejarah. Untuk mengangkat nilai ekonomi suatu sumberdaya arkeologi, pariwisata budaya merupakan titik tumpu berlanjutnya produk-produk dalam industri pariwisata, seperti pendekatan pariwisata berkelanjutan dengan konsep arkeowisata yang fokus pada budaya materi berupa cagar budaya sebagai atraksi yang unik dan khas. Konsep arkeowisata merupakan salah satu alat dalam pemanfaatan yang menambah lapangan pekerjaan masyarakat sekaligus bersinergi dengan upaya pelestarian. Pemanfaatan sumberdaya arkeologi sebagai tujuan wisata harus dengan prinsip tetap mempertahankan keaslian serta dampak dari pemanfaatan agar upaya pemanfaatan mendukung upaya pelestarian sumberdaya arkeologi karena mengingat bahwa sumberdaya arkeologi memiliki sifat-sifat tertentu seperti terbatas, rapuh dan tidak diperbaharui.

Nilai Penting Kebudayaan

Nilai budaya yang terkandung yakni terciptanya teknologi *pillbox* untuk memenuhi tantangan pada masa perang. Dalam penciptaanya tentu saja Jepang menerapkan prinsip kreativitas dan inovasi sehingga mendorong terciptanya *pillbox* yang memiliki fungsi penggunaan pada kondisi tertentu. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan *pillbox* di Kota Kendari yang meskipun kondisinya tidak terawat namun tampak utuh dan kokoh memperlihatkan fungsinya yang strategis di masa lalu. Variasi yang ada pada *pillbox* juga bagian dari pencapaian Jepang dalam teknologi untuk memenuhi tantangan yang ada pada periode tersebut.

Selain itu, tinggalan Jepang tersebut yang disadari merupakan bagian dari kekayaan bangsa dan identitas daerah/kota juga dapat menguatkan kesadaran/

kesatuan masyarakat tentang kejadian dimasa lalu yang dialami masyarakat pribumi. Hal ini berkaitan dengan upaya membangun memori kolektif dengan melibatkan benda materi yang ada sebagai proses mengingat dan memahami masa lalu. Dari tinggalan Jepang tersebut dapat membangun memori kolektif masyarakat terkait jejak peristiwa masa lalu di Kendari sebagai salah satu kota di Indonesia yang masyarakatnya mengalami kejadian tidak berperikemanusiaan, adanya eksploitasi secara paksa oleh bangsa luar dan sebagainya di masa lalu yang masih terekam di pikiran masyarakat Indonesia. Sehingga memori kolektif yang telah terbangun melalui benda materi yang ada sebagai bukti jejak peristiwa masa lalu dapat memberikan kontribusi dalam terjalannya keterikatan emosional dan dapat mempengaruhi ide, nilai, perilaku dan karakteristik generasi mendatang. Oleh sebab itu, tinggalan masa lalu yang selama ini dianggap sebelah mata, sudah seharusnya diapresiasi kehadirannya sebagai bentuk meminimalisir terjadinya konflik karena adanya penguatan memori kolektif.

Kesimpulan

Sumberdaya arkeologi berupa *pillbox* yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Kendari yang merupakan jejak dari upaya Jepang dalam mempertahankan daerahudukannya dan saksi bisu peristiwa kelam yang dialami masyarakat Kendari di masa lalu ternyata saat ini dapat memberikan dampak positif kepada elemen masyarakat karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, ekonomi dan kebudayaan. Pengetahuan tentang nilai penting ini diperlukan dalam menentukan strategi pengelolaan kedepannya agar *stakeholders* saling bersinergi untuk mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan terhadap sumberdaya arkeologi tersebut secara bijak.

Beranjak dari sumberdaya arkeologi yang melimpah maka sudah seyogianya proses penetapan nilai bukan sekedar mempertimbangkan alasan dibalik adanya upaya pelestarian terhadap sumberdaya, akan tetapi dampak apa yang didapatkan dari upaya pelestarian dan bagaimana menyediakan regulasi yang dapat mengakomodasi implementasi pelestarian menjadi tindak lanjut kedepannya. Sehingga pada akhirnya, tulisan singkat ini mengajak kita semua (*stakeholders*) untuk memberikan perhatian yang konsisten terhadap bentuk pengelolaan agar upaya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya arkeologi dapat menghidupkan kembali nilai-nilai sumberdaya yang memudar akibat perkembangan pemukiman dan fisik kota yang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Carman, J. (2002). *Archaeology & Heritage An Introduction*. Continuum.
- Darvill, T. (1987). *Ancient Monuments in the Countryside: An Archaeological Management Review*. English Heritage. <https://doi.org/10.2307/526179>
- Hayunira, S. (2013). *Masa Pendudukan Jepang di Kendari: Interpretasi Terhadap Tinggalan Bangunan Jepang di Kawasan TNI AU Ranomeeto, Konawe Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Marshall, D. (2011). Preparing World Heritage Nominations. In *Heritage (II)*. UNESCO.
- Melamba, B., Salahuddin, A. A., & Janu, L. (2011). *Kota Lama Kota Baru Kendari* (1 ed.). Teras.
- Suhartono, Y. (2008). Pelestarian Sumberdaya Budaya Arkeologi dalam Konteks Keruangan di Kawasan Borobudur (Studi Kasus candi Borobudur, Mendut dan Pawon). In Tesis. Gajah Mada.
- Tim Penulis. (1979). *Sejarah Masa Revolusi Fisik Daerah Sulawesi Tenggara*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tanudirjo, D. A. (2004a). *Kriteria Penetapan Benda Cagar Budaya*. Workshop Pedoman Penetapan Benda Cagar Budaya diselenggarakan oleh Deputi Menteri Bidang Kepurbakalaan dan Museum, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, di Cirebon, 16 – 18 Juni 2004.
- Tanudirjo, D. A. (2004b). *Penetapan Nilai Penting Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya*. Disampaikan dalam Rapat Penyusunan Standarisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 – 28 Mei 2004.

PELESTARIAN BANGUNAN LAMA TIONGHOA DI BANYUMAS JAWA TENGAH

Diyah Wara Restiyati

Kecapi Batara

diyahrestiyati@gmail.com

Akulturası budaya Jawa, Eropa dan Tiongkok menjadi kekhasan bangunan lama Tionghoa di Banyumas. Kekhasan tersebut merupakan potensi untuk pelestarian bangunan Tionghoa di Banyumas. Lalu bagaimana kondisi eksisting bangunan lama Tionghoa di Banyumas yang berpotensi untuk dilestarikan? Apa arti pentingnya bagi masyarakat Tionghoa di Banyumas apabila bangunan lama Tionghoa dilestarikan?

Pendahuluan

Banyumas berdasarkan catatan sejarah termasuk dalam daerah Mancanegara kerajaan-kerajaan Jawa sejak Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Kartasura hingga Kasunan Surakarta. Setelah Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dari tahun 1825 sampai tahun 1830, Banyumas menjadi wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda (Heru Satoto, 2013). Banyumas merupakan daerah pampasan Perang Jawa, setelah Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan dalam perang tersebut (Ariani, 2012). Adanya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Banyumas menjadikan kawasan ini memiliki tinggalan arkeologis yang dipengaruhi gaya Eropa seperti pabrik gula Kalibagor, stasiun kereta api, jembatan, bangunan gereja, masjid, rumah tinggal dan bangunan kantor pemerintahan bergaya kolonial.

Dahulu wilayah ini merupakan tempat tinggal para saudagar batik khas Banyumas. Saudagar batik yang terkenal pada tahun 1970-an yaitu Kho Siang Kie. Sayangnya produksi batik Kho Siang Kie terhenti pada tahun 1980-an dikarenakan tidak ada regenerasi (Ariani, 2012). Tinggalan pabrik batik, perlengkapan membatik, dan rumah tinggal para saudagar batik masih bisa ditemukan di kawasan ini, dan umumnya masih ditinggali oleh keturunannya. Keluarga Kho, Kwee dan Bhe merupakan keluarga Tionghoa yang bergelut dalam batik secara turun temurun. Salah satu keturunan dari keluarga Kwee yaitu Batik Banyumas Hadi Priyanto yang masih melanjutkan usaha batiknya sampai sekarang. Di kawasan ini bangunan Tionghoa yang dimaksud yaitu bangunan yang didirikan, dihuni, dan dimiliki oleh orang Tionghoa, baik bergaya Tiongkok Selatan, Hindia (*Indische Woonhuis/Indische Empire*), kolonial (*art deco/art nouveau*), dan kolonial modern/setelah tahun 1951 (Restiyati, 2018). Tidak ada bangunan yang bergaya Tiongkok Selatan murni di kawasan ini, termasuk bangunan kelentengnya. Klenteng Boen Tek Bio di kawasan ini menurut pak Adi (55 tahun), salah satu pengurus kelenteng, didirikan sekitar tahun 1900-an, dan memiliki gaya Jawa dan Tiongkok Selatan, dengan ciri khas sebuah patung kuda Sembrani. Pada tahun 2013, klenteng ini terbakar dan seluruh bangunan utama diganti menjadi gaya Tiongkok. Sebelum tahun 1900-an, bangunan kolonial di wilayah Jawa, termasuk di Banyumas, mengadopsi gaya *Indische Empire* atau *Dutch Indies* atau *Dutch Colonial Villa*, yang berasal dari gaya villa dinasti Lodewijk abad ke-18 di Perancis. Gaya *Indische Empire*

berkembang pada abad ke-18 dan 19 di Batavia, kemudian di kota-kota urban di seluruh Jawa. Gaya ini lahir akibat munculnya budaya *Indisch* sebagai budaya campuran Eropa, lokal, dan Tiongkok, yang diikuti oleh masyarakat Indo Eropa, Tionghoa dan pribumi dari golongan tertentu (Handinoto, 2010).

Kawasan Banyumas dengan kekhasan berupa bangunan lama bergaya campuran Jawa dan *Indische Empire* ini belum dijadikan sebagai kawasan cagar budaya meskipun memenuhi kriteria dijadikan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengertian Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.). Kriteria dalam undang-undang ini dalam pasal 5 yaitu: (1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; (2) Memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; (3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan; (4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Didalam undang-undang pasal 11 juga dinyatakan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 dapat diusulkan sebagai cagar budaya.

Hasil pengamatan terhadap kawasan dan bangunan Tionghoa di Banyumas dapat diasumsikan bahwa bangunan lama Tionghoa layak dilestarikan dan dijadikan cagar budaya. Berdasarkan asumsi tersebut maka penelitian mengenai pelestarian bangunan lama Tionghoa di Banyumas dilakukan. Adapun pertanyaan pada penelitian ini yaitu bagaimana kondisi bangunan Tionghoa di Banyumas untuk kelayakannya untuk dilestarikan dan dijadikan cagar budaya? Apa arti pentingnya bagi masyarakat Tionghoa di Banyumas apabila bangunan lama Tionghoa dilestarikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya?

Penelitian di Banyumas ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bangunan lama Tionghoa sebagai bagian dari budaya dan sejarah lokal masyarakat Banyumas; (2) mengidentifikasi nilai budaya masyarakat Tionghoa dalam jejak budaya yang material (*tangible*); (3) memberikan masukan atau rekomendasi bagi pemerintah Banyumas mengenai pelestarian bangunan lama Tionghoa

Penelitian dilakukan pada tahun 2018 di bangunan lama Tionghoa yang berpotensi untuk dilestarikan dan dijadikan kawasan atau bangunan cagar budaya. Data yang dipakai dalam tulisan ini menggunakan teknik pengambilan data berupa studi pustaka, wawancara mendalam, dan pengamatan. Informan di dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari pemilik, penghuni, dan pengurus bangunan. Penelitian ini juga mewawancarai tokoh masyarakat Tionghoa, sejarawan, dan komunitas penggiat sejarah budaya di Banyumas. Di dalam penelitian ini, akan digunakan istilah Tionghoa untuk menggantikan istilah Cina, dikarenakan istilah Cina mengandung pengertian sindiran, ejekan atau stereotip negatif pada masa pemerintahan orde baru, dan merupakan istilah yang digunakan pada masa kemerdekaan, dengan penekanan pada kelindonesiaan (Restiyati, 2006).

Pembahasan

Kawasan bangunan lama Tionghoa di Banyumas memiliki pola berbentuk garis lurus, dan berpetak dengan lorong seperti bangunan lama Tionghoa di daerah Jamblang, Kabupaten Cirebon dan Kawasan Pasar Lama Tangerang, namun dengan ukuran lorong utama lebih besar (Restiyati, 2017). Garis lurus dalam pemukiman masyarakat Tionghoa yaitu adanya klenteng, pasar dan pelabuhan dalam satu garis (Handinoto, 2010). Dari hasil pengamatan, klenteng di Banyumas yaitu *Boen Tek Bio*, pasar dan dermaga di Sungai Serayu berada dalam satu garis lurus, dan tidak berjauhan, sedangkan ukuran lorong yang lebih besar kemungkinan dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan perdagangan dan produksi batik Banyumas. Jalan yang lebar memudahkan transportasi komoditi perdagangan baik melalui darat maupun sungai. Pemukiman masyarakat Tionghoa lokasinya berdekatan dengan pusat kota Banyumas, yaitu alun-alun dan kantor pemerintahan, seperti pada umumnya pemukiman masyarakat Tionghoa di kota-kota pedalaman Jawa (Handinoto, 2010).

Hasil pengamatan dan wawancara dengan para informan, kawasan bangunan lama Tionghoa dibatasi dengan sungai terbesar di Banyumas yaitu Serayu, yang sekaligus juga menjadi jalur transportasi perdagangan dan kegiatan masyarakat ke daerah lain di masa lalu, dan tembok besar yang merupakan perbatasan dengan pemukiman pejabat tinggi Banyumas termasuk tempat tinggal bupati. Lokasi pemukiman berada di tepi jalan besar yang digunakan masyarakat sejak lama untuk menuju ke Cilacap, Banjarnegara atau ke daerah Jawa Barat. Rata-rata bangunan di dalam kawasan memiliki halaman depan dan belakang yang luas, dan berukuran besar. Masyarakat Tionghoa yang tinggal secara turun temurun memiliki usaha baik di pasar, maupun membuka toko di depan rumah tinggalnya, seperti toko dan bengkel batik Hadi Priyanto. Di kawasan ini kita juga bisa menemukan makanan khas Banyumas yang merupakan perpaduan masakan Jawa dan Tionghoa seperti soto, mie atau kue bolang baling/galundeng, sebuah kue dari tepung terigu, gula dan bahan lainnya yang dibentuk seperti bantal dan digoreng dalam minyak yang panas.

Bangunan tinggalan para saudagar batik terlihat berukuran besar, dulunya merupakan rumah tinggal sekaligus bengkel pembatikan dan toko batik. Rata-rata bangunan masih ditempati keturunannya, dan beberapa masih mempertahankan bangunan seperti aslinya, atau struktur lama, hanya ditambah beberapa bagian sesuai keperluan. Pada beberapa rumah, bengkel pembatikan tidak harus menempel dengan rumah tinggal dan toko batik, bisa berlokasi agak jauh atau di seberang rumah tinggal. Berdasarkan wawancara dengan mas Iko (40 tahun), pendiri komunitas sejarah budaya Banyumas, pemukiman orang mulai ramai dihuni bersamaan dengan adanya pabrik gula Kalibagor yang dibangun sekitar tahun 1838, pabrik keramik, pabrik kuningan, tapioka, dan batik di sekitar tahun 1936. Keterangan mas Iko ini dikuatkan oleh ibu Kwee (76 tahun) yang merupakan keturunan ketiga dari salah satu saudagar batik di Banyumas. Menurut ibu Kwee, pemukiman tersebut mulai ramai sejak munculnya banyak pabrik di Banyumas, dan pesatnya perdagangan batik, dengan target pasar di Jawa Barat dan Batavia. Meskipun orang Tionghoa sudah ada di kawasan Banyumas sejak sebelum pabrik-pabrik muncul, namun kedatangan orang Tionghoa dari berbagai daerah semakin meningkat pada masa pabrik beroperasi, dan setelah Perang Jawa. Dari hasil wawancara dengan para informan, orang Tionghoa pendatang ini berasal dari Semarang, Lasem, Cirebon, dan tempat lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Adapun pendatang dari Tiongkok Selatan pada masa sebelumnya di Banyumas kemudian berbaur dengan orang Jawa dan melakukan pernikahan campur, sehingga melahirkan generasi Peranakan Tionghoa Jawa yang sudah

tidak memiliki ciri fisik seperti orang Tiongkok, tidak bisa berbahasa Mandarin atau Hokkien (asal leluhur orang Tionghoa ini) dan lebih sering mengikuti tradisi Jawa daripada tradisi leluhur (Onghokham, 2009) terutama anak perempuan Tionghoa yang menikah dengan laki-laki Jawa. Di dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ada istilah bahwa "abu orang Tionghoa lebih tua", sehingga sebisa mungkin dihindarkan untuk terjadinya pernikahan antara suku Tionghoa dan suku Jawa, namun kenyataannya banyak orang Tionghoa yang menikah dengan orang Jawa (Anderson, 2003).

Kedatangan orang Tionghoa dan kemudian menetap dalam jumlah yang cukup besar di Banyumas berdasarkan wawancara dengan para informan, dapat dibagi dalam tiga gelombang. Pertama, kedatangan dari Tiongkok Selatan, melalui pelabuhan di Pulau Jawa, terutama melalui pesisir pantai utara yang kemudian menetap dan menikah dengan orang Jawa. Orang Tionghoa pada generasi ini belum bermukim pada satu kawasan tertentu melainkan secara sporadis di berbagai tempat. Pada masa gelombang pertama kedatangan orang Tionghoa yang umumnya pedagang, terjadi percampuran antara budaya Tiongkok Selatan dengan budaya Jawa. Gelombang kedua yaitu kedatangan orang Tionghoa dari Batavia, setelah terjadinya peristiwa Geger Pacinan, yaitu perang orang Tionghoa bersekutu dengan orang Jawa, melawan Belanda (1742-1745), sehingga banyak prajurit Tionghoa yang lari ke Jawa termasuk Banyumas untuk menetap, terutama di kawasan pedesaan di Gunung Slamet, dan sekitar daerah Sungai Serayu, untuk menghindari kontak dengan VOC. Menurut Mona Lohanda (1945-2021), Geger Pacinan yang terjadi di Batavia, menyebabkan populasi orang Tionghoa di kota tersebut menurun, dan sebaliknya membuat populasi orang Tionghoa di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai Madura semakin bertambah. Ketiga, kedatangannya yang bersamaan dengan pendirian pabrik gula, dan pabrik-pabrik lainnya sehingga mendukung pemerintahan kolonial Belanda untuk menggerakkan ekonomi Banyumas.

Tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi Banyumas, orang Tionghoa juga dijadikan semacam bandar untuk pemungut berbagai macam pajak, dan mengatur masyarakat Tionghoa di berbagai kota di nusantara, terutama urusan kematian, pernikahan, atau penyelenggaraan tradisi. Menurut Mona Lohanda, pada abad ke-15 pemerintah kota-kota dagang di Asia tenggara memiliki kebiasaan untuk mengangkat pemimpin dari semua etnis, termasuk pemerintahan kolonial Belanda. Biasanya para pemimpin tersebut dipilih dari pedagang yang kaya, atau orang yang berpengaruh di dalam masyarakatnya. Jabatan ini terbagi dalam posisi Mayor, Kapiten, dan Letnan, tergantung pada luas wilayah, dan jumlah masyarakat Tionghoa yang bermukim. Tidak hanya mendorong orang Tionghoa ke dalam posisi elit dalam masyarakat, semakin banyaknya orang Tionghoa yang datang dari Tiongkok, dan bermukim di Jawa, mendorong pemerintahan VOC (1619-1800), harus memberlakukan kebijakan khusus untuk masyarakat Tionghoa, dan mengikat masyarakat Tionghoa agar terus bekerjasama dengan mereka dengan cara mengenakan pajak kepala. Pajak ini dikenakan pada semua orang Tionghoa yang bermukim di Jawa, berusia 16 sampai 60 tahun. Akan tetapi pajak ini tidak dikenakan kepada orang Tionghoa yang sudah masuk Islam, dan tidak berkuncir (disebut dengan peranakan). Selama masa kekuasaan VOC, jabatan opsir Tionghoa ini diberlakukan di berbagai wilayah di Pulau Jawa, dan luar Jawa, terutama wilayah yang dikuasai VOC. Berdasarkan pengamatan, di kawasan bangunan lama Tionghoa, ditemukan ada tiga bangunan Tionghoa yang berpotensi untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Ketiga bangunan tersebut yaitu (1) rumah Keluarga Bhe, (2) rumah Keluarga Kwee, dan (3) rumah Keluarga Ong. Dari ketiga rumah ini, hanya rumah Keluarga Ong yang sudah tidak ditempati dan dalam keadaan rusak karena tidak terawat serta dalam proses penjualan.

a. Rumah Keluarga Bhe

Bangunan kolonial bergaya *indische empire* bercampur dengan Tiongkok Selatan ini memiliki tiang-tiang dengan kolom besar bergaya kolom Yunani *dorian* di beranda yang terbuka dan menggunakan lantai dari tegel. Tembok-tebok tebal dan langit-langit tinggi juga menjadi ciri khas dari bangunan bergaya *indische empire* ini (Handinoto, 2010). Pola rumah seperti pola rumah gaya Tiongkok Selatan, dengan kamar di bagian kiri dan kanan, terdiri dari bagian teras, bagian depan, tengah, dan belakang (Qijun, 2011). Bangunan yang pernah difungsikan sebagai rumah tinggal ini, memiliki halaman depan dan belakang yang luas. Pintu dan jendela rumah berbahan kayu jati, dengan bentuk pintu seperti umumnya pintu di rumah Tiongkok lengkap dengan pengunci berupa balok kayu berukuran besar, yang sekarang hanya tersisa penopang baloknya pada pintu. Rumah ini sekarang dijadikan sebuah kedai kopi, setelah direnovasi berupa pengecatan kembali tembok bangunan, pemasangan tegel di ruangan dalam, dan pembersihan semua bagian rumah. Sebelumnya rumah ini difungsikan sebagai rumah sarang burung walet, kemudian dijadikan aula pertemuan keturunan keluarga Bhe. Menurut Anton (34 tahun), generasi kelima dari pendiri rumah, tidak diketahui dengan jelas kapan rumah ini dibangun. Dahulu, rumah tinggal ini juga merupakan bengkel produksi batik tulis dan cap, yang berlokasi di bagian belakang. Kain-kain batik biasa dijemur di halaman rumah, dan para pembatik tidak ada yang tinggal di rumah, melainkan berperan sebagai pembatik *obengan* atau pembatik yang dibayar sesuai dengan kain yang dibatik, sedangkan kain batik yang sudah jadi akan dibawa ke pasar di kota dan sebagian kecil dijual di rumah (Restiyati, 2019).



Gambar 1. Atap rumah Keluarga Bhe
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 2. Tiang rumah bergaya kolonial dan jendela dari kayu
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 3. Sisa penopang balok pengunci pada pintu
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 4. Tiang kolom penopang atap bergaya kolonial
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



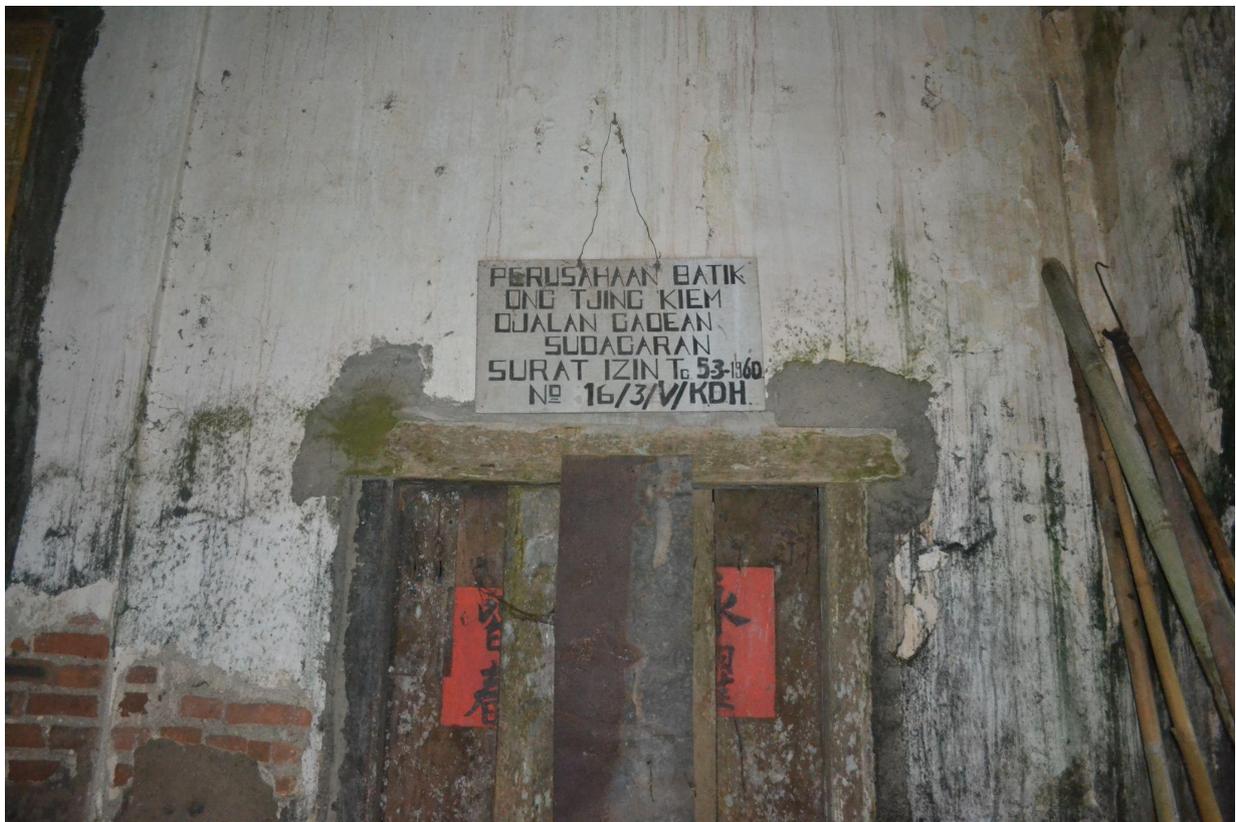
Gambar 5. Rumah sudah dijadikan kafe
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

b. Rumah Keluarga Kwee

Bangunan keluarga kwee yang masih ditempati oleh keturunannya memiliki gaya *indische empire* dan Jawa. Pola rumah seperti pola rumah gaya Tiongkok Selatan, dengan *courtyard*, sebuah ruang terbuka di tengah-tengah rumah untuk memungkinkan sirkulasi udara ke dalam dan keluar rumah (Knapp, 2010). Sayangnya rumah utama pada bangunan ini sudah menuju kehancuran, hanya terlihat kolom besar, dengan sebagian dinding rumah, beberapa tegel, serta hanya tinggal bagian belakang, dan bagian samping. Bagian samping ini sekarang digunakan sebagai tempat tinggal generasi ketiga dari keluarga Kwee. Menurut om Liem (77 tahun), suami dari tante Hwa (74 tahun), sebagai pemilik rumah, rumah ini diperkirakan sudah dibangun sejak tahun 1800-an. Hal ini dikuatkan dengan adanya catatan di salah satu dinding rumah yang menunjukkan angka 1861, sebagai tahun peristiwa banjir besar di Banyumas dengan meluapnya Sungai Serayu, pada masa periode kepemimpinan bupati Cakraningrat I. Berdasarkan keterangan tante Hwa, rumah ini memiliki gaya kolonial dan Jawa dikarenakan kakek buyutnya merupakan orang Tiongkok yang menikah dengan perempuan Jawa. Perempuan Jawa ini berdasarkan cerita secara turun temurun merupakan keluarga dari Pangeran Diponegoro yang ikut berperang dalam Perang Jawa, dan mengungsi ke Banyumas, lalu menikah dengan seorang saudagar batik. Adapun usaha batik kemudian diteruskan oleh anak cucunya sampai batik Banyumas kurang diminati oleh masyarakat dikarenakan munculnya tekstil untuk pakaian yang dianggap lebih modern, dan industri batik pun bangkrut di tahun 1970-an. Keluarga Tante Hwa masih berusaha melanjutkan usaha batik sampai tahun 1990-an namun kemudian terjadi pencurian terhadap semua alat batiknya, sehingga usaha batik tidak dilanjutkan.



Gambar 6. Bagian tengah dari rumah yang masih tersisa
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 7. Tanda yang tersisa dari perusahaan batik
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 8. Kolom tiang rumah yang bergaya kolonial, sedangkan pintu menggunakan gaya Tiongkok
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 9. Kolom tiang rumah dan lantai yang sudah rusak tidak terawat
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

c. Rumah Keluarga Ong

Satu-satunya bangunan berupa rumah tinggal yang sudah tidak dihuni dari ketiga rumah yang dapat dilestarikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya yaitu rumah keluarga Ong. Bangunan ini terlihat sudah mulai rusak dan tidak terawat karena berada dalam proses dijual. Menurut ibu Lina (70 tahun), rumah ini direncanakan akan dijual sebesar 2 milyar. Gaya bangunan ini merupakan gaya campuran Tiongkok Selatan dan kolonial, yang terlihat pada kolom besar di depan rumahnya, lantai di beranda terbuat dari tegel, dan atap berbentuk ekor walet yang menandakan bahwa pemilik rumah merupakan pejabat tinggi, orang kaya atau bangsawan (Kecapi Batara, 2018). Bangunan ini memiliki halaman depan yang luas, dan pintu depan terbuat dari kayu. Sayangnya tidak diketahui pola rumah dan bagian dalam rumah dikarenakan rumah ini tertutup untuk umum. Di bagian seberang rumah terdapat tanah kosong yang menurut ibu Lina merupakan bengkel produksi batik dari keluarga Ong.



Gambar 10. Tampak depan rumah
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 11. Bagian beranda yang sudah rusak
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 12. Bagian beranda dengan tiang bergaya indis dan lantai dari tegel
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dari hasil pengamatan bangunan lama Tionghoa di Banyumas, bangunan lama Tionghoa yang ada di wilayah bekas pemukiman batik ini perlu dilestarikan dan sangat berpotensi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya dan dijadikan destinasi wisata. Bukan hanya destinasi minat khusus, melainkan juga destinasi sejarah, budaya, pendidikan, religi, dan kuliner. Adanya masyarakat Tionghoa di Mryung merupakan bagian dari sejarah lokal Banyumas, terutama dalam sejarah batik, dan pengembangan motif batik khas Banyumas. Nilai budaya yang berupa bangunan lama dapat menjadi inspirasi untuk menghasilkan karya budaya yang khas dan menampilkan jati diri dari masyarakat (Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, 2017). Hasil wawancara dengan para pemilik bangunan dan masyarakat di kawasan Banyumas menyatakan bahwa **kawasan Banyumas merupakan kawasan bersejarah yang sudah berperan dalam pengembangan batik Banyumas. Di kawasan ini juga kehidupan toleransi dan akulturasi antara orang Tionghoa dan Jawa berjalan dengan baik.** Tidak ada pembatasan ataupun segregasi. Hal ini ditegaskan

oleh pak Adi (70 tahun), salah satu pengurus gereja dan generasi ketiga saudagar batik, bahwa sejak dulu di kawasan ini tidak pernah ada kejadian yang mengarah pada sentimen ras tertentu, atau kecemburuan sosial yang menyebabkan kerusuhan sosial akibat aktifnya masyarakat Tionghoa dalam ekonomi Banyumas. Pak Adi juga mengungkapkan keheranannya dengan peristiwa konflik antara suku Tionghoa dengan suku Jawa atau suku lainnya di tempat lain.

Toleransi dan kerukunan antar suku dan umat beragama sudah berlangsung sejak dulu di Banyumas. Salah seorang informan yang juga tokoh masyarakat di Banyumas bernama pak Anwar (70 tahun) mengungkapkan bahwa pembauran antara suku Tionghoa dan suku Jawa sudah terjadi jauh sebelum adanya pemerintahan Hindia Belanda dan mengembangkan jejak budaya yang khas Banyumas seperti batik atau makanan khas. Menurut mas lko, pak Adi, pak Anwar, ibu Lina, ibu Kwee, tante Hwa dan om Liem, pelestarian kawasan dan bangunan Tionghoa di Banyumas akan menambah nilai lebih pada Banyumas sebagai kawasan budaya dan bersejarah, sehingga masyarakat sekitar Banyumas maupun luar Banyumas akan tertarik untuk berkunjung. Adanya kunjungan tersebut diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat Tionghoa dan generasi muda Tionghoa dapat berkegiatan di Banyumas. Saat ini banyak anak muda Tionghoa Banyumas yang tinggal di luar Banyumas karena menganggap kawasan ini tidak berkembang secara ekonomi dan bukan tempat melakukan kegiatan kreatif.

Oleh karena itu, apabila pemerintah Banyumas memang bersungguh-sungguh untuk mengembangkan semua potensi destinasi wisata yang dimiliki maka pemerintah bisa memulai dengan melestarikan peninggalan masyarakat Tionghoa di Banyumas, dan menetapkannya sebagai cagar budaya. Menurut Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 pasal 26 dan 28, pencarian, pengangkatan dan penetapan cagar budaya merupakan kewajiban pemerintah, sedangkan masyarakat hanya bisa mengajukan, mendaftarkan dan melakukan penelitian arti pentingnya benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan bagi masyarakat untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Proses pendaftaran bangunan Tionghoa menjadi cagar budaya bukan hal yang mudah. Ada proses identifikasi bangunan kemudian pendaftaran. Didalam proses pendaftaran diperlukan berkas pendaftaran yang meliputi (Subijono, 2011): (1) status kepemilikan tanah bangunan, (2) gambar denah bangunan; (3) foto bangunan tampak depan dan tampak samping; (4) deskripsi historiografis bangunan; (5) riwayat pelestarian bangunan; (4) kondisi terawatnya bangunan; dan (5) hasil identifikasi awal bangunan.

Setelah proses pendaftaran, maka Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) setempat atau tingkat di atasnya apabila belum ada tim ahli di Banyumas, melakukan penelitian untuk konfirmasi dan penilaian kelayakan bangunan cagar budaya, dan setelahnya baru diterbitkan sertifikat penetapan cagar budaya dan pembuatan proposal untuk pelestarian. Meskipun begitu, masyarakat dan pemerintah daerah dapat pula langsung melestarikan bangunan Tionghoa di Banyumas tanpa perlu menunggu penetapan cagar budaya,

dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pelestarian. Prinsip-prinsip pelestarian menurut Burra Charter 1994 (Soedarsono, 2011) yaitu:

1. Tujuannya untuk mempertahankan dan memulihkan signifikansi budaya sebuah tempat yang harus menyertakan jaminan keamanan serta keselamatan objek, pemeliharannya, kelanggengannya dan keutuhannya.
2. Upaya konservasi harus dilakukan berdasarkan penghargaan terhadap kondisi eksisting sebuah objek dan selayaknya menggunakan intervensi fisik seminimal mungkin dan tidak boleh mengganggu keunikan dan kekhasannya.
3. Upaya konservasi selayaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan sejauh dapat berkontribusi dalam hal penyelamatan.
4. Upaya konservasi objek/kawasan harus mempertimbangkan segala aspek dari signifikansi budaya tanpa membebani lingkungan sekitar dan berdampak negatif.
5. Kebijakan konservasi yang disusun untuk sebuah objek/kawasan harus komprehensif mempertimbangkan signifikansi budaya dan kondisi fisik.
6. Kebijakan konservasi harus mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan bangunan lama.
7. Upaya konservasi memerlukan pemeliharaan *visual setting* yang tepat dan tidak merusak lingkungan.
8. Bangunan atau kawasan yang akan dikonservasi sebaiknya tetap berada di lokasi asal. Pemindahan hanya dapat dilakukan dengan alasan yang kuat.
9. Pemindahan dan penghilangan bagian tertentu yang memiliki peran dalam signifikansi budaya tidak diperkenankan kecuali pemindahan tersebut untuk menyelamatkan obyek/bangunan tersebut.

Berdasarkan Burra Charter 1999, unsur dari karakter kawasan yang dilestarikan meliputi fungsi, posisi masa bangunan, bentuk, skala, karakter, warna, tekstur dan bahan (Soedarsono, 2011). Pelestarian bangunan Tionghoa di Banyumas juga harus memperhatikan nilai-nilai keaslian (*authenticity*), baik keaslian bahan bangunan, disain, teknologi, dan tata letak (Subijono, 2011). Misalnya pada keaslian bahan bangunan, yaitu bangunan yang masih menggunakan batu bata dan lapisan kapur pada dinding seperti aslinya bukan menggunakan cat. Menurut *Venice Charter, 1964; Granada Convention, 1985; Washington Charter, 1987; Charlestown Principles, 1990; Malta Convention, 1992; dan Burra Charter, 1999*, upaya pelestarian juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut (Soedarsono, 2011):

1. Multidisiplin

Kebijakan dan rencana pelestarian kawasan/bangunan harus menggunakan pendekatan dan kajian dari berbagai disiplin keilmuan seperti arkeologi, arsitektur, sejarah, antropologi, teknik, ekonomi dan lainnya. Pada kenyataannya saat ini tim ahli cagar budaya yang ada di Banyumas belum mengakomodir semua bidang keilmuan karena adanya perspektif bahwa cagar budaya identik dengan keilmuan arsitektur dan sejarah saja.

2. Kelembagaan

Pelestarian bangunan/kawasan perlu membentuk lembaga organisasi yang menjadi pengendali serta memiliki tugas dan kewenangan yang jelas agar program dapat terlaksana. Tujuan dari kebijakan pelestarian harus dirumuskan dan ditunjang oleh perangkat legal, administratif dan financial. Saat ini meskipun sudah ada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), namun tugas dan kewenangannya masih belum dipahami oleh pembuat kebijakan dan masyarakat, sehingga seringkali tidak adanya perangkat legal, pengurusan administratif

yang tidak jelas dan tidak teratur, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan tugas tim. Akhirnya TACB sendiri yang mencari cara untuk berjalannya tugas dan program.

3. Partisipasi dan Pembelajaran Masyarakat

Kebijakan pelestarian perlu didukung oleh masyarakat kawasan atau pemilik/penghuni/pengurus bangunan Tionghoa dari semua kalangan, tanpa memandang perbedaan umur, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, suku, umur dan kelas sosial. Oleh karena itu sosialisasi informasi mengenai pelestarian kawasan dan bangunan Tionghoa kepada publik harus dilakukan secara rutin dan bertahap, sebelum upaya pelestarian dan penetapan cagar budaya dilakukan.

4. Keterpaduan dengan Rencana Kota

Pelestarian harus terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek pemerintah daerah Banyumas, sehingga akan meminimalisir konflik kepentingan para pembuat keputusan atau kebijakan. Sampai penelitian dilakukan, dan tulisan ini dibuat, belum pernah ada sosialisasi atau pertemuan program integrasi antara pelestarian kawasan atau bangunan di Banyumas, terutama Mruyung dalam rencana pembangunan daerah.

5. Menghormati Warisan Budaya, dan Keragaman Lokal

Kebijakan yang diambil masyarakat dan pemerintah daerah Banyumas tidak boleh berbenturan dengan warisan budaya, baik *tangible* maupun *intangible*, dan memfokuskan pada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak, bukan hanya pada satu golongan, atau hanya satu keluarga pemilik bangunan Tionghoa.

6. Kesesuaian dengan Karakter Fungsi dan Fisik Kawasan

Proporsi menjadi kunci utama dalam pelestarian, misalnya ada rencana pemerintah daerah membangun pasar modern di kawasan pemukiman masyarakat Tionghoa maka harus dipertimbangkan dan dianalisis kesesuaian dengan kawasan dan bangunan lama serta bersejarah di kawasan tersebut.

7. Pendokumentasian

Tindakan pendokumentasian kondisi eksisting kawasan dan bangunan diperlukan untuk pertimbangan dalam membuat rencana pelestarian.

Untuk melakukan pelestarian, pemerintah daerah dan TACB harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti kepadatan penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan kota, dan menjadikan nilai tanah dan bangunan menjadi tinggi, adanya perubahan struktur masyarakat yang berpengaruh pada kehidupan sosialnya, bangunan lama yang tidak digunakan untuk fungsi yang tidak semestinya, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai pelestarian. Untuk faktor internal yaitu rendahnya kesadaran/minimnya pengetahuan berkaitan dengan bangunan bersejarah/cagar budaya yang berpengaruh pada identitas kota, tidak adanya kepastian hukum terhadap pelestarian kawasan/bangunan Tionghoa, dan tidak adanya kesadaran akan pentingnya nilai gaya bangunan atau kawasan.

Penutup

Hasil pengamatan tiga bangunan Tionghoa yang layak dilestarikan dan dijadikan cagar budaya, ada dua bangunan masih ditempati dan satu sudah kosong. Saran saya pemerintah daerah beserta TACB Banyumas sebelumnya harus membuat pertemuan dengan tokoh masyarakat, para pemilik/pengurus bangunan, perwakilan keluarga yang masih tinggal di kawasan tersebut dan bangunan Tionghoa nya serta pihak lain yang peduli dengan pelestarian, seperti komunitas, untuk mendiskusikan mengenai upaya pelestarian dan cagar budaya. Dua bangunan yang masih difungsikan sebagai rumah tinggal dan kafe, akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Bangunan milik keluarga Kwee sudah hampir roboh sehingga memerlukan konservasi total terlebih dahulu, sedangkan bangunan milik keluarga Bhe sudah dirawat dan difungsikan sebagai tempat usaha. Untuk bangunan keluarga Bhe, pemerintah daerah dan TACB harus memberikan informasi dan lokakarya pemeliharaan, perawatan dan pembersihan bangunan lama sesuai dengan prinsip konservasi, dan pelatihan pengelolaan bangunan sebagai destinasi wisata, sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi pemilik dan pengelola. Tiga bangunan Tionghoa ini tidak hanya bisa dijadikan cagar budaya, tetapi juga sebagai destinasi wisata. Potensi khas yang dimiliki bangunan ini dapat dilihat dari enam poin berikut yaitu:

1. Arsitekturnya yang unik dan berbeda tiap bangunan. Arsitektur bangunan keluarga Bhe yang dijadikan kedai kopi bergaya *indisch empire*, berbeda dengan bangunan keluarga Ong yang bergaya *indisch empire* dan Tiongkok Selatan, sedangkan bangunan keluarga Kwee bergaya *indisch empire* dan Jawa.
2. Sejarah bangunan, dan pemilik bangunan terdahulu yang terkait dengan sejarah perkembangan kawasan, terutama sebagai pusat perdagangan dan produksi batik khas Banyumas. Ketiga bangunan merupakan bangunan peninggalan para saudagar batik yang terkenal di Banyumas.
3. Warisan budaya *tangible* yang beragam. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong semua daerah untuk melestarikan warisan budayanya baik yang *tangible* maupun *intangible* yang diharapkan akan mendukung sektor pariwisata secara berkelanjutan. Di kawasan ini, masyarakat luar Banyumas dapat belajar dan mengetahui mengenai warisan budaya campuran Tionghoa dan Jawa dalam batik khas Banyumas dan bangunan Tionghoa yang masih ada.
4. Kuliner yang beragam, yang merupakan percampuran kuliner Tionghoa dan Jawa.
5. Destinasi untuk wisata pendidikan. Lokakarya mengenai batik, kopi, kuliner atau bangunan *indisch empire* dapat diadakan di kawasan ini karena objek dan pelakunya masih ada.

Lima poin diatas tentunya tidak akan berjalan dengan baik, apabila:

- a. Konsep pelestarian yang dibuat belum sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian.
- b. Belum adanya peran aktif pemerintah setempat untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat.
- c. Belum adanya niat baik untuk melakukan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sektor pariwisata.
- d. Belum adanya kebijakan yang pro pelestarian dan masyarakat untuk berkegiatan dalam bidang pelestarian.

Pelestarian bangunan lama Tionghoa di Banyumas menurut saya akan membuat masyarakat Banyumas terutama masyarakat Tionghoa menyadari akan identitas dan budaya mereka yang khas dan masih ada, sehingga dapat mendorong keberlangsungan budaya Tionghoa Jawa di Banyumas, dan daya tarik wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal dan Buletin

- Ariani, C. (2012). Simbol, Makna, dan Nilai Filosofis Batik Banyumasan. *Patrawidya*, 14 (No.3), 577–613.
- Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo. (2017). Studi Keterawatan Cagar Budaya Waruga Nima Wanua. *Buletin Umulolo*, Vol.VI (No.1), 20-35.

Buku

- Anderson, B.R.O.G. (2003). *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Bentang.
- Handinoto. (2010). *Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Graha Ilmu.
- Heru Satoto, B. (2013). *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa dan Watak*. Yogyakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Knapp, R.G. (2010). *Chinese Houses of Southeast Asia*. Singapore: Tuttle Publishing.
- Ongkhokham. (2009). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* (David Reeve (ed.); Second). Komunitas Bambu.
- Qijun, W. (2011). *Chinese Architecture*. Shanghai Press and Publishing and Better Link Press.
- Restiyati, D. W. (2006). *Minoritas dan Negara*. Universitas Indonesia.
- Restiyati, D.W & Rafaelito, N. (2018). *Bangunan Cagar Budaya Berlanggam Cina di Jakarta*. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Restiyati, D. W. (2019). *Batik Banyumas Jejak Tradisi yang Memudar*. Gramata.
- Soedarsono, W. (2011). *Pelestarian Kota Tua di Indonesia*. Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Subijono, E. (2011). Konservasi dari Sudut Pandang Etika Profesi Arsitek. In *Pengantar Panduan Konservasi Bangunan Bersejarah Masa Kolonial* (p. 31). Pusat Dokumentasi Arsitektur.

KERETA API SUMATERA BARAT DULU, KINI DAN ESOK

Gimin Saputra

Mts Pondok Pesantren Nurul Islam

saputragimin489@gmail.com

Jalan panjang kereta api di Sumatera Barat itu akan menjadi kenangan. Sebagian tertutup tanah dan di atasnya akan berdiri rumah penduduk. Tahun 2003 keakraban warga Sumatera Barat dengan kereta api berakhir.

Alam Sumatera Barat

Daerah Sumatera Barat sebelah utara berbatasan dengan Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Jambi dan Bengkulu, sebelah timur dengan Riau, dan sebelah barat dengan lautan Hindia. Sedangkan Sumatera Barat terdiri atas delapan kabupaten dan enam kotamadya. Kedelapan kabupaten itu adalah Pasaman, Agam, Limo Puluh Kota, Tanah Datar, Solok, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sawah Lunto Sijunjung, dan kini ditambah satu lagi Dharmasraya. Sedangkan enam kotamadya ini adalah Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Solok, dan Sawahlunto. Secara geografis memiliki dua alam, yakni daerah pedalaman dan pesisir. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan darek dan pesisir dengan nama rantau.¹ Daerah pedalaman adalah alamnya yang berbukit-bukit, banyak lembah dan ngarai. Selain itu daerah Sumatera Barat bagian pedalaman memiliki alam yang kaya akan hasil bumi. Kekayaan ini seperti adanya kandungan mineral besi, timah, emas, batu bara dan hamparan tanah yang cukup luas lagi subur.

Dengan keadaan alam Sumatera Barat bagian pedalaman inilah penduduk berhasil mengembangkan perekonomian dengan cara berkebun, bertani, dan bahkan dengan cara bertambang hasil bumi hingga tingkat yang lebih tinggi. Adapun hasil dari daerah pedalaman Sumatera Barat adalah seperti tanaman kayu manis, kelapa (kopra, kopi, lada, coklat, tembakau, gambir, kakao, cengkeh, karet, merica, dan lain sebagainya.² Sedangkan kalau dari segi pertambangan yang paling terkenal adalah batu bara di Sawahlunto dan semen di Indarung.³ Meskipun dengan keadaan yang demikian ada sebagian masyarakat pedalaman terpaksa melakukan pekerjaan lain seperti berdagang atau bertukang.⁴

Penduduk di daerah pesisir Sumatera Barat lebih mengembangkan aspek-aspek maritimnya, seperti pelayaran, perikanan, perkapalan, dan perdagangan. Penduduk pesisir secara umum berstatus sebagai nelayan, saudagar, dan tukang kapal karena alam yang mereka tempati memaksa untuk demikian. Artinya suatu daerah akan membentuk tradisinya sendiri sesuai dengan alam disekitar mereka.

1 .D. Mansoer, (dkk), *Sedjarah Minangkabau*, (Djakarta: Bhratara, 1970), hal. 2-3.

2 Abrar, *Latar Belakang Pembangunan Jaringan Lalu Lintas Kereta Api Di Sumatera Barat 1887-1924*, (Jurnal Sejarah Lontar Vol. 4 no. 3 Januari 2007), hal. 9.

3 Edwar Djamaris, *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*, (Jakarta: Bintang Obor Indonesia, 2002), hal. 2.

4 Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003), hal. xvi.

Potensi alam yang dimiliki Sumatera Barat inilah menyebabkan daerah lain di Indonesia dan bahkan negara Eropa untuk berdatangan. Gusti Asnan mengatakan bahwa orang-orang Aceh yang pertama kali turut membantu munculnya kota-kota di pesisir Sumatera Barat. Ditambah lagi pada abad XV dengan datangnya para pedagang India secara rutin tiap tahun. Sedangkan negara Eropa mulai masuk ke Sumatera Barat (bagian pesisir) pada abad XVI. Bangsa Eropa ini seperti Belanda pada tahun 1602 ke Tiku dan Inggris pada tahun 1605 ke Pariaman untuk melakukan perdagangan merica.⁵

Kedatangan orang-orang Eropa tersebut membuat pertumbuhan kota-kota pantai barat menjadi ramai. Karena kemunculan dan berkembangnya kota Padang menjadi salah satu kota penting di Sumatera Barat misalnya, itu tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran bangsa Eropa. Keadaan demikian terus berlanjut hingga awal abad XX dan Kota Padang merupakan kota terpenting di Sumatera Barat.⁶

Potensi alam Sumatera waktu itu banyak menghasilkan berbagai tanaman dan hasil tambang, tetapi yang sangat besar perannya adalah hasil tambang batu bara dan semen yang ada di Indarung. Semen Padang di Indarung ini terletak sekitar 15 km sebelah timur Kota Padang yang mulai beroperasi tahun 1910. Pabrik ini didirikan C.C Lau dan pembangunannya dimungkinkan setelah Lau menjalin kerja sama dengan sejumlah pengusaha di kota Padang seperti Paul Baumer dan Veth. Pabrik ini didirikan di atas tanah ulayat masyarakat Lubuk Kilangan (tentu saja setelah Lau memenuhi beberapa persyaratan seperti membayar kompensasi serta menjanjikan akan memberikan kesempatan kepada Lubuk Kilangan untuk bekerja di pabrik). Pembangunan pabrik semen di Indarung memberi pengaruh pada daerah sekitarnya, karena sejak pembukaan pabrik itu di daerah ini mulai pula dibuka beberapa usaha perkebunan, peternakan, industri kerajinan serta industri wisata. Selama perjalanan sejarahnya pabrik ini berganti nama dan pemilik beberapa kali. *NV. Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* adalah nama pertama. Pada masa Jepang berganti nama *Asano Cement* yang kantornya berpusat di Tokyo. Setelah Indonesia merdeka pabrik diambil oleh kaum republik dengan nama Kilangan Semen Indarung. 1950 pabrik ini kembali dibawah tangan pemilik yang lama. Sedangkan pada 2 Juli 1958 pabrik semen ini jatuh kembali ke tangan pemerintah dengan nama PN. Semen Padang.⁷

Memang kalau berbicara tentang potensi alam Sumatera Barat pada awal abad XX tentu tidak akan terlepas dari penemuan batu bara yang ada di Sawahlunto (Ombilin). Jika berbicara soal kerja paksa, seperti zaman Romusha oleh Jepang, maka sebenarnya di Ranah Minang pada zaman kolonial Belanda juga ada kerja paksa, bahkan sebenarnya menjurus ke perbudakan. Lokasi terjadinya adalah di tambang batu bara Ombilin antara tahun 1892-1938. Orang rantai merupakan sumber tenaga kerja murah bagi tambang batu bara di Sawahlunto yang sedang naik daun produksinya pada saat itu. Betapa tidak, hanya dengan menyediakan makan dan minum serta sedikit upah, tenaga kerja tersedia untuk menambang selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

5 Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 86.

6 *Ibid*, hal. xvii.

7 Gusti Asnan, *op, cit*, hal. 299.

Sebab pada saat itu, pemerintah kolonial membangun jaringan jalan kereta api⁸ yang menghubungkan Kota Padang dengan Padang Panjang, Solok dan Sawahlunto.⁹ Karena secara geografis, Sawahlunto berada di bagian Timur Padang, ibu kota pemerintahan Sumatera Barat. Pembangunan jaringan jalan kereta api ini dilakukan karena ditemukannya cadangan batu bara dalam jumlah yang banyak di kawasan sekitar Sawahlunto. Kereta api menjadi alat pengangkut utama batu bara ini. Batu bara tersebut dibawa ke Pelabuhan *Emmahaven* (Teluk Bayur) untuk selanjutnya diekspor ke mancanegara.¹⁰



Jalur rel kereta api Teluk Bayur Tahun 1907
Sumber: Collectie Tropenmuseum

Jalur rel kereta api Teluk Bayur tahun 1907
(Sumber: Collectie Tropenmuseum)

Emmahaven adalah satu pelabuhan laut utama di Minangkabau. Mulai dibangun pada tahun 1888 dan diresmikan pada tahun 1892. Ini mulanya dibangun untuk dijadikan pelabuhan ekspor batu bara yang ditambang di Sawahlunto. Sejak diresmikan hingga tahun 1913 pelabuhan ini selalu diperbaiki dan dilengkapi sehingga awal abad ini *Emmahaven* dikatakan sebagai pelabuhan pengisian batu bara tercanggih di Asia Tenggara. Kesibukan pelabuhan ini terjadi pada awal abad XX. Sebab pada masa itu terjadi lonjakan hasil berbagai tanaman ekspor Minangkabau. Namun sejak itu dan bahkan setelah kemerdekaan pelabuhan ini diganti nama dengan Teluk Bayur dan tidak lagi pernah memegang peranan penting dalam dunia pelayaran pantai Barat Minangkabau.¹¹

Kereta Api Sumatra Barat Dulu

Pembangunan jalan kereta api yang semula hanya di Sawahlunto kemudian pada awal abad XX dilanjutkan hingga ke Bukittinggi, Payakumbuh dan Suliki. Perluasan jangkauan dan layanan kereta api ini bisa juga dilihat sebagai bagian dari gerakan ke Timur yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda. Karena Payakumbuh khususnya dan kawasan hingga Suliki pada umumnya terletak di timur dari Sumatera Barat.

⁸ Khoirun Nikma, Siti (dkk) *Kereta Apiku Sayang, Kereta Apiku Malang*, Jakarta: Infid, 2008, hlm. 4.

⁹ Tsuyoshi Kato, *op. cit.*, hal. 96.

¹⁰ Gusti Asnan, *Kelok Sembilan, Gerakan Ke Timur, Jalan Raya dan Matahari Sumatera Barat*, (Makalah, Senin, 28 Oktober 2013).

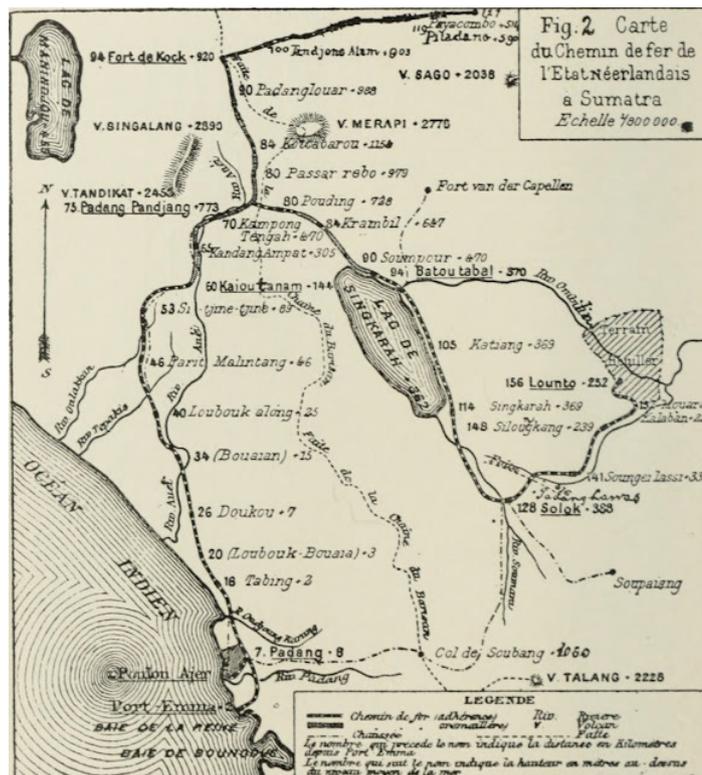
¹¹ Gusti Asnan, *op. cit.*, hal. 71-72.

Hadirnya angkutan kereta api menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah di luar Jawa yang memiliki sarana transportasi terlengkap dan terbaik.

Dari rincian di atas dapat dilihat bahwa Sumatera Barat di Abad XVIII menjadi penting bagi Kolonial Belanda terutama masalah ekonomi yang terdapat di daerah ini. Pertumbuhan perekonomian ini berpusat pada daerah seperti Payakumbuh, Agam, Solok dan Sawahlunto. Oleh karena itu selama paruh kedua abad XVIII pemerintahan Kolonial Belanda mulai melaksanakan konsolidasi kekuasaan dalam masalah ekonomi terhadap wilayah di Sumatera Barat.

Untuk melaksanakan memajukan ekonomi pemerintahan Kolonial Belanda ini, maka yang teramat penting adalah untuk membangun sarana transportasi angkutan jalan darat. Terutama bagi para petugas pajak dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan. Dalam hal inilah kereta api¹² menjadi salah satu alat pengangkut yang dapat diandalkan dalam mencapai maksud tersebut.

Pembangunan rel kereta api di Sumatera Barat dimulai pada tahun 1887. Kereta api di Sumatera Barat menggunakan rel biasa dan rel bergigi yang terbuat dari baja. Rel bergigi ini di pergunakan di daerah pegunungan. Sedangkan untuk memasang rel tersebut menggunakan balok lintang vertikal untuk rel biasa dan balok lintang horizontal untuk rel bergigi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa batu bara adalah salah satu faktor percepatan pembangunan jaringan rel di Ranah Minang. Hanya berselang 12 tahun sejak jaringan rel pertama di Jawa antara Surabaya dan Malang dibangun oleh Perusahaan Kereta Api Negara Hindia Belanda, tahun 1887 jaringan rel kereta api dari Ombilin ke Padang sudah dibangun. Cukup cepat untuk daerah yang jauh dari Batavia.



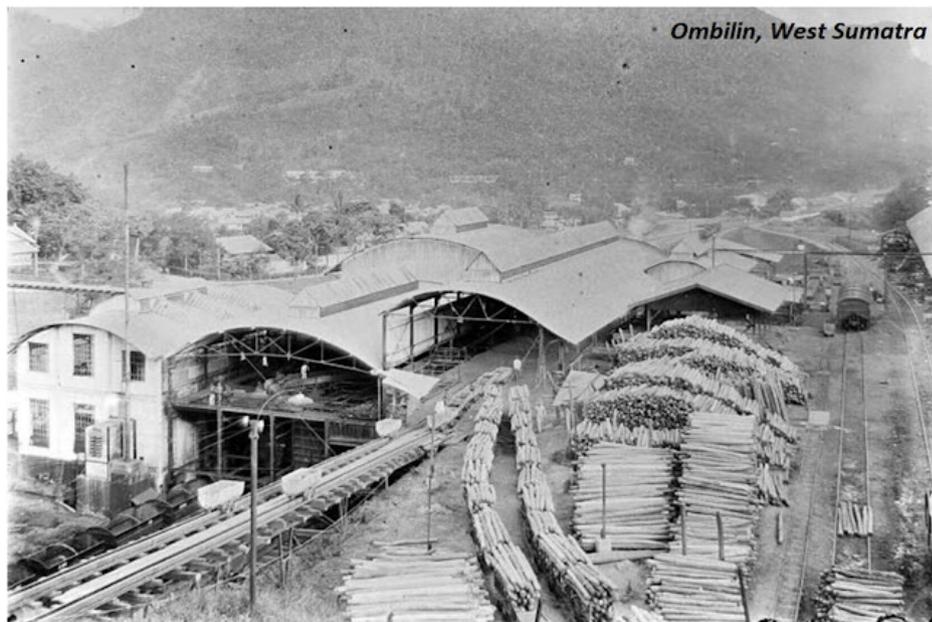
Jaringan rel kereta api di Ranah Minang akhir abad 18
(Sumber: KITLV)

12 Kereta api merupakan alat transportasi yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkai antara satu dengan lainnya). Tim Telaga Bakti Nusantara, Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid I, (Bandung : Angkasa, 1997), hlm. 155.

Pembangunan ini berkaitan dengan pembukaan tambang Batu Bara Ombilin di Sawahlunto yang pertama kali ditemukan oleh De Groot dan De Greve. Dialah orang yang mengatakan bahwa batu bara itu bisa ditambang sekitar tahun 1871. Juga berkaitan dengan pembukaan pelabuhan *Emmahaven* di Teluk Bayur. Penambangan pertama kali dilakukan pada tahun 1892. Kegiatan penambangan dilaksanakan dengan menggunakan buruh kontrak dan buruh lepas. Sedangkan produksi tambang batu bara di masa penjajah mencapai puncaknya pada tahun 1930, yaitu sebesar 1.870.823 ton.¹³

Arsip yang diperoleh dari Stasiun Simpang Haru Padang mengatakan bahwa jaringan kereta api di Sumatera Barat ini, tidak bisa dipisahkan dari rencana Belanda untuk membuat jaringan lintas Sumatera dari Aceh (Kotaraja) sampai ke Lampung (Panjang) Barat ke Timur atau ke Selatan Pulau Sumatera.¹⁴ **Keberadaan kereta api di Sumatera Barat memang didasari oleh adanya tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto yang saat itu cadangan nya cukup potensial.** Alasan inilah yang menyebabkan pemerintahan Belanda untuk membangun kereta api di Sumatera Barat. Sebagaimana yang tertulis dalam arsip Stasiun Simpang Haru Padang yang mengatakan bahwa untuk pengangkutan batu bara dari pertambangan Ombilin haruslah diselenggarakan pembuatan dan pengusahaan (eksploitasi) jalan kereta api oleh Negara/pemerintahan Belanda.¹⁵

Sepanjang pembangunan yang dilakukan oleh Belanda ada pemberhentian pengangkutan batu bara dari Sawahlunto, yaitu Sawahlunto-Solok (28,3 kilometer), Solok-Batu Taba (33,2 kilometer), Batu Taba-Padang Panjang (17,5 kilometer), Padang Panjang-Kayu Tanam (15,5 kilometer), dan Kayu Tanam-Teluk Bayur (57 kilometer).



Ombilin tahun 1894
(Sumber: KITLV)

13 Gusti Asnan, *op. cit.* hal. 36-37.

14 Arsip Stasiun Simpang Haru, *Profil Kereta Api Sumatera Barat*, Padang Tanpa Tahun.

15 Arsip Stasiun Simpang Haru, *Pembangunan Rel Kereta Api Di Sumatera Barat*, (Padang, 12 Oktober 2004), hal. 4-5.

Maka dapat dikatakan bahwa keberadaan perkeretaapian di Sumatera Barat (*Sumatra's Westkust*) tidak terlepas dari kebijakan ekonomi regional pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera Barat pada abad XVIII. Pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda menyusun sebuah proyek pembangunan ekonomi yang lebih dikenal dengan proyek tiga serangkai, yaitu (a) pembangunan Tambang Batu Bara Ombilin (TBO); (b) pembangunan jaringan kereta api; (dan c) pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur.¹⁶

Kebijakan ekonomi tersebut merupakan '*Pilot Project Systemic linkage*' yang maksudnya jika salah satu dari ketiga pembangunan tersebut gagal maka hilangnya fungsi yang lainnya. Karena itu siapapun yang mengerjakannya harus mengerjakan sekaligus. Untuk membangun proyek tiga serangkai ini (Tambang Batu Bara Ombilin, Jalur Kereta Api dan Pelabuhan Teluk Bayur/Emmahaven) sampai tahun 1899 Pemerintah Kolonial Belanda telah mengeluarkan investasi yang mencapai 35.034.000 Gulden. Dalam *Gedenkboek der Staatsspoor en Tramwegen in Nederlandsch Indie 1875-1925* terbitan tahun 1925 (*Buku peringatan kereta Api Pemerintah dan Train di Hindia Belanda 1875-1925*) dituliskan, bahwa pembuatan jalan kereta api di Sumatera Barat dilaksanakan secara bertahap dan bersambung dari tahun ke tahun.

Dapat disimpulkan kalau proyek pembangunan jalan kereta Api dari Pulau Air-Muaro Kalaban secara bertahap terus dilakukan, yaitu:

1. Pembuatan jalan kereta api dari Pulau Air sampai ke Padang Panjang 71 km selesai dalam bulan Juli 1891.
2. Padang Panjang ke Bukittinggi 19 km selesai pada bulan November 1891.
3. Padang Panjang ke Solok 53 km selesai pada 1 Juli 1892.
4. Solok ke Muaro Kalaban 23 km dan Padang ke Teluk Bayur 7 km. Kedua jalur ini selesai pada tanggal yang sama yaitu 1 Oktober 1892.
5. Jalur kereta api dari Muaro Kalaban ke Sawahlunto dengan menembus sebuah bukit berbatu yang kemudian bernama Lubang Kalam sepanjang hampir 1 km (835 meter) selesai pada 1 Januari 1894.¹⁷

Sedangkan pembangunan jalur kereta api Muaro Sijunjung ke Pekanbaru baru direncanakan pada tahun 1920 oleh Belanda. Rencananya adalah ingin menambah jalur kereta api yang akan menghubungkan pantai timur dengan pantai barat Sumatera, yang akhirnya akan meliputi seluruh pulau Sumatera. Rencana pembuatan jalur kereta api ini adalah untuk membawa batu bara ke arah Timur melalui Selat Malaka.¹⁸ Rencana yang dilakukan penjajahan Belanda ini, supaya tambang Batu Bara Ombilin dari Sawahlunto Sumatera Barat diangkut tidak melalui Samudera Hindia lagi. Rencana ini mengingat, karena banyak rintangan perang yang akan dihadapi bila Belanda tetap melalui Samudera Hindia.

¹⁶ Sebagian tulisan pada bagian Pembangunan Rel dan Pengoperasian Kereta Api di Sumatera Barat, diangkat dari Pengantar Pameran Pembukaan dan Peresmian Museum Kereta Api Sawahlunto pada 17 Desember 2005, yang dirangkum Zulfikri dari berbagai sumber yang diperolehnya. Dikutip Dari [http://infid.org/pdfdo/kereta api angkutan massal perintis di Sumatera Barat1374166303.pdf](http://infid.org/pdfdo/kereta%20api%20angkutan%20massal%20perintis%20di%20Sumatera%20Barat1374166303.pdf). Diunduh Pada Tanggal 23 Desember 2013.

¹⁷ [http://infid.org/pdfdo/kereta api angkutan massal perintis di Sumatera Barat1374166303.pdf](http://infid.org/pdfdo/kereta%20api%20angkutan%20massal%20perintis%20di%20Sumatera%20Barat1374166303.pdf). Diunduh Pada Tanggal 23 Desember 2013.

¹⁸ Suwardi, (dkk), *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Riau*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984), hal. 78.



No Loko Kereta Api C 3322 di Pekanbaru Tahun 2014
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Disini dapat diambil kesimpulan kalau kereta api sebagai alat transportasi umum yang mempunyai peranan penting bagi perkembangan ekonomi di Sumatera Barat. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, kereta api digunakan untuk mengangkut penumpang, barang-barang keperluan masyarakat dan hasil bumi, seperti rempah-rempah dari pedalaman Minangkabau untuk dijual di Padang melalui stasiun Pulo Aie, selain itu kereta api juga digunakan untuk mengangkut batu bara dari Sawahlunto ke kota Padang, lalu diangkut ke Eropa melalui pelabuhan Teluk Bayur.¹⁹

Stasiun kereta api Pulo Aie merupakan stasiun tertua di kota Padang, selesai dibangun pada bulan Juli 1891, menghubungkan kota Padang-Padang Panjang, lalu jalurnya disambung hingga Bukittinggi, selesai pada bulan Oktober 1892. Kemudian jalur dari Bukittinggi disambung lagi hingga Payakumbuh, dan selesai pada tahun 1896. Stasiun kereta api Pulo Aie adalah jalur transportasi perdagangan. Sejak berdirinya stasiun ini hingga awal tahun 1980-an, keberadaan stasiun ini menjadi pilihan utama jalur perdagangan di Sumatera Barat.

Kereta Api Sumatra Barat Kini dan Esok

Setelah bangsa Indonesia merdeka, Sumatera Barat khususnya peranan kereta api mulai terkalahkan oleh perusahaan bus. Pendapatan yang hanya dari tambang batu bara dan Semen Padang. Pada waktu tahun 1960-an terjadi pergolakan daerah akibat G 30 S/PKI. Sehingga peranan kereta api sebagai alat transportasi mengalami penurunan. Yati Nurhayati mengatakan ada beberapa faktor penyebab diantaranya adalah kondisi kereta api yang sudah rusak sedangkan orang yang ahli memperbaiki masih berkurang, dan menurunnya produksi batu bara Ombilin.²⁰

19 Irfan, *Kereta Api Wisata di Sumatera Barat 1992-2002*. Skripsi (Padang: Fakultas Sastra Unand, 2005). hlm. 14.

20 Yati Nurhayati, *Sejarah Kereta Api Indonesia*, (Klaten: CV Rizki Mandiri, 2014), hal. 85.

Kemunduran demi kemunduran semakin terlihat jelas dengan berkurangnya angka produksi batu bara pada periode 1961-1965 mencapai 110.000 ton per tahun dan dalam periode 1967-1973 79.000-90.00 ton per tahun. Penurunan ini tentu mempengaruhi keberadaan perusahaan kereta api karena pemasukan yang utama perusahaan dari pengangkutan batu bara.

Selain itu, ada beberapa jalur kereta api dari Bukittinggi – Payakumbuh, Solok-Padang Panjang, Padang Panjang-Kayu Tanam yang tidak berfungsi lagi, sehingga jalur kereta api di Pariaman juga ikut mengalami kerugian sebagai penghubung antar daerah pedalaman dengan Padang sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Pada tahun 1970 angkutan barang kereta api adalah berjumlah 207.613 ton dan penumpang berjumlah 1.250.000 orang maka dalam tahun berikutnya berkurang menjadi 187.071 ton dan barang 810.000 orang penumpang pada tahun 1973. Dari angka – angka ini terlihat penurunan penggunaan kereta api.

Kondisi ini juga diakibatkan oleh pengurangan lokomotif. Pada masa awal kemerdekaan untuk lokomotif bergerigi sebanyak 24 buah pada awal tahun 1970-an hanya dioperasikan sebanyak 6 buah. Hal semacam ini tidak lepas dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Pada tahun 1960-an jumlah bus yang tercatat 1000 unit dan truk 2.360 unit maka pada tahun 1972 tercatat 1.858 bus dan 3.332 truk di tambah sarana dan prasarana lalu lintas yang mulai membaik. Seakan-akan mempertegas persaingan antara kendaraan bermotor dengan kereta api. Kendaraan bermotor menuju kejayaan sedangkan kereta api menuju proses kelumpuhan.

Pada rentang tahun 1970-an sampai tahun 1990 adalah perjuangan perusahaan kereta api untuk tetap hidup. Mempertahankan keberadaan perusahaan ini pemerintah ikut campur dengan melanjutkan kerjasama dengan PT. Semen Padang untuk mengangkut semen. Pengoperasian pada jalur Padang ke Pariaman juga mengalami kerugian hampir tiap tahun. Akan tetapi pada akhir tahun 1977 permintaan batu bara meningkat, untuk itu perusahaan mendatangkan lokomotif baru sebanyak 31 buah guna mengantisipasi persaingan dengan kendaraan bermotor.

Perusahaan kereta api di Sumatera Barat sebagai perusahaan transportasi penumpang dan jasa mengalami pergeseran fungsi oleh kendaraan bermotor. Sehingga pada tahun 1991 kereta api di Sumatera Barat lebih mengutamakan pengangkutan barang. Ditambah lagi pada akhir tahun 2000 batu bara Sawahlunto yang produksinya berkurang, sehingga sebagai imbasnya aktivitas kereta api terhenti. Jika beroperasi hanya mengangkut Semen Padang, dari Indarung ke Pelabuhan Teluk Bayur. Pada tahun 2005, untuk mempertahankan kereta api di Sumatera Barat dibukalah jalur wisata dari Sawahlunto menuju Muaro Kalaban. Sedangkan stasiun kereta api Sawahlunto dialih fungsikan sebagai museum.²¹

Khairul Jasmi mengatakan kalau jalan kereta api sudah mulai ditutup pada tahun 1970-an. Puncaknya penutupan secara keseluruhan terjadi pada tahun 2003. Sehingga lengking peluit karyawan stasiun tak terdengar lagi di pagi hari. Penutupan ini pun memukul hebat bagi karyawan yang bekerja di perusahaan kereta api Sumatera Barat. Kini tinggalah bangunan kokoh dengan rel-rel dingin membelah lurus seluruh Sumatera Barat bersama sejumlah lokomotif dan gerbong-gerbong tua.²²

21 *Ibid*, hal. 85-86.

22 Khairul Jasmi, *op, cit*, hal. 444.

Tempat-tempat dulu yang memiliki sejarah, seperti stasiun, rel-rel kereta api, gua penambangan batu bara, sumur Romusha, tempat tinggal Romusha, rumah sakit bagi Romusha, dapur umum bagi Romusha dan alat-alat yang digunakan oleh Romusha sulit untuk ditemukan. Sehingga peristiwa itu seakan terlupakan saja dalam narasi sejarah. Tetapi masyarakat pun terlihat acuh tak acuh yang seakan membayangkan semua itu tidak ada nilai sejarahnya. Padahal kalau dikaji dalam historisnya, perkeretaapian di seluruh Indonesia tidak lepas dari perjuangan bangsa ini dari masa ke masa. Mulai dari pertama kali kereta api di bawah oleh bangsa Belanda ke negeri ini, masa Jepang, Revolusi dan sampai sekarang di zaman era globalisasi.

Dalam perjalanannya tidak sedikit rakyat yang menjadi korban demi membangun perkeretaapian ini. Walaupun sempat naik turun dalam perkembangan perkeretaapian di Indonesia, namun kereta api tetap menjadi alat transportasi pilihan baik bagi kaum menengah kebawah maupun kaum elit. Artinya, sampai sekarang kereta api di Indonesia masih tetap eksis, di Sumatera Barat khususnya yang saat ini masih aktif dengan keberangkatan dua kali dalam satu hari setiap minggunya yaitu dari Padang ke Pariaman.

Sayangnya, sebagian jalur kereta kini tinggal kenangan. Pembangunan jalan yang begitu gencar telah menggeser kereta api sebagai angkutan utama. Selain itu, masa kejayaan tambang batu bara juga sudah surut. Kini rel kereta banyak yang sudah hilang. Di beberapa ruas rel kereta itu telah tumbuh rumah-rumah penduduk, antara lain jalur Padang Panjang-Bukittinggi, Solok-Padang Panjang, Solok-Muaro Sijunjung. Hanya sisa-sisa jalur rel saja yang masih terlihat. Riwat kehidupannya sekarang menjadi saksi bisu sejarah. Meski demikian, kami tetap akan mengenangnya kalau kereta api di Sumatera Barat di masa jayanya memainkan peranan penting.

Sungguh sedih sekali rasanya karena keadaan jalur kereta api ini sudah tidak terawat lagi, ditumbuhi semak belukar, dan bahkan ditutup pondasi rumah masyarakat. Masih teringat saat saya duduk di kelas empat SD (1990-an), saat pergi jalan-jalan ke Sumatera Barat pasti akan melihat kereta api yang lalu lalang. Jika kereta lewat selalu ku pandangi hingga tidak terlihat lagi, tak jarang orangtua ku membangunkan ku jika aku tertidur di dalam mobil. Ketika itu, kereta api bagi ku merupakan sesuatu yang unik, menarik, dan menimbulkan rasa ingin tahu. Sedih karena hal tersebut kini hanya tinggal kenangan.

Kadangkala jika orang-orang tua di kampung bercerita mengenai pengalaman mereka naik kereta api, aku selalu merasa iri. Mereka benar-benar beruntung. Kata mereka keadaan di dalam gerbong panas dan penuh sesak, gerbongnya terbuat besi. Dari jauh mereka sudah dapat melihat hembusan asap kereta api yang membumbung tinggi, saat mereka yang kala itu masih kanak-kanak sering kali bermain di area stasiun.

Sehingga dari hati selalu bertanya-tanya “*Kenapa kereta api Sumatera Barat tak lagi digunakan di daerah ini?*” berbeda dengan Pulau Jawa yang hingga kini kereta api masih digunakan sebagai sarana transportasi. Sungguh memang aneh, tapi apa adanya itu sudah menjadi takdir untuk tidak lagi bisa mendengar lengkingan peluit karyawan stasiun kereta api. Meskipun tidak beroperasinya lagi kereta api memberikan sebuah hikmahnya.

Sampai saat ini kereta api Sumatera Barat baru hanya 90 kilometer yang telah diaktifkan kembali dari 300 kilometer. Jadi saat ini masih tersisa 210 kilometer yang belum tersentuh untuk di bangkitkan lagi. Lintasan itu dari Teluk Bayur-Padang, Padang-Stasiun Duku, Duku-Bandara Internasional Minangkabau, Duku-Pariaman-Naras dan Duku-Kayu Tanam, Bukittinggi-Payakumbuh dan Padang-Panjang-Solok terus ke Sijunjung. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumbar, Catur Wicaksono kalau saat ini baru 90 kilometer lintasan yang efektif digunakan untuk angkutan orang dan barang.²³

Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi dalam mengaktifkan kembali sebagian jalur kereta api sumbar (khusus jalur Kota Padang - Kota Pariaman) tanggal 15 Feb 2007. Ini merupakan tonggak sejarah aktifnya kembali kereta api di sumbar periode modern ini. Bahkan kini jalur Padang - bandara BIM (sudah beroperasi) dan jalur Padang - Padang Panjang sudah diperbaiki relnya dan akan diaktifkan dalam waktu dekat ini. Pembangunan rel baru sepanjang 4 km menghubungkan Stasiun BIM dan Stasiun Duku hanya memakan waktu 2 tahun, termasuk pembangunan dua stasiun baru tersebut. Adapun, kereta Minangkabau Ekspres menghubungkan pusat Kota Padang menuju BIM dengan melewati empat stasiun, yaitu Stasiun Padang di Simpang Haru, Stasiun Tabing, Stasiun Duku dan Stasiun BIM dengan total panjang 22,8 kilometer.²⁴ Ditambah lagi Stasiun Padang menuju Stasiun Pulau Aie di Sumatera Barat kembali aktif setelah mati alias tidak beroperasi selama 43 tahun. Kementerian Perhubungan menyebut masyarakat sekitar sangat antusias dan senang dengan dibukanya kembali stasiun ini.

Semoga rel kereta api yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Barat bisa diaktifkan kembali seperti semula. Meskipun kegunaannya tidak lagi sama dengan masa dahulu yaitu membawa barang pertanian, pertambangan dan perkebunan. Tapi bisa dialihkan dalam menunjang sektor ekonomi terutama dalam membawa wisatawan untuk menikmati keindahan alam Sumatera Barat yang dilalui oleh rel kereta api.

Oleh karena itu jagalah mereka, lestarikanlah mereka, hidupakanlah mereka kembali supaya pendahulu kita tidak merasa kecewa. Begitu juga di belakang kita tidak merasa benci terhadap kekaburan sejarah yang kita lakukan sekarang. Untuk generasi muda sekarang jangan pernah abaikan sesuatu benda, karena benda tersebut memiliki nilai sejarah. Hal inilah yang diberikan sebatang rel kereta api. Bahkan satu bautnya saja waktu memasangkannya bercucuran darah anak bangsa ini. Tapi inilah yang sangat disayangkan bagi bangsa kita, semuanya suka terhadap hal yang besar-besar sehingga mereka tercatat dalam sejarah. Sebagaimana kata seorang wartawan senior Kami hanya para tukang batu, kalian generasi mudalah yang harus mengukirnya. Sebab pejuang hanyalah meretas jalan ke gerbang emas kemerdekaan, lalu generasi sesudahnya yang harus mengisi. Ribuan Romusha yang namanya tidak tercatat dalam sejarah orang-orang besar, sebab sejarah itu cenderung menjadi "sejarah orang besar". Padahal yang disebut pejuang bukan hanya tentara. "Batang pisang juga bisa" (Khairul Jasmi²⁵).

23 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190617/98/934654/terungkap-penyebab-210-km-lintasan-rel-ka-di-sumbar-mati-suri> Diunduh Pada Tanggal 10 Juli 2021

24 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180530/98/801017/ka-bandara-minangkabau-akhirnya-tuntas-meski-sempat-tak-prioritas> Diunduh Pada Tanggal 10 Juli 2021

25 Khairul Jasmi, *Minangkabau Dalam Reportase, (Kumpulan Feature)*, (Padang: KABARITA, 2014), hal. 489.

Upaya Pelestarian

Dari uraian yang sangat berharga ini membuat hati merasa ibah dan sedih dengan kondisi rel kereta api yang terbujur kaku ini. Seakan mereka benda mati yang dianggap tiada arti. Bagaikan besi berkarat yang tidak memiliki makna oleh bangsa ini. Namun ingatlah, karena kereta api ini kita jadi bangsa industri dan merdeka dari penjajah.

Citra sang kereta api kini seakan terabaikan begitu saja. Hal ini terlihat dengan keadaannya hari demi hari semakin memburuk, memudar, merapuh dan bahkan mau hancur. Kalau mereka tidak kita sentuh tentunya akan punah dimakan waktu. Kalau mereka punah apa kata anak cucu kita diwaktu lalu. Oleh sebab itu dengan adanya undangan menulis dari Buletin Umulolo Volume X Tahun 2021 dengan tema Pelestarian Cagar Budaya ini dapat menyentuh hati semua pihak terhadap pelestarian kereta api yang ada di kawasan Sumatera Barat ini. Baik itu rel, gerbong, dan bahkan stasiunnya sendiri.

a. Peran Pemerintah

Di tulisan ini saya selaku penulis sangat mengharapkan kepedulian pemerintah dalam melestarikan rel kereta api Sumatera Barat ini. Hal ini disebabkan karena seorang pemerintah pasti memiliki ilmu yang lebih dari pada masyarakat biasa. Artinya pemerintah lebih mengetahui tentang apa yang harus dijaga dan dilestarikan, supaya suatu benda yang bernilai sejarah itu tidak lenyap begitu saja.

Sekurang-kurangnya dari pihak pemerintah memberikan arahan pada masyarakat tentang arti penting sebuah rel kereta api dalam sejarah Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan untuk membangun rel kereta api ini menyebabkan banyak nyawa yang melayang. Begitu juga kalau tempat bermain dan naik turun di mesin dan gerbong kereta tersebut merupakan saksi bisu dari kekejaman penjajah dan bahkan bukti kemerdekaan negara Indonesia. PT Kereta Api Indonesia (KAI) kemudian memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan pemasukan dengan cara membuat sistem sewa lahan. Masyarakat yang menggunakan lahan bekas rel kereta api diharuskan membayar uang sewa pada PT KAI. Namun tetap menyisakan ruang untuk bisa menggunakan lahan itu sewaktu-waktu dengan membuat salah satu klausul kontraknya, penyewa lahan bersedia mengembalikan bila sewaktu-waktu dibutuhkan PT KAI. Jangan sampai nanti anak cucu kita akan menilai sikap kita hari ini atas "*kecelakaan sejarah*" yang sekarang sedang terjadi ini.

Namun itulah yang disayangkan dari pihak pemerintah bahkan orang yang duduk di kursi pemerintahan tidak jarang tamatan dari jurusan sejarah dan arkeologi yang memahami betul akan arti sebuah benda masa lalu. Tetapi mereka hanya diam dan tidak mau tahu akan hal ini. Sedangkan mereka sendiri tahu apa akibatnya dari rel kereta api jika punah. Begitu juga manfaatnya kalau kereta api ini bertahan lama dan apalagi kalau beroperasi seperti masa penjajah Belanda.

Salah satu yang harus sentuhan serius dari tangan pemerintah adalah rel kereta api yang ada di Sumatera Barat. Karena kereta api bisa menjadi suatu harapan banyak orang untuk jadi magnet dalam pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata. Disamping itu dengan adanya penyagaan serius, kereta api juga merupakan saksi sejarah masa Kolonial Belanda yang sampai sekarang masih dinikmati.

Karena kalau kita ulas masa jayanya kereta api memainkan peranan penting sebagai sarana transportasi untuk menunjang pendapatan asli daerah. Pengangkut barang dagangan dari daerah pedalaman menuju daerah pinggiran laut (sungai). Sedangkan di masa Penjajah digunakan untuk aksi jitu sebagai pertahanan. Arti kata kalau kereta api ini aktif kembali bisa menambah uang saku (uang khas) Sumatera Barat. Disamping itu dengan keaktifan kereta api akan bisa mengurangi pengangguran di daerah ini. Maka dengan kerendahan hati, buat pemerintah setempat untuk bisa mengaktifkan kembali kereta kita ini. Meski perlu waktu, perlu biaya, perlu pertimbangan dan bahkan perlu merangkak sedikit demi sedikit. Namun kalau serius untuk mengaktifkannya, bisa dikatakan “*mambakik batang tarandam*”.

b. Peran Masyarakat

Disini mungkin kita selaku masyarakat seharusnya sama membahu khususnya terhadap pelestarian rel kereta api Sumatera Barat. Janganlah kita selaku masyarakat merusak, mencopoti, menjual, dan bahkan membangun rumah di bentangan rel kereta api ini. Sangat disayangkan kalau rel ini kita bongkar lalu dijual. Hilang aset sejarah karena ulah kejahilan kita. Namun sebaiknya kita selaku masyarakat harus secepat mungkin melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau ada orang yang mau merusak kereta api ini. Dengan adanya pengaduan seperti ini pihak yang berwajib pasti akan mencari solusi terutama dalam menjaga kehistorisannya.

Tapi kita selaku masyarakat biasa masih beruntung. Terutama kita yang hidup di awal abad XXI ini, karena kita yang tidak membanggunya masih dapat melihat kereta api yang dibawa, yang dibuat oleh pendahulu kita. Sedangkan orang yang membuatnya entah dimana, dan entah bila dia meninggalkan dunia ini. Hingga mencicipi apa yang dibuatnya tidak lama untuk dirasakannya. Bahkan sebagian mereka ada yang pergi dahulu tanpa sedikitpun merasakan terhadap apa yang dibuatnya itu. Keberadaannya saat ini tentunya juga tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat dalam melestarikannya. Dapat dibayangkan kalau kereta api Sumatera Barat ini tidak kita jumpai saat ini. Pastilah akan menjadi sebuah cerita mistik yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Mudahan dengan adanya tulisan ini bisa membuat hati kita tersentuh untuk lebih giat dalam menjaga kereta api ini. Baik itu materialnya stasionnya, relnya, gerbongnya dan alat-alat lainnya. Tapi ironisnya kereta api ini kini hanya tinggal kenangan. Sedangkan di daerah lain, negara lain kereta api mereka tetap beroperasi. Lalu bagaimana dengan kereta api Sumatera Barat saat ini?

Penutup

Kereta api memiliki sejarah panjang di Sumatera Barat, dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan pembangunan jalur Pulau Air ke Padang Panjang yang diresmikan pada 6 Juli 1887. Jalur kereta api itu diteruskan ke Bukittinggi sepanjang 90 kilometer dan dioperasikan mulai November 1891. Jalur kereta itu dibangun guna mengangkut biji kopi hasil tanam paksa dari pedalaman Sumbar seperti Bukittinggi, Payakumbuh dan Pasaman ke Padang untuk kemudian diekspor ke Eropa.

Penemuan batu bara di Sawahlunto oleh W.H De Grave pada 1871 makin memantapkan keinginan Belanda untuk mengembangkan jalur kereta api di Sumbar. Maka rel kereta api dari Padang Panjang menuju Muaro Kalaban sepanjang 56 kilometer pun dibangun dan selesai Oktober 1892. Jalur itu dilanjutkan menuju Sawahlunto pada 1896. Selanjutnya dalam kurun 22 tahun selesailah pembangunan jalan kereta api di Sumbar. Maka dimulailah zaman kejayaan kereta api di Sumbar pada akhir abad ke-19 tersebut hingga pertengahan abad ke-20.

Kereta api tidak hanya sebagai sarana pengangkut barang, tetapi juga transportasi massal. Kejayaan itu mulai mundur pada 1970-an sampai akhirnya sebagian jalur kereta dihentikan operasionalnya pada 1973 karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya. Berkurangnya produksi batu bara pada tambang PT Bukit Asam Ombilin kemudian menyebabkan kereta api jurusan tersebut juga dihentikan operasinya pada 2003. Praktis, jalur yang tertinggal hanya Padang-Pariaman yang difokuskan untuk wisata sehingga berangsur-angsur ingatan masyarakat Minang terhadap kereta api mulai pudar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnan, Gusti, *Kamus Sejarah Minangkabau*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2003
- Jasmi, Khairul, *Minangkabau Dalam Reportase, (Kumpulan Feature)*, Padang: KABARITA, 2014.
- Kato, Tsuyoshi, *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Nurhayati, Yanti, *Sejarah Kereta Api Indonesia*, Klaten: CV Rizki Mandiri, 2014

Majalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- El Qudsi, Mohammad Ichlas, *Memoles Kota Tua*, (84 Views) March 7, 2013 7:15 am, Diunduh Pada Tanggal 11 Maret 2016.
- Febrian, Artikel Andy, *Meriam tua' yang terlupakan di Gunung Padang*. Tanpa Tahun.
- Hardiman, Gagoek, *Meniti Jembatan Siti Nurbaya Dan Menyusuri Kota Padang*, (Artikel edited version" telah dimuat di harian umum Suara Merdeka edisi Minggu tgl 12 Oktober 2008
- Irfan, *Kereta Api Wisata di Sumatera Barat 1992-2002, Skripsi* Padang: Fakultas Sastra Unand, 2005
- Noranda, Alfa, *Hubungan Bangunan Lama Dengan Kota Padang*, Artikel, Sabtu 04 Desember 2010
- Martokusumo, Widjaja, *Mendaur Ulang Kota Tambang Sawahlunto (Beberapa Catatan tentang pendekatan Konservasi dalam Revitalisasi)*, Tanggal 29 November - 2 Desember 2007

Situs-Situs Internet

- [http://infid.org/pdfdo/kereta api angkutan massal perintis di Sumatera Barat1374166303.pdf](http://infid.org/pdfdo/kereta%20api%20angkutan%20massal%20perintis%20di%20Sumatera%20Barat1374166303.pdf). Diunduh Pada Tanggal 23 Desember 2013.
- <https://fotokoleksiku.wordpress.com/ragam-seni-budaya/kota-tua/>. Diunduh Pada Tanggal 11 Maret 2016.
- <http://fatjri.blogspot.co.id/2015/02/kota-tua-padang-sumatera-barat-yang.htm> Diunduh Pada Tanggal 11 Maret 2016.
- <https://blueoctopus13.wordpress.com/2013/04/12/kota-tua-padang-sumatera-barat-yang-terlupakan-pasar-tua/> Diunduh Pada Tanggal 11 Maret 2016
- <http://www.pelangiholiday.com/2013/10/objek-wisata-kota-tuakampung-cina-padang.html> Diunduh Pada Tanggal 11 Maret 2016.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190617/98/934654/terungkap-penyebab-210-km-lintasan-rel-ka-di-sumbar-mati-suri> Diunduh Pada Tanggal 10 Juli 2021

PENGELOLAAN MUSEUM DAN PROGRAM PUBLIK

Yulianty Aliah

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo

yuliantyaliah@gmail.com

"Pandangan yang keliru dari masyarakat terhadap museum adalah (a) merupakan lembaga yang hanya bicara masa lalu; (b) tidak mempunyai dinamika; (c) merupakan tempat menyimpan benda-benda kuno; (d) masyarakat masih belum merasakan manfaat dari kehadiran museum. Museum yang sekarang berorientasi kepada publik telah memperhatikan bagaimana menciptakan pelayanan publik yang memuaskan."

Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak museum yang kondisinya memprihatinkan sehingga kurang diminati oleh wisatawan. Berdasarkan pemberitaan dari *inilah.com* edisi Selasa, 31 Mei 2016, Ketua Asosiasi Museum di Indonesia, Putu Supadma Rudana mengatakan, museum-museum di Indonesia harus segera direvitalisasi untuk menarik minat pengunjung.

"Sebanyak 426 Museum di Indonesia ini sangat membutuhkan perhatian yang komprehensif. Pertemuan ini diadakan untuk membahas dan berdiskusi mengenai masa depan museum agar lebih berkembang 4 dan berkualitas dalam melayani masyarakat dan menjawab tantangan museum di skala internasional." ujarnya.

Di museum, orang bisa menikmati rekreasi sekaligus mendapatkan informasi tentang sains dan peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Menurut Ambrose dan Crispin (2006) pada dasarnya museum ini merupakan sarana untuk mengembangkan budaya dan peradaban manusia. Hal ini menunjukkan bahwa aspek budaya tidak pernah lepas dari pengamatan manusia. Museum ini memainkan kendaraan yang memiliki peran strategis untuk memperkuat identitas masyarakat dan bangsa. Museum ini bisa memberi gambaran tentang peradaban budaya daerah, baik dari zaman purbakala sampai zaman modern. Kesadaran akan identitas masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan budaya dapat tercermin dari antusiasme masyarakat terhadap perkembangan museum. Namun di era globalisasi ini, museum ini jarang dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang beranggapan bahwa mengunjungi museum sudah tua dan membosankan, namun ada begitu banyak manfaat yang bisa didapat dengan mengunjungi museum, mulai dari melihat benda-benda bersejarah secara langsung sehingga bisa mendapatkan gambaran lengkap, dan juga bisa memahami nilai-nilai budaya warisan dari generasi nenek moyang generasi sekarang. Dengan demikian timbul masalah saat sebuah museum tidak bisa menyampaikan informasi dengan benar, sehingga museum tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.

Namun demikian masih ada anggapan yang keliru dari masyarakat terhadap museum. Beberapa anggapan keliru itu adalah (a) Museum adalah lembaga yang hanya bicara masa lalu; (b) museum tidak mempunyai dinamika; (c) museum merupakan tempat menyimpan benda-benda kuno; (d) masyarakat masih belum merasakan manfaat dari kehadiran museum (Modul Pemajuan Permuseuman, 2021).

Menurut Johnson & Sink (2013: 359) dalam penelitiannya yang berjudul “*Ethnic Museum Public Relations: Cultural Diplomacy and Cultural Intermediaries In The Digital Age*”, Museum dilihat sebagai sarana pendidikan yang bersifat massal dan program publik museum tidak hanya sekedar berperan sebagai teknisi dalam membangun audien dengan hanya memfokuskan perhatiannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat atau pengunjung, tetapi juga perlu mengemas informasi yang disampaikan tersebut menjadi lebih menarik dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Museum akan terbengkalai dan bahkan ditutup apabila tidak lagi dikunjungi oleh masyarakat. Seperti misalnya Museum Adam Malik yang diberitakan di media online merdeka.com edisi Rabu, 31 Oktober 2012, telah dinyatakan bangkrut dan ditutup pada tahun 2005-2006, sehingga berdampak pada hilangnya peninggalan purbakala yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain itu, hasil survei Komunitas ‘Jelajah’ (Jejak Langkah Sejarah) yang beritanya dimuat di *kompas.com* edisi Selasa, 28 Mei 2013 menyatakan bahwa dari hasil survei pada 500 responden selama bulan Maret-April 2013 di Jakarta hasilnya memprihatinkan yaitu, dari 68 museum yang ada di Jakarta, masyarakat hanya mengenal 23 museum dan hanya lima museum yang mampu disebutkan namanya dengan benar.

Museum harus aktif dalam menjalin hubungan baik dengan berbagai publik yang memiliki minat aktif atau potensial. Museum mengarahkan program publik untuk memastikan hubungan masyarakat yang efektif dan penting untuk meninjau status hubungan museum dengan masing-masing publiknya serta untuk mendistribusikan informasi dan komunikasi yang membangun kemauan baik (*goodwill*) (Kotler, Kotler, & Kotler, 2008; 384-385). Sehingga, apabila nama sebuah museum tidak dikenal oleh masyarakat maka, minat masyarakat untuk berkunjung ke museum tersebut akan menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, program publik museum harus menunjukkan daya tarik museum agar masyarakat dapat menyadari keberadaan museum sebagai edukasi publik.



Foto 1. Muzium Negara Malaysia
(Sumber : Instagram National Museum of Malaysia
https://www.instagram.com/p/0Ysr2IPTIM/?utm_medium=share_sheet)

Pengelolaan Museum

Pemahaman akan arti dan definisi museum banyak diadopsi dari institusi atau lembaga internasional yang memberikan perhatian khusus pada pengelolaan museum. *The International Council of Museums (ICOM)* misalnya, memberikan definisi museum dengan penekanan pada berbagai aspek yakni museum sebagai institusi yang *non-profit* atau lembaga yang bekerja dengan tidak mencari keuntungan. Pertanyaan seseorang mengenai mengapa pengunjung museum harus membayar ketika akan masuk museum. Alasan yang mungkin dapat diterima adalah ketika suatu museum dikelola oleh swasta, maka sumber pendanaan untuk pengelolaan dan pemeliharaan koleksi adalah dari biaya masuk pengunjung (*entrance fee*). Karena itu, beberapa museum menerapkan pembayaran bagi mereka yang akan menikmati pengalaman berkunjung ke museum. Bagi museum yang dikelola oleh pemerintah, jumlah yang dibayarkan biasanya tidak lebih dari Rp. 5000, jumlah yang tidak terlalu besar bagi pengunjung yang menikmati museum sebagai media belajar dan daya tarik wisata. Dana yang diperoleh dari kunjungan ini sebenarnya sebagai pemasukan yang diperuntukkan bagi pembangunan daerah termasuk untuk pengelolaan museum (Junaid, 2017).

Penekanan kedua adalah bahwa museum merupakan lembaga yang memberikan pelayanan (*service*) kepada masyarakat (publik). Pemberian layanan ini berkaitan dengan pemberian informasi kepada publik khususnya pengunjung mengenai bagaimana kedudukan dan fungsi museum, informasi mengenai koleksi museum serta kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola museum. Pemberian layanan ini tidak terlepas dari peran pengelola (*staf*) museum baik sebagai pemberi informasi maupun sebagai pihak yang mempersiapkan tata pameran koleksi melalui peran kurator.

Dalam menjalankan tugasnya, pegawai atau staf museum melaksanakan pengoleksian, dokumentasi, konservasi koleksi, memamerkan koleksi dan memberikan informasi mengenai koleksi yang dipamerkan. Langkah-langkah tersebut dijalankan dengan prinsip penelitian (*research*) yang memungkinkan mereka mengkomunikasikan nilai atau informasi yang terkandung pada koleksi tersebut. Jadi, ketika melakukan kunjungan ke museum, pengunjung seharusnya memanfaatkan informasi yang ada baik melalui pemandu (*staf*) maupun melalui informasi tertulis yang ada pada tata pameran museum. *ICOM* sebagai organisasi museum dunia memastikan bahwa museum dimanfaatkan oleh publik sebagai media atau tempat pendidikan serta penikmatan bukti material manusia dan lingkungannya.

"A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of people and their environment." (ICOM, 2004)



Foto 2. Ruang Pamer

(sumber:<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171115162721-269-255830/10-museum-paling-populer-di-dunia>)

Publik perlu memahami tipe atau klasifikasi museum. Ambrose dan Paine (2006) mengklasifikasikan museum dari berbagai sudut pandang yang mencakup museum dilihat dari jenis atau klasifikasi koleksi, museum dilihat dari siapa yang mengelola atau menjalankan museum tersebut, museum ditinjau dari cakupan atau lokasi museum tersebut, museum ditinjau dari siapa audiens (*audience*) atau diperuntukkan untuk siapa museum tersebut, serta klasifikasi museum dilihat dari cara koleksi museum dipamerkan atau tata pameran museum.

Dilihat dari jenis koleksinya, museum dapat diklasifikasikan ke dalam tipe atau jenis museum umum, museum arkeologi, museum seni, museum sejarah, museum etnografi, museum sejarah alam, museum sains, museum geologi, museum industri, dan museum militer. Ketika pengunjung melihat koleksi museum, mereka dapat saja melihat berbagai jenis koleksi yang dipamerkan. Jenis koleksi ini akan bervariasi tergantung dari koleksi yang dipamerkan. Jenis koleksi museum dapat terdiri dari koleksi etnografika (koleksi yang berhubungan dengan benda-benda budaya atau antropologi), koleksi numismatika (koleksi yang berhubungan dengan mata uang), koleksi filologika (koleksi yang berhubungan dengan naskah-naskah), koleksi keramologika (yang berkaitan dengan keramik), koleksi biologika (yang berhubungan dengan disiplin ilmu biologi), koleksi historika (yang berhubungan dengan sejarah), koleksi heraldika (yang berhubungan dengan lambang-lambang).

Ditinjau dari segi pengelolaannya, museum dapat dikategorikan sebagai museum pemerintah dan museum swasta. Museum juga dapat dibagi secara spesifik khususnya bagi siapa yang mengelola museum tersebut yakni museum yang dikelola suatu lembaga pendidikan, misalnya universitas, museum mandiri yang dikelola sekelompok orang atau individu (mandiri), serta museum yang dikelola oleh suatu organisasi atau perusahaan. Ditinjau dari segi area pelayanan, museum dapat dikelompokkan ke dalam museum nasional, museum regional (provinsi), museum kota dan museum lokal. Selanjutnya, ditinjau dari segi audiens (audience), museum dibagi ke dalam tiga bagian yakni museum publik atau umum (*general public museum*), museum pendidikan dan museum spesialis (*specialist museum*). Museum juga dapat diklasifikasikan ke dalam museum tradisional, ekomuseum atau *open air museum*, dan museum interaktif.

Benda-benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Peran Museum sebagai lembaga pelestarian warisan budaya bangsa, yang mengkhususkan diri di bidang pelayanan studi dan media pembelajaran, serta sarana rekreasi budaya. Kaitannya dengan masalah alam baik bersifat makro (diluar gedung) maupun yang bersifat mikro (di dalam gedung) sangat diperhatikan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerusakan-kerusakan serta perlindungan benda cagar budaya tersebut.

Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai tata kelola atau tata administrasi (Arikunto, 2010:31). Maka dari itu jika kita berbicara mengenai pengelolaan sebuah museum, secara langsung kita akan terikat dengan fungsi-fungsi manajemen, seperti (Lord & Barry Lord, 2012:47-158): 1) perencanaan, pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; 2) pengorganisasian, penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; 3) penggerakan, untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas; dan 4) pengawasan atau peninjauan kembali kegiatan yang telah berjalan, untuk memastikan apakah pekerjaan yang telah berjalan dengan memuaskan untuk menjamin rencana berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan

Pengelolaan menekankan elemen pendidikan dalam benda cagar budaya karena pemahaman tentang pengelolaan itu lebih efektif dilakukan dengan pendekatan pendidikan yang dapat berupa kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dijelaskan mengenai pengelolaan benda cagar budaya dengan ini kemudian di dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, menjelaskan apa yang dimaksud Pengelolaan.

Upaya terpadu untuk melindungi mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Benda cagar budaya juga memiliki hak untuk dilindungi demi kepentingan generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian arti perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya adalah mengenai objek fisik benda cagar budaya, sebagaimana keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, perlindungan fisik dilakukan karena adanya ancaman proses alam dan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan (*preservation*), konservasi (*conservation*), dan pemugaran (*restoration*). Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan benda cagar budaya dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata, sehingga benda cagar budaya dapat dipertahankan keberadaannya, dikembangkan, dan dimanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi museum yang dapat menjembatani, karena pada dasarnya fungsi museum adalah sebagai sumber informasi budaya dan lembaga pelestarian warisan budaya. Museum merupakan suatu lembaga yang dapat menjembatani informasi yang tersimpan dalam bentuk benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya. Sebagai sumber informasi museum berkewajiban untuk mempublikasikan informasi yang dimilikinya kepada masyarakat luas untuk diketahui dan dimanfaatkan dalam berbagai keperluan hidup.

Untuk mempopulerkan museum sebagai wahana pendidikan generasi muda, para pengelola museum perlu mengedepankan manajemen pengelolaan museum, agar bisa kembali berfungsi dengan baik, disarankan pengelola museum harus bisa mengemas koleksi sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa mendongkrak segmentasi pasar, promosi, serta nilai estetika dan ilmiahnya dengan catatan hendaknya jangan mengganggu fungsi dasar museum sebagai pelestari.

Selain itu, pengelola museum harus mampu menampilkan nilai-nilai unggul koleksi yang tersimpan dan disajikan kepada publik, dan merevitalisasi sistem pengelolaan museum agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman serta kompatibel dengan ekonomi kreatif dan industri pariwisata. "Upayakan pemanfaatan museum sebagai area publik, sehingga pengelola museum dituntut untuk dapat memberikan program dan kegiatan publik yang bernuansa kreatif, menyenangkan dan edukatif.

Perkembangan teknologi yang semakin maju seperti saat ini membuat generasi muda kurang tertarik untuk mengunjungi museum. Banyak alasan di balik ketiadaan antusiasme masyarakat terhadap museum, alasannya adalah mereka lebih tertarik pada teknologi digital. Oleh karena itu, mulai ada digitalisasi dalam penerapannya. **Beberapa museum di dunia sudah mulai beroperasi dan siap menyambut calon wisatawan dengan memanfaatkan teknologi digital.**

Museum-museum di Belanda yang termasuk dalam *National Museum of World Cultures* salah satunya adalah Museum Volkenkunde. Museum tersebut memanfaatkan teknologi digital untuk pembelian tiket. Mereka juga memanfaatkan kode QR untuk mengurangi penumpukan di setiap koleksi yang ada. Kode QR di setiap label koleksi agar pengunjung tidak berkerumun dan bisa membaca informasi terkait koleksi dimana saja.

Sama halnya dengan Muzium Negara di Malaysia, mereka juga berlakukan kode QR bagi masyarakat untuk melakukan registrasi sebelum berkunjung. Melalui kode tersebut, pengunjung akan diberikan kartu bernomor saat berkunjung. kartu tersebut digunakan untuk



Gambar 1. Ilustrasi penggunaan QR untuk museum dan pameran
(Sumber: https://www.google.com/search?q=museum+leiden+penerapan+QR&sxsrif=A0aemvKjRNGyaylq2WAlioAvXrgfxxLWDQ:1631630865198&source=Inms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwizkf_Q2v7yAhWScn0KHR7UAHUQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=600#imgrc=XC0kVzUHH8XTtM)

membatasi kunjungan dalam satu waktu. Selain itu, wisatawan juga dianjurkan untuk *check-in* dengan aplikasi *MySejahtera* sebelum memasuki museum. Sebelumnya, museum di Malaysia memanfaatkan teknologi 3 dimensi untuk memamerkan koleksi museum. Ada 33 koleksi artefak yang dibagikan secara 3 dimensi dan masyarakat dapat melihatnya secara keseluruhan.

Berdasarkan *kompas.com* (8/7/2020), Museum Nasional pun memanfaatkan teknologi tersebut dalam tur di laman *bit.ly/mnivirtual*. Pengunjung laman virtual bisa pilih “*Museum Collections*” untuk melihat beberapa koleksi museum secara 3 dimensi. sebagai contoh, pengunjung bisa memilih Mangkuk Ramayana dan pilih *View on 3D*. pengunjung akan diantar ke laman baru yang menampilkan koleksi tersebut secara 3 dimensi. Melalui laman tersebut, Museum Nasional juga menyediakan penjelasan singkat yang bisa dibaca dan didengar oleh pengunjung lama *virtual*.

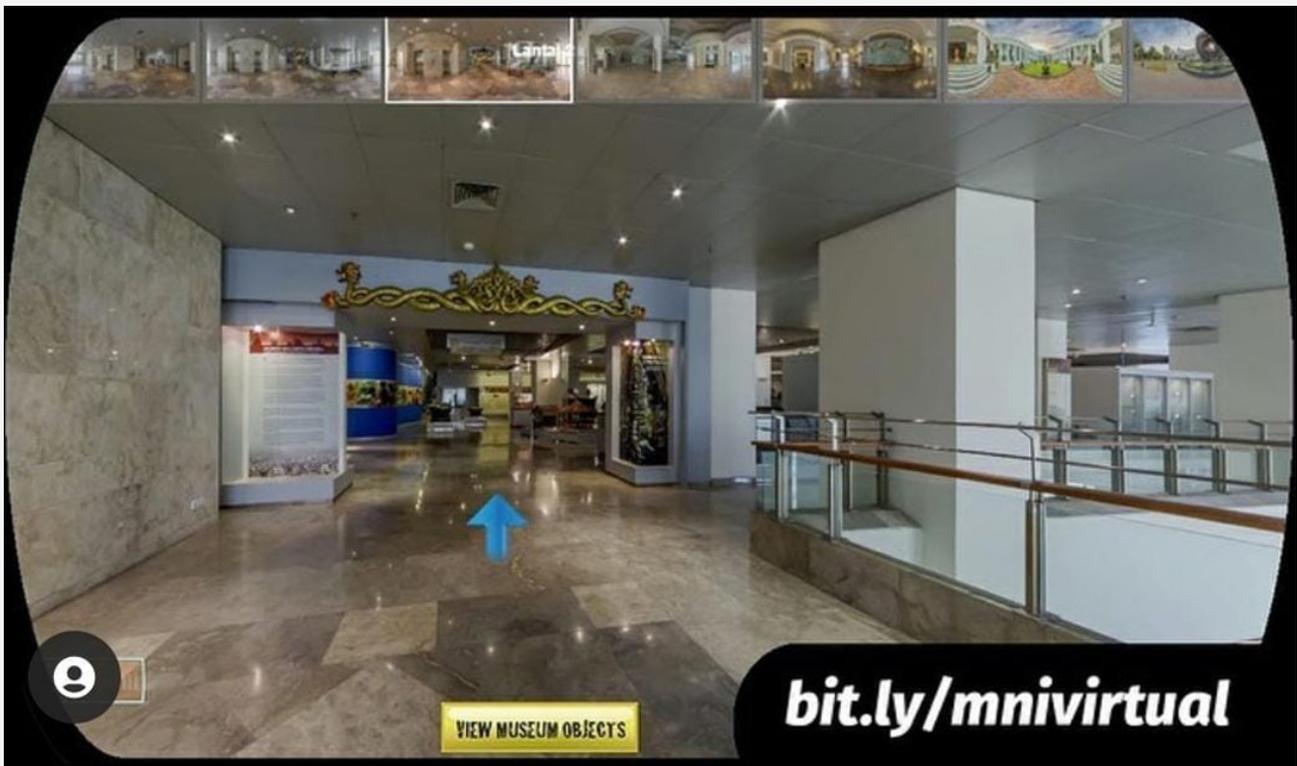


Foto 3. *Virtual Travelling* ke Museum Nasional
(sumber : Instagram Museum Nasional Indonesia www.instagram.com/p/B98SkPAggYc/?utm_medium=share_sheet)

Program Publik

Program publik merupakan salah satu bentuk dari fungsi komunikasi museum selain pameran tetap dan temporer. Komunikasi tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh museum, yang kemudian dikemas dalam bentuk sebuah program. Setiap museum memiliki program publik yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh museum tersebut. Oleh sebab itu, dalam pembentukan dan pengembangan program publik maka harus disesuaikan dengan target pengunjung yang ingin dituju oleh museum.

Sejak museum berorientasi kepada pengunjung, maka museum harus mengetahui keinginan pengunjung agar masyarakat datang mengunjungi museum. Oleh karena itu museum harus memahami kalau museum merupakan tempat pelayanan publik, untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan masyarakat yang berkunjung ke museum.

Museum juga memiliki saingan dalam perkembangannya. Menurut Kotler ada empat saingan museum yang menjadi pilihan masyarakat dalam menghabiskan waktu luangnya yaitu:

- a. Kebiasaan menghabiskan waktu luang di rumah (contoh: menonton televisi, mendengarkan musik, membaca, bermain *games*, berkebun, dan lain-lain).
- b. Kegiatan lain seperti jalan-jalan ke mall, makan malam di restoran, menonton film di bioskop, mengunjungi taman, dan lain-lain.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan lainnya, seperti teater dan konser.

d. Museum-museum lain (Kotler dan Kotler, 2008:166).

Bagaimana museum merespon kebutuhan dan keinginan pengunjung, dan dapat membuat mereka merasa nyaman merupakan satu hal penting yang menjadi pengalaman mereka ketika berkunjung ke museum.

Terkait dengan program publik, museum sebagai satu lembaga pendidikan informal merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh nilai, sikap, keterampilan dan pengalaman belajar sepanjang usia. Pada awalnya museum memberi pelayanan kepada pengunjung masih bersifat konvensional, yaitu program yang diberikan museum hanya berisi ceramah atau diskusi yang disesuaikan dengan kurikulum atau pelajaran di sekolah. Namun kemudian terjadi perubahan dengan dibuatnya macam-macam program edukasi, sesuai dengan perkembangan fungsi museum yang memberikan layanan untuk tujuan pendidikan (*education*), penelitian (*research*) dan kesenangan (*enjoyment*). Sehingga mau tidak mau pihak museum harus bekerja keras dalam merencanakan dan membuat program-program edukasi yang menarik dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang beraneka ragam.

Program publik merupakan salah satu bentuk dari fungsi komunikasi museum selain pameran tetap dan temporer. Komunikasi tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh museum yang kemudian dikemas dalam bentuk sebuah program. Setiap museum memiliki program publik yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh museum tersebut. Oleh sebab itu, dalam pembentukan dan pengembangan program maka harus disesuaikan dengan target pengunjung yang ingin dituju oleh museum.

Mengikuti pandangan Niel dan Philip Kotler (1998), tawaran museum itu mencakup enam unsur. Pertama, tata letak museum itu sendiri yang mencakup aspek desain interior dan arsitektur bangunan beserta ruang-ruang terbukanya. Kedua, koleksi berikut tata pamerannya yang disuguhkan kepada pengunjung. Ketiga, bahan-bahan interaktif seperti label, leaflet dan katalog. Keempat, aneka program museum seperti ceramah, pertunjukan dan kegiatan sosial. Kelima, pelayanan museum seperti penerimaan dan orientasi, kedai makanan, tempat belanja *souvenir* dan ruang bersantai seraya *nongkrong*. Keenam, dan ini tak boleh diremehkan, sampai sejauh mana museum mampu mengatur waktu, aktivitas dan pengalaman pengunjung.

Selepas mencermati keenam unsur itu, lantas pengelola museum mengkomunikasikan museum kepada publik lewat kegiatan kampanye sosial. Sebagaimana yang diutarakan museolog Kresno Yulianto (2013), bahwa kampanye sebagai 'serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada khalayak yang dikerjakan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu'. Terdapat tiga jenis kampanye yang umum, yaitu: (1) Kampanye yang berorientasi pada produk dan lazim dilakukan dalam kegiatan komersial, (2) Kampanye yang berorientasi bagi calon atau kandidat untuk kepentingan kampanye sosial, (3) Kampanye yang berorientasi dan berdimensi perubahan sosial. Kampanye untuk menumbuhkan minat *blusukan* ke museum tergolong jenis kampanye ini.

Kampanye museum idealnya digarap berulang kali, semisal saat musim libur sekolah. Pengurus museum menggandeng penggiat pariwisata dan komunitas terkait menggelar kampanye via media periklanan yang memuat anjuran masyarakat agar tertarik mengunjungi museum. Keuntungannya, program kerja museum lebih terbantu, visi dan misi lembaga museum gampang diwujudkan.

Tak cukup hanya promosi. Persoalan klasik mendera museum di Indonesia, yaitu cara pengelolaan. Bandingkan dengan *British Museum* di Inggris. Mereka tak punya peninggalan budaya yang berarti, kecuali *Stonehenge*, tapi bisa moncer berkat mengoleksi aneka benda budaya berkelas dunia asal Yunani, Mesir, Romawi dan Irak. Produsen film dokumenter seperti *National Geographic Channel* memakai referensi dari *British Museum*. Manajemen pengelolannya yang profesional menginspirasi pengelola museum di banyak negara berkembang. Artefak bangsa lain diperlakukan layaknya milik *si-mbahnya* sendiri. Merawat secara hati-hati serta mempelajarinya dengan sungguh-sungguh.

Tirulah negeri Jepang guna mensukseskan Program Kenali Museum. Secara periodik para siswa di Jepang dibimbing para guru untuk belajar dari museum. Mereka beranggapan museum adalah pusat informasi sejarah peradaban masa lalu. Bentuk museum di Negeri Samurai ini bukan cuma gedung, tapi juga mobil keliling dengan segala kecanggihan teknologinya. Orang percaya kalau bangsa Jepang dapat maju pesat karena tiga hal, yakni guru, museum, dan buku. Peran guru, itulah kunci utamanya. Dengan begitu, para siswa akan terapresiasi dengan baik terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai koleksi museum.

Transformasi digital yang dilakukan oleh beberapa museum seperti museum kehutanan pada pelayanan publik antara lainnya dengan memanfaatkan situs web, akun media sosial dan yang terbaru adalah *virtual tour*. situs web dipakai untuk memberi informasi tentang Museum Kehutanan berupa sejarah, visi, misi dan benda koleksi serta berita terbaru. Museum Kehutanan mempunyai empat akun media sosial untuk peruntukannya berbeda-beda yakni *instagram*, *page facebook*, *twitter* dan *youtube channel*. Akun *instagram*, *page facebook*, *twitter* dipakai untuk konten berupa informasi benda koleksi, infografis, kunjungan mahasiswa magang, kartu ucapan *virtual* dan kegiatan *virtual tour*. Akun *youtube channel* dimanfaatkan untuk menyebarkan video tentang profil Museum Kehutanan, benda koleksi dan linimasa, serta video karya mahasiswa magang.

Virtual tour pada Museum Kehutanan memanfaatkan teknologi komunikasi digital sekaligus media sosial. Teknologi komunikasi digital saat ini memungkinkan menghubungkan pihak museum sebagai narasumber untuk berinteraksi dengan pengunjungnya dalam jumlah besar. Teknologi komunikasi digital yang dimanfaatkan adalah aplikasi *zoom meeting* untuk memfasilitasi *virtual tour*. Sedangkan media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan *twitter* dimanfaatkan sebagai sarana promosi. Raihan dan jangkauan yang ada pada media sosial dimanfaatkan sebagai bahan laporan statistik terkait pengunjung *virtual* atau digital. *Virtual tour* dihadirkan dengan pendekatan yang sama seperti *tour* atau kunjungan tatap muka, yang berbeda hanya menggunakan media teknologi komunikasi digital untuk berinteraksi. Selain poster, pihak Museum Kehutanan juga menyiapkan video, terutama untuk menghadirkan *tour* di *Arboretum* atau Taman Hutan. Hal ini dilakukan karena letak *Arboretum* berada di luar gedung museum dan tidak ada koneksi internet di tempat tersebut.

Penutup

Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum dijelaskan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

Dengan berorientasi pada publik, museum kita harus dikelola lebih baik untuk bisa memenuhi program publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian keberadaan museum sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pusat ilmu pengetahuan yang dapat membangkitkan motivasi, mengembangkan imajinasi serta menciptakan kreativitas dari koleksi yang di informasikannya.

Untuk bisa menjadikan museum seperti tersebut diatas, dibutuhkan bidang yang mengembangkan urusan ini. Bidang tersebut dapat menjadi jembatan ke masyarakat melalui komunikasi yang baik dengan strategi yang bersaing dengan tempat lain, yang berpotensi sebagai pesaing museum. Museum di Indonesia ke depan harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pada masing-masing bidang profesi museum. Menciptakan museum yang mandiri adalah cita-cita bersama untuk menjadikan museum modern dengan visi kedepan

DAFTAR PUSTAKA

- Ambrose, T., & Paine, C. (2006). *Museum basics* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barry, Lord & G. D. Lord. 2012. *Manual of Museum Planning: Sustainable Space, Facilities, and Operations*. Third edition
- Fajar, A. M. (2016, Mei 31). Nasional. Dipetik Maret 1, 2017, dari iniliah.com: <http://m.iniliah.com/news/detail/2299474/jadi-tempat-belajar-museumharus-dilestarikan>
- Ilham, Junaid. (2017) "Museum Dalam Perspektif Pariwisata dan Pendidikan" Sosialisasi Museum 20 November 2017 Museum La Galigo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Provinsi Sulawesi Selatan.
- ICOM. (2004). *Running a museum: A practical handbook*. ICOM: Paris.
- Johnson, M. A., & Sink, W. (2013). Ethnic Museum Public Relations: Cultural Diplomacy and Cultural Intermediaries in the Digital Age. *Public Relations Inquiry*, Vol 2 (3) 355-376.
- Kotler, Philip. (1998) edisi revisi. Jilid I & II, *Manajemen Pemasaran*. Prentice Hall Inc
- Kotler, Philip. (2008). *Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid 2*. Jakarta: PT. Indeks
- Modul pemajuan permuseuman*. 2021. Pelatihan Pembekalan JF-Pamong Budaya Jakarta: Pusat Pelatihan dan pendidikan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Parwito. (2012, Oktober 31). Peristiwa. Diakses Maret 1, 2017, dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/museum-adam-malik-bangkrutprasasti-shankara-dijual-ke-loak.html>
- Utomo, Y. W. (2013, Mei 28). News Sains. (Yunan, Penyunting) Dipetik Maret 1, 2017, dari [kompas.com:http://sains.kompas.com/read/2013/05/28/17532562/Sungguh.Orang.Jakarta.Tak.Kenal.Museum](http://sains.kompas.com/read/2013/05/28/17532562/Sungguh.Orang.Jakarta.Tak.Kenal.Museum)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PEMANFAATAN BANGUNAN KOLONIAL DI KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dewi Susanti

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

dewisusantiarkeo_02@yahoo.com

Pendahuluan

Watansoppeng merupakan salah satu daerah bekas daerah koloni pemerintahan Hindia Belanda, terdapat peninggalan bangunan Hindia Belanda berupa bangunan Vila Yuliana, Istana *Arajang Bola Ridi'e*, Rumah Candu'e (dibongkar tahun 1970), Rumah Botoe bekas rumah *Gezagheber* Soppeng, Pasar Watansoppeng, pasar Tadjoe, *Sauraja* Pattojo, Gereja Bunda Maria dan beberapa bangunan rumah tinggal yang ada di sekitar jalan Merdeka (*Laleng* Benteng). Bangunan-bangunan tersebut sebagian besar ada yang sudah dirobohkan dan digantikan dengan bangunan baru, serta ada beberapa bangunan yang mengalami perubahan fungsi yang awalnya sebagai rumah tinggal kemudian berubah menjadi kantor koperasi, kantor partai politik seperti (PDIP dan PAN) serta beberapa bagian bangunan juga mengalami perubahan baik dari bagian atap, lantai bahkan ada penambahan bangunan pada bagian badan bangunan.

Keberadaan bangunan Kolonial di Kabupaten Soppeng banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal khususnya bangunan-bangunan yang memang diperuntukkan sebagai rumah tinggal seperti di jalan Merdeka, dan di *Sauraja* Pattojo. Beberapa bangunan rumah tinggal juga dimanfaatkan sebagai kantor partai politik seperti partai PAN, dan PDIP. Disisi lain, ada juga bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha seperti kantor koperasi dan ada juga yang dimanfaatkan sebagai gedung perkantoran oleh pemerintah (PEMDA). Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (*stakeholder*) ini cukup bervariasi dan berbagai macam kepentingan. Berbagai jenis pemanfaatan yang dilakukan terhadap bangunan Cagar Budaya tersebut ada yang berdampak negatif terhadap bangunan kolonial yang ada di Kabupaten Soppeng. Untuk mengurangi pemanfaatan bangunan yang berdampak negatif sebaiknya *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah (Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, PEMDA Kab. Soppeng, dan Balar Makassar), akademisi, LSM dan masyarakat. *Stakeholder* khususnya masyarakat setempat harus berperang aktif dalam menjaga kelestarian bangunan kolonial yang ada di lingkungan mereka.

Mengingat bahwa masyarakat adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Hal ini mengarahkan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip perencanaan, seperti pendekatan sistem untuk mengembangkan interaksi sinergi antar *stakeholder*. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang sedang *trend* dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menurut Chambers (1995 lihat juga Wibowo, dkk, 2003: 6) mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat "people-centered,

participatory, empowering, dan sustainable". Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tinggal di sekitar cagar budaya. Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan masyarakat melalui upaya-upaya pelestarian Cagar Budaya. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ada hal utama yang harus dilakukan yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Titik tolaknya pada pengenalan bahwa setiap manusia (masyarakat) memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang tepat untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk memperkuat potensi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tinggalan Benda Cagar Budaya diperlukan langkah-langkah yang nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Pemberdayaan ini bukan hanya meliputi penguatan individu masyarakat, tetapi juga pranata-pranata. Menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggungjawab yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan tersebut. Upaya tersebut harus didukung dengan pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pelestarian Cagar Budaya serta peranan masyarakat di dalamnya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan setiap upaya yang akan dilakukan merupakan unsur yang penting.

Konsep ini memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan ekonomi. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari hal-hal yang antara lain oleh Friedman (1992 dalam Wibowo, dkk, 2003:7) disebut *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality, and intergenerational equity*".

Menurut Cleere (1990), sumber daya budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ideologik, akademik dan ekonomik (Cleere, 1990: 5-10). Merujuk pada pendapat tersebut, jelas bahwa pemanfaatan sumber daya budaya mencakup beberapa kepentingan dari berbagai *stakeholder*. Beragamnya kepentingan dari berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya budaya merupakan permasalahan tersendiri yang dapat berujung pada benturan kepentingan. Benturan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya budaya umumnya disebabkan oleh ketidaksamaan persepsi dan pemberian makna terhadap benda warisan budaya (Anom, 1996). Pemanfaatan sumber daya budaya sering memberi dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah munculnya keinginan masyarakat untuk memberi perhatian kepada sumber daya budaya sehingga muncul kesadaran untuk melestarikan dan memanfaatkannya. Dampak negatif akan muncul seiring dengan pemanfaatan sumber daya yang sangat eksploitatif (Prasodjo, 2004: 4).

Agar pemanfaatan sumber daya budaya tidak hanya bertujuan untuk eksploitasi dan ekonomis saja, maka diperlukan pemahaman terhadap aspek yuridis, aspek arkeologis, serta aspek manajerial (Haryono, 2003:2). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya budaya perlu ada asas keseimbangan sehingga tidak terjadi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber daya tersebut (Haryono, 2005: 5).

Menurut Donald G. MacLeod 1977 dalam Tanudirjo 2005, usaha pelestarian tidak akan berhasil tanpa melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat adalah pihak yang berdaulat dan memegang hak atas pelestarian sumber daya Budaya (Tanudirjo, 2005:1). Melihat kondisi pemanfaatan bangunan kolonial yang ada di Kabupaten Soppeng, maka ada beberapa hal yang ingin diketahui yaitu.

1. Mengidentifikasi kondisi aktual (*existing*) bangunan-bangunan kolonial yang ada di kabupaten Soppeng, terkait dengan pemanfaatan bangunan, interaksinya dengan masyarakat, dan pengunjung.
2. Dapat memetakan kendala-kendala yang terjadi terhadap pelestarian dan pengelolaan bangunan kolonial yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Soppeng.
3. Merekomendasikan langkah-langkah penanganan setelah teridentifikasi beberapa permasalahan (*problem solve*).

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tiga cara yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara.

a) Studi Pustaka

Studi pustaka yang dimaksudkan adalah penelusuran untuk mendapatkan data serta informasi dari berbagai sumber baik berupa laporan, buku, makalah, tesis, skripsi, dan artikel-artikel baik dari sumber internet maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b) Observasi/ pengamatan

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati bangunan kolonial yang ada di kota Watansoppeng dan di daerah Pattojo, dan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan keterancaman bangunan kolonial dan lingkungannya. Pengamatan dilakukan baik berupa pemanfaatan bangunan, penambahan bangunan, aktivitas penduduk (pemilik rumah), dan pengunjung. Observasi ini dilakukan dengan membuat catatan (deskripsi) dan memotret kondisi bangunan serta perubahan yang terjadi pada bagian-bagian bangunan.

c) Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan data yang belum terhimpun dalam pengamatan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, cenderung tidak formal, bersifat mendalam, dan dapat dikembangkan oleh peneliti sendiri. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat yang menempati bangunan dan yang bermukim di sekitar kawasan kota lama di Watansoppeng.

2. Analisis Data

Analisis data meliputi analisis bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Pada bagian analisis ini dilakukan identifikasi mengenai jenis-jenis pemanfaatan yang dilakukan terhadap bangunan kolonial yang ada di kawasan kota tua Watansoppeng dan di Pattojo. Analisis mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik pada fungsi bangunan, perubahan bentuk fisik bangunan maupun perubahan fungsi bangunan.

Gambaran Singkat **Kabupaten Soppeng**

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 1500 km². Kabupaten Soppeng terdiri dari delapan kecamatan yaitu Lalabata, Liliraja, Lilirilau, Marioriwawo, Marioriawa, Ganra, Citta dan Donri-donri. Kabupaten Soppeng dengan Ibukota Watansoppeng berada dalam wilayah Kecamatan Lalabata yang terletak pada sebelah timur Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang dimiliki kabupaten ini cukup bervariasi mulai dari zaman peninggalan prasejarah sampai pada zaman kolonial. Kabupaten Soppeng dapat dicapai dengan tiga jalur yaitu melalui jalur Camba (Kabupaten Bone) dan jalur Bulu Dua (Kabupaten Barru) ± 174 km, dengan waktu tempuh tiga hingga empat jam, serta dapat juga dijangkau melalui Kotamadya Parepare ± 240 km, dengan waktu tempuh lima hingga enam jam. Secara administratif Kabupaten Soppeng memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Wajo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru. Lokasi yang jadi sasaran dalam penulisan ini terdiri atas dua yaitu di kecamatan Lalabata dan kecamatan Liliraja.

Kondisi Bangunan Kolonial di **Kabupaten Soppeng**

1. **Kendala Pelestarian Bangunan Kolonial**

Memetakan kendala-kendala yang terjadi terhadap pelestarian dan pengelolaan bangunan kolonial yang ada di Kabupaten Soppeng. Setelah melakukan observasi selama beberapa hari maka diperoleh data atau informasi mengenai kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pelestarian dan pengelolaan bangunan kolonial yang ada di kabupaten Soppeng yaitu:

- a. Dari sekian banyak bangunan kolonial yang ada di kabupaten Soppeng, baru satu bangunan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya yaitu **Villa Yuliana**, sedangkan bangunan yang lain belum ada perlakuan sama sekali baik dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Soppeng maupun dari pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.
- b. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemilik atau pengelola dari bangunan kolonial, mengenai pentingnya bangunan yang ditempati atau dikelola. Sehingga pemilik dari bangunan atau pengelola hanya melakukan perawatan atau pelestarian bangunan sebatas kemampuan dan pengetahuan mereka.
- c. Dengan tidak adanya penetapan sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah terhadap bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal atau yang dikelola, maka mereka dengan mudahnya melakukan perubahan baik bangunan maupun fungsi dari bangunan tersebut.

2. **Pemanfaatan Bangunan Kolonial**

Perubahan fungsi bangunan dapat kita lihat pada bangunan-bangunan kolonial yang ada di kabupaten Soppeng yaitu.

a. **Villa Yuliana**

Pada tahun 1996, bangunan Villa Yuliana masih berada di bawah penanganan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan telah dilakukan pemugaran pada bangunan tersebut. Kemudian, pada tahun 1998 didaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya dengan nomor registrasi 448, di bawah penanganan Suaka

Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada tanggal 2 Mei 2000 dilakukan pemugaran, pembuatan pagar keliling bangunan sekitar 200 m², pemasangan papan larangan, penempatan juru pelihara situs dan studi pemintakatan dengan SK-Nomor: 213/C.1/M/2000 (Khatimah, 2002: 32) oleh BP3 Sulawesi Selatan, Tenggara dan Tengah. Pemugaran yang dilakukan antara lain mengganti bahan konstruksi atap dari sirap ke asbes gelombang, sebagian besar balok pada rangka atap, dan cat dari hijau ke merah tua. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 150/M.3/ST/UPT/BD/28.1/2003 Tanggal 28 Januari 2003, BP3 Sulawesi Selatan, Tenggara dan Tengah melakukan pendataan kerusakan dan pendokumentasian gambar pada bangunan Villa Yuliana dalam rangka pemulihan arsitektur dan pelestarian bangunan (Agustono, 2003). Kemudian, bahan konstruksi atap, baik penutup maupun rangka atap dikembalikan pada keadaan semula, begitupun dengan warna cat.

Bangunan Villa Yuliana telah beberapa kali berubah fungsi. Menurut A.Wanua Tangke (2007: 90) dan Adam Musa (dalam Khatimah, 2002: 31), pada masa pendudukan Belanda, bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat menginap dan peristirahatan pejabat pemerintah Hindia Belanda. Pananrangi Hamid (2001: 237) berpendapat bahwa, Villa Yuliana merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina beberapa saat setelah kelahiran putrinya Yuliana, sebagai simbol penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Soppeng kepada Pemerintah Hindia Belanda, yang juga pernah digunakan sebagai kediaman resmi kontrolir Soppeng pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara menurut Hamruddin Laide (Wawancara, 29-09-2014), tahun 1909 hingga 1942 bangunan Villa Yuliana difungsikan sebagai markas Pemerintah Hindia Belanda.

Hamruddin Laide (Wawancara, 29-09-2014) menuturkan pula bahwa, pada masa selanjutnya saat Soppeng dikuasai oleh tentara Jepang (1942–1945) Villa Yuliana difungsikan sebagai markas tentara Jepang. Kemudian pada tahun 1945 hingga 1957, villa kosong. Setelah tahun 1957 hingga 1992 villa difungsikan sebagai rumah tinggal oleh penduduk setempat. Khatimah (2002: 32-33) dalam laporan penelitiannya menulis, pada tahun 1992 hingga 1995 bangunan Villa Yuliana difungsikan sebagai asrama pegawai bujang Pemda, Polisi, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pada tahun 2001 bangunan Villa Yuliana dipergunakan oleh sebuah sanggar seni di Kabupaten Soppeng sebagai tempat latihan. Kemudian sejak awal tahun 2002 bangunan ini tidak difungsikan lagi. Kini, bangunan Villa Yuliana difungsikan sebagai Museum Daerah Latemmamala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Soppeng, sejak diresmikan pada tanggal 23 Maret 2008 (<http://sejarah.kompasiana.com>, 10-10-2014).

b. Rumah Tinggal di Jalan Merdeka No. 29

Bangunan rumah tinggal ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan fungsi. Perubahan bangunan dapat kita lihat dan temukan pada bagian garasi dimana pada awalnya tempat tersebut difungsikan sebagai tempat penyimpanan kendaraan dari si pemilik rumah, namun seiring dengan tingkat kebutuhan dari si pemilik rumah dan tidak adanya pengetahuan mereka tentang pentingnya mempertahankan keaslian bangunan yang mereka miliki, maka sejak tahun 2005 bangunan garasi kemudian diubah atau difungsikan sebagai tempat tinggal dari penjaga rumah tersebut. Selain itu. Untuk bangunan utama atau rumah tinggal yang awalnya masih tetap difungsikan sebagai tempat tinggal dari si pemilik rumah namun pada tahun 2005 kemudian rumah tersebut disewakan pada orang yang dan mulai pada tahun 2008 rumah tersebut dijadikan sebagai kantor koperasi Marga Mulya.

Namun secara umum berdasarkan dari hasil survey dan pengumpulan data yang telah dilakukan selama kegiatan pemagangan ini maka diketahui bahwa pada umumnya bagian atap dari keseluruhan bangunan kolonial yang ada di kabupaten Soppeng telah mengalami perubahan (pergantian) yaitu dimana pada awalnya atap dari bangunan-bangunan tersebut menggunakan bahan sirap atau genteng namun sekarang atap dari bangunan tersebut telah diganti dengan menggunakan atap seng. Bangunan yang sampai saat ini tidak menggunakan atap seng adalah bangunan Villa Yuliana akan tetapi atap dari bangunan tersebut juga telah dilakukan pergantian dari bahan aslinya.



Gambar 1. Bangunan Rumah No. 29 yang awalnya sebagai tempat tinggal. Sekarang difungsikan sebagai kantor koperasi Marga Mulya.
(Sumber: Dok. Dewi Susanti, 2014)

Sedangkan untuk perubahan bentuk bangunan dan penambahan fasilitas pada bangunan kolonial yang ada di Kabupaten Watansoppeng dapat kita lihat sebagai berikut:

c. Rumah Tinggal di jalan Merdeka
a. Rumah Tinggal No. 29

Perubahan bangunan yang terjadi pada bangunan rumah tinggal ini yaitu pada awalnya bangunan ini memiliki sebuah garasi yang difungsikan untuk menyimpan kendaraan, namun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan saat kegiatan magang, diketahui bahwa garasi yang awalnya difungsikan sebagai penyimpanan kendaraan sudah diubah menjadi sebuah kamar atau tempat tinggal oleh si penjaga rumah. Sehingga halaman depan rumah ini dimanfaatkan sebagai tempat parkir dan atap dari bangunan ini juga telah diganti dengan menggunakan seng.

b. Rumah Tinggal No. 26

Perubahan yang terjadi pada rumah ini yaitu dapat kita lihat pada bagian atap yang telah menggunakan seng, dan bagian lantai yang sudah diganti dengan menggunakan keramik serta warna cat dari bangunan ini juga sudah diganti menjadi warna krem yang mana awalnya warna cat bangunan ini berwarna coklat tua. Penambahan fasilitas yang dilakukan pada rumah ini yaitu dapat kita temukan pada bagian teras dan pada bagian belakang, tepatnya di bagian dapur.



Gambar 2. a) Bagian atap yang sudah diganti dengan seng. b) Bagian lantai yang diganti dengan keramik, c) Penambahan bangunan pada bagian dapur, d) Penambahan bangunan pada bagian teras. (Sumber: Dok. Dewi Susanti, 2014)

c. Rumah Tinggal No. 7

Perubahan yang terjadi pada bangunan rumah tinggal ini yaitu pada bagian atap yang telah diganti dengan menggunakan seng, sedangkan penambahan bangunan yang dilakukan yaitu pada bagian teras dan pembuatan pagar keliling.



Gambar 3. a) Bagian atap yang diganti dengan seng. b) Tambahan bangunan pada bagian teras, c) Pagar
(Sumber: Dok. Dewi Susanti, 2014)

d. Gereja Katolik (Bunda Maria) berada di Jalan Kayangan

Perubahan yang terjadi pada bangunan dan lingkungan Gereja Katolik (Bunda Maria) ini dapat kita lihat dan temukan yaitu bagian depan, dan lantai dua bangunan yang diubah menjadi tempat istirahat dan penambahan pada bagian teras, serta penambahan bangunan yang tidak teratur seperti ruang informasi, rumah tinggal untuk pastor, gudang, aula untuk peziarah, kamar mandi (wc), garasi yang. Perubahan-perubahan yang terjadi pada bangunan Gereja Katolik (Bunda Maria) ini dapat kita lihat pada foto berikut.



Gambar 4. Kondisi Gereja tahun 1968



Gambar 5. Kondisi bangunan Gereja tahun 1978



Gambar 6. Kondisi Bangunan Gereja tahun 2014
(Sumber: Dok. Dewi Susanti, 2014)

e. Istana (Sauraja) Pattojo

Perubahan yang terjadi pada bangunan ini yaitu pada bagian atap yang awalnya menggunakan sirap kemudian pada tahun 2011 diganti dengan menggunakan atap seng dan warna cat juga telah mengalami perubahan.



Gambar 7. Istana (Sauraja) Pattojo yang mengalami perubahan pada bagian atap
(Sumber: Dok. Dewi Susanti, 2014)

Rekomendasi Upaya Penanganan

- a. Melihat semua kondisi dan kendala serta bentuk pemanfaatan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha terhadap bangunan kolonial yang ada di Kabupaten Soppeng, hasil yang diperoleh atau hal yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah baik pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar adalah melakukan pendataan yang kemudian melakukan penetapan sebagai cagar budaya dari bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Soppeng. Setelah dilakukan penetapan sebaiknya penelitian tetap dilanjutkan yaitu berupa studi kelayakan, studi teknis, zonasi, dan konservasi yang meliputi konservasi lingkungan dan konservasi bangunan, serta dilakukan juga pemugaran.
- b. Untuk mengantisipasi setiap perkembangan pembangunan fisik dan pemanfaatan lain yang terjadi pada bangunan dan lingkungan sekitar bangunan kolonial yang ada di kabupaten Soppeng, agar dapat tetap menjaga keberadaan dan kelestarian dari bangunan tersebut serta tidak berdampak negatif terhadap objek dan lingkungannya, maka bangunan kolonial beserta lingkungannya harus dimasukkan dalam pengembangan untuk penentuan rencana umum tata ruang daerah.
- c. Setiap kegiatan pemanfaatan yang berlangsung di sekitar situs terlebih dahulu harus dilakukan studi AMDAL yang melibatkan instansi yang berwenang dalam hal perlindungan Cagar Budaya.
- d. Perlu adanya persamaan persepsi dan koordinasi dengan instansi terkait akan pentingnya pelestarian Cagar Budaya, sehingga dalam pemanfaatannya dapat diseimbangkan antara kepentingan pelestarian dan kepentingan pemanfaatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustono, dkk. 2003. Laporan Pendataan Kerusakan dan Pengembangan Situs Bangunan Villa Yuliana di Kabupaten Soppeng Tahun 2003. Makassar; Balai Pelestarian Purbakala Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara (tidak terbit).
- Cleere, H. F. 1990. "Introduction: The Rationale of Archaeological Management, dalam H. F. Cleere (ed), *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London: Unwin-Hyman.
- Heryanto, Bambang. 2011. Roh dan Citra Kota: Peran Perancangan Kota Sebagai Kebijakan Publik. Surabaya: Brilian Internasional.
- Khatimah Khusnul. 2002. Pengelolaan Villa Yuliana di Watansoppeng kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Makassar; Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Ramli, dkk. 2000. Laporan Studi Teknis Pemintakatan Situs Villa Yuliana di Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng tahun 2000. Makassar; Balai Pelestarian Purbakala Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara (tidak terbit).
- Mohammad Natsir, dkk. 2009. Potensi Kepurbakalaan Kabupaten Soppeng, Makassar: Balai Pelestarian Purbakala Makassar.
- Pearson, Michael dan Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Adiministrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Savitri, Andi Dian. 2007. Situs-Situs Kerajaan Soppeng di Kabupaten Soppeng (Analisis Arkeologi Keruangan). *Skripsi*. Makassar Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Tangke, Andi Wanua dan Nasyaruddin Anwar. 2007. Orang Soppeng Orang Beradab: Sejarah, Silsilah Raja-Raja dan Objek Wisata Makassar; Pustaka Refleksi.

DARI PENDATAAN HINGGA KAJIAN PENGEMBANGAN: RAGAM KEGIATAN BPCB PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021

Fitra

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo

fitranadja@gmail.com

"Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Pelestarian dalam cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya."

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Gorontalo adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. BPCB Gorontalo sebagai UPT yang memiliki tanggung jawab dalam pelestarian berperan penting dalam melakukan upaya pengelolaan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui peningkatan potensi, informasi, serta promosi Cagar Budaya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Upaya-upaya pelestarian telah dijelaskan dalam Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Disebutkan upaya pelestarian mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Upaya perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Upaya pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian. Sedangkan upaya pemanfaatannya adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Selama tahun 2021, BPCB Gorontalo telah melakukan beberapa upaya pelestarian cagar budaya di beberapa objek/situs. Upaya-upaya tersebut terbagi-bagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau program kerja yang telah direncanakan. Berikut ulasan beberapa program kerja BPCB Gorontalo yang telah dilaksanakan.

1. Pendataan Objek Diduga Cagar Budaya di Kab. Bone Bolango

Pada bulan Maret 2021, BPCB Gorontalo melaksanakan kegiatan berupa pendataan objek diduga cagar budaya di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini merupakan kegiatan kali kedua yang dilakukan oleh BPCB Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango. Sebelumnya pada tahun 2011 telah dilakukan pendataan/

inventarisasi cagar budaya di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Bone Bolango dan diperoleh sebanyak 19 data cagar budaya (cb) dan objek diduga cagar budaya (odcb). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 26 Ayat (1) pencarian objek diduga cagar budaya, dalam ayat tersebut menjelaskan pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. Berdasarkan hal, BPCB berkewajiban mencari odcb yang tersebar di wilayah kerjanya.

Kegiatan pendataan kali ini dikhususkan di wilayah Kecamatan Pinogu, salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara. Keadaan lingkungan topografi wilayah Pinogu berada di daerah pegunungan, untuk bisa mencapai wilayah tersebut harus melalui medan yang cukup sulit dan hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan motor yang telah dilakukan penyesuaian dengan lingkungan medan. Lama perjalanan memerlukan waktu 4-5 jam. Berdasarkan informasi dari masyarakat, BPCB Gorontalo yang beranggotakan 4 orang dibantu 2 orang penduduk setempat melakukan pencarian objek diduga cagar budaya dengan menyusuri sungai dan kawasan hutan lindung. Perlu diketahui kawasan Pinogu sebagian besar berada atau masuk dalam wilayah hutan lindung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, sehingga untuk bisa mengakses atau melakukan pencarian di kawasan hutan lindung harus berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone terlebih dahulu.

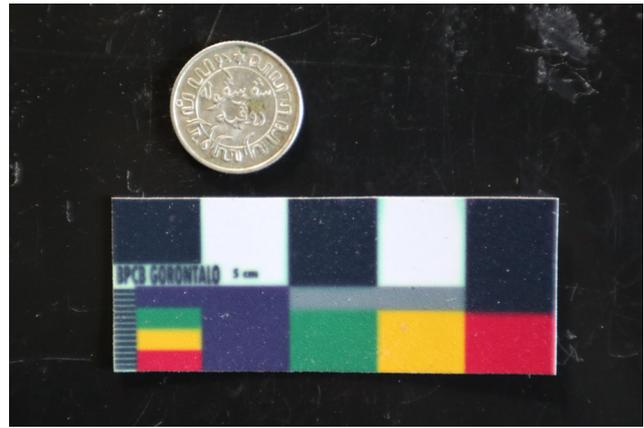
Dari hasil pendataan, diperoleh beberapa temuan odcb berupa dugaan perkampungan tua yang bernama kampung Sinondoo. Menurut penuturan masyarakat, Sinondoo merupakan perkampungan tua yang dulunya dihuni oleh masyarakat Pinogu saat ini. Secara administratif Sinondoo berada di Desa Dataran Hijau, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, dengan posisi astronomis S 00°29'44.49", E 123°29'10.8" dengan ketinggian 311 mdpl. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan beberapa temuan yang diperoleh di lokasi menunjukkan terdapat indikasi aktivitas manusia di masa lalu di Sinondoo. Temuan berupa dugaan lumpang batu, cawan pelebur logam, botol-botol belanda, serta koin belanda memperkuat dugaan tersebut. Dari cawan dan botol milik belanda juga menunjukkan adanya aktivitas pertambangan dari orang-orang Belanda di wilayah Pinogu dahulu. Namun, setelah dilakukan pencarian bekas tambang belanda tidak ditemukan seperti pengakuan dari masyarakat yang menyebutkan dulunya di daerah tersebut terdapat tambang Belanda.



Foto 1. Lumpang Batu
(Sumber: Dokumentasi BPCB)



(a)



(b)

Foto 2 dan 3. Cawan Pelebur Logam (a), dan Koin Belanda (b)
(Sumber: Dokumentasi BPCB Gorontalo)

2. Layanan Informasi Digital Quick Response (QR) dan Virtual Reality (VR) Situs Cagar Budaya Pendaratan Soekarno di Gorontalo

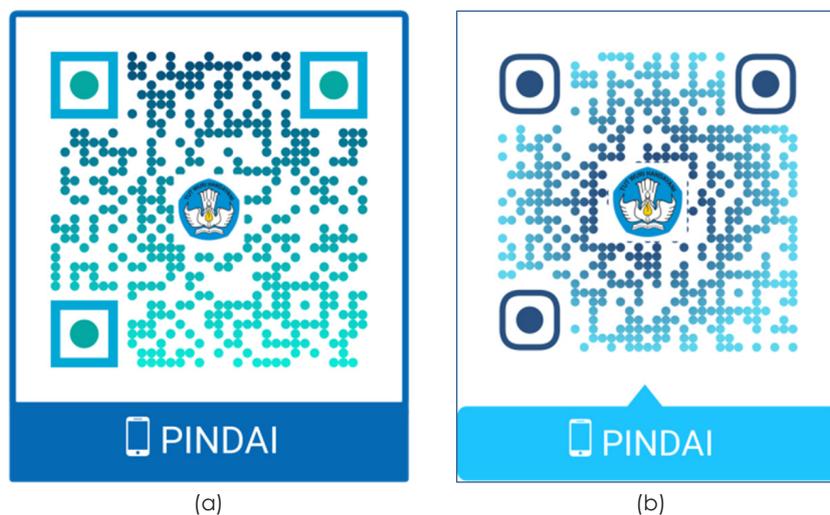
Pesatnya perkembangan teknologi belakangan ini membuat informasi begitu mudah untuk diperoleh. Dengan memakai gawai dan dukungan akses internet, orang-orang dengan mudah dapat mengakses informasi yang diinginkan. Penggunaan gawai juga semakin meningkat, keseharian orang-orang lebih banyak menggunakan gawai dalam bekerja atau hanya menghabiskan waktu senggang. Melihat perkembangan tersebut, BPCB Gorontalo berinisiatif mengembangkan suatu pola pelayanan informasi cagar budaya berbasis digital yang bisa diakses dimana saja sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi cagar budaya. Untuk itu pada akhir Mei 2021 BPCB Gorontalo meluncurkan sebuah platform layanan informasi Digital Quick Response (QR) dan Virtual Reality (VR) Situs Cagar Budaya Pendaratan Soekarno di Gorontalo. Quick Response (QR) dan Virtual Reality (VR), adalah dua bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. QR, yang biasa juga disebut barcode dua dimensi, penggunaannya dengan cara di pindai. QR ini dapat memuat 2089 s.d. 4289 karakter. QR dapat dimanfaatkan sebagai *positioning detection wearnes*, *alignment marking*, *tuning pattern*, *version information*, *format information*, *data and error correction keys* dan *quick zone*. Sedangkan VR adalah suatu produk teknologi yang dapat menggambarkan situasi mendekati kenyataan. Oleh karena itu, VR banyak digunakan untuk training atau pelatihan jarak jauh, rapat virtual jarak jauh. VR ini pada dasarnya sangat menghemat anggaran lembaga atau kantor.

Foto 4. Peluncuran layanan Informasi Digital QR dan VR Situs Pendaratan Soekarno
(Sumber: Dokumentasi BPCB Gorontalo)



Layanan ini dapat dinikmati oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat *smartphone*, komputer dan laptop. Hanya dengan memindai kode yang terdapat di QR maupun VR orang dapat menikmati suguhan informasi tentang kunjungan Presiden Ir. Soekarno di Gorontalo. Pola informasi yang disajikan dalam QR berupa narasi atau teks tertulis yang menjelaskan tentang kronologi perjalanan kunjungan Presiden Soekarno di tahun 1951 dan 1957 di Gorontalo. Sedangkan penyajian informasi di VR berupa serangkaian gambar 3D yang dilengkapi dengan suara (*dubbing*) sebagai narator yang juga menginformasikan tentang kunjungan Presiden Soekarno di Gorontalo. Kelebihan dari layanan VR sendiri yaitu lebih interaktif dan lebih menarik, pengunjung dapat menikmati dan berselancar mengunjungi tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Presiden Soekarno selama berada di Gorontalo.

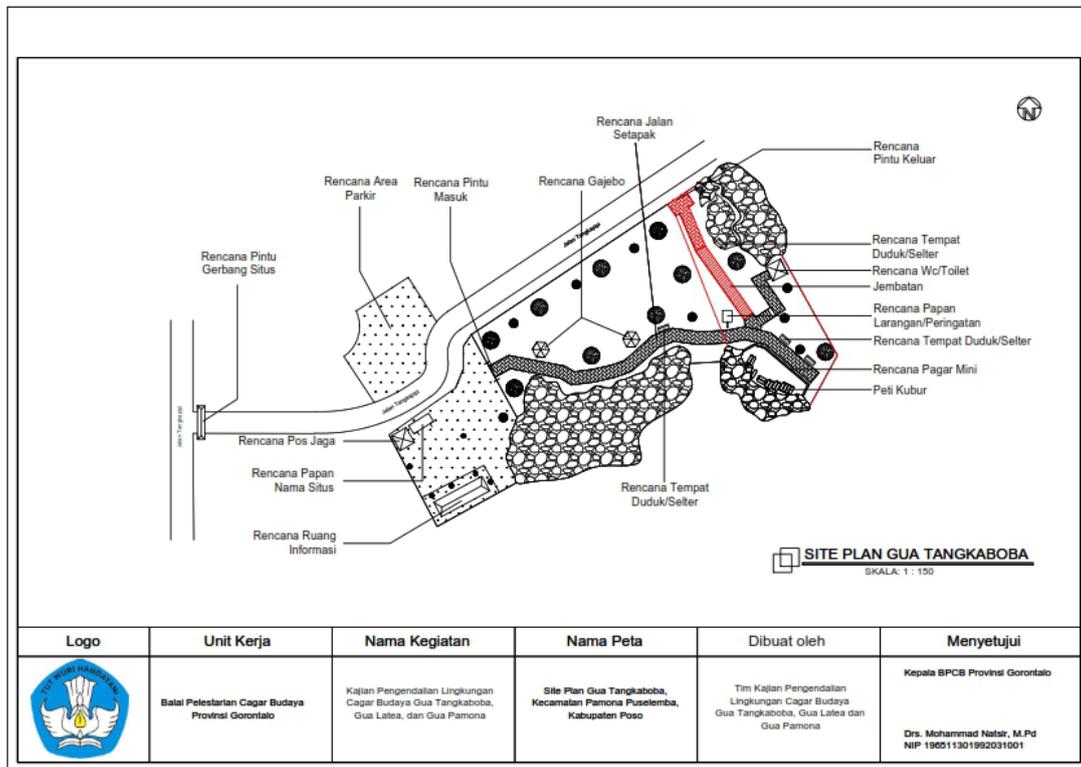
Kedepan layanan informasi ini akan semakin ditingkatkan baik dalam segi isi maupun cara penyajian informasinya serta akan memuat lebih banyak lagi informasi tentang berbagai situs yang dikelola oleh BPCB Gorontalo.



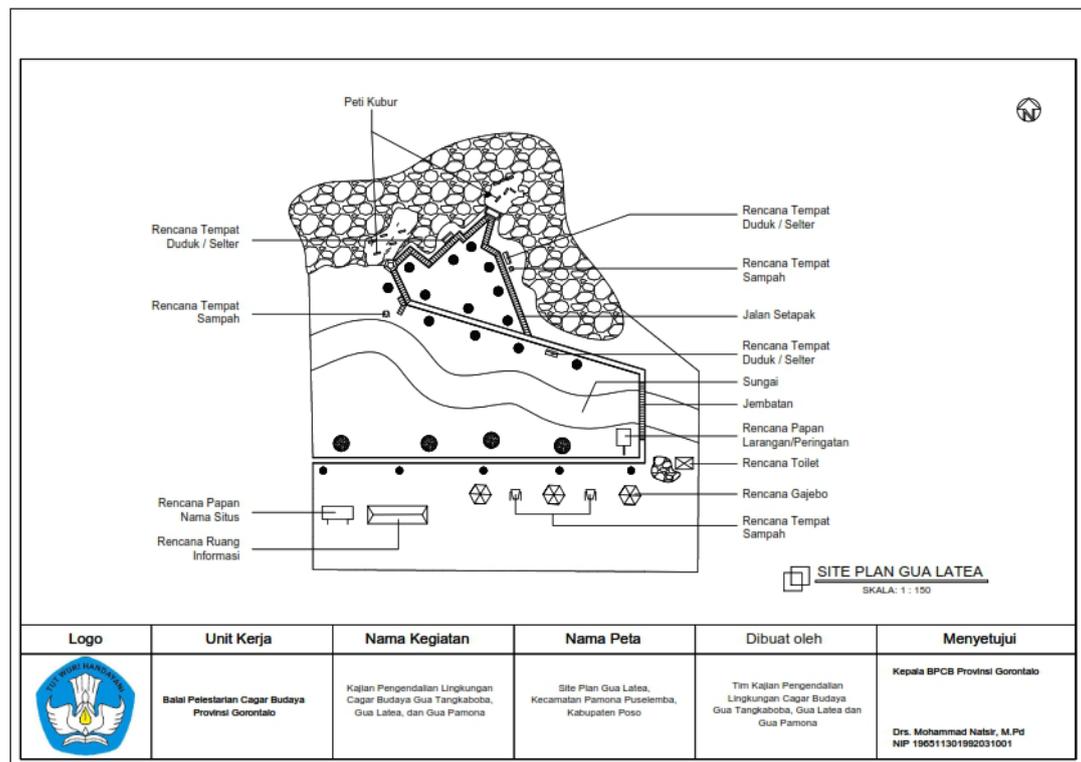
(Gambar 1 dan 2 . Kode scan layanan informasi Digital Situs Pendaratan Soekarno. Kode QR (a), dan kode VR (b)
(Sumber: BPCB Gorontalo)

3. Kajian Penataan Lingkungan Situs Gua dan Ceruk Latea, Situs Gua Pamona dan Situs Ceruk Tangkaboba

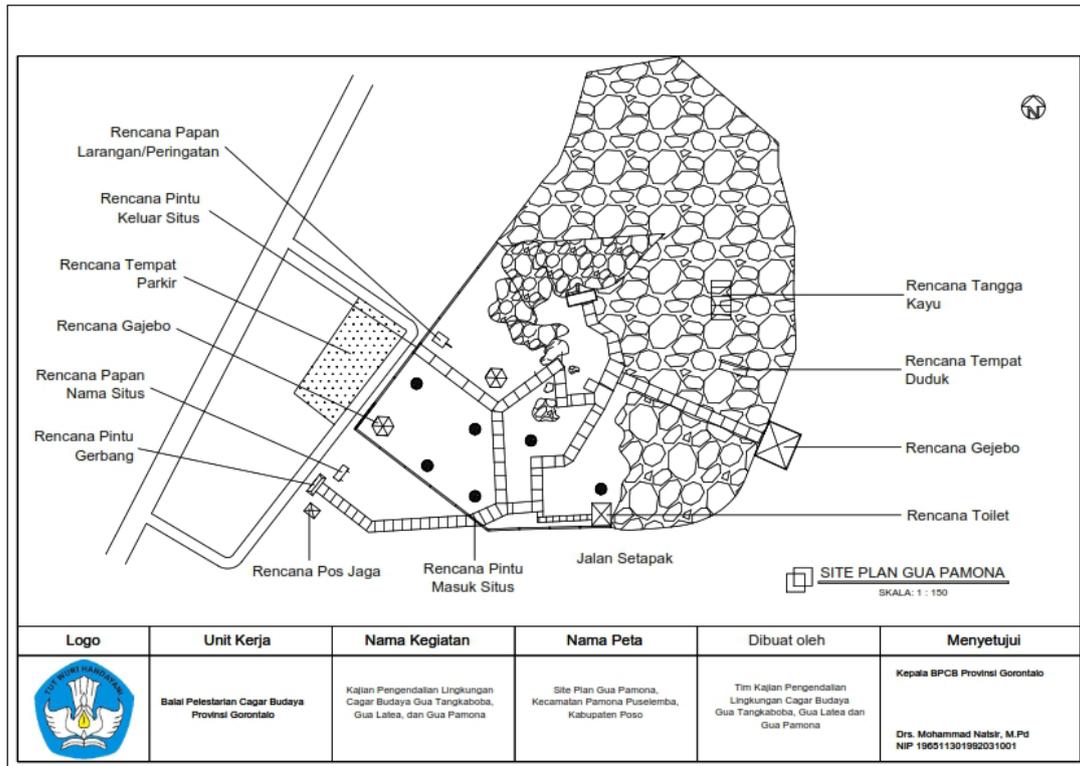
Pertengahan Februari 2021, BPCB Gorontalo melakukan kegiatan kajian penataan lingkungan di tiga situs Gua dan Ceruk Prasejarah yang berada di Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga situs tersebut diantaranya Situs Gua dan Ceruk Latea, Ceruk Tangkaboba, dan Gua Pamona. Kajian penataan lingkungan di 3 situs tersebut merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data untuk menghasilkan konsep penataan lingkungan dan penataan sarana dan prasarana di lingkungan situs. Rencana penataan ruang situs disesuaikan dengan keadaan sekitar situs dan kebutuhan dasar pengunjung. Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat sekitar serta memberikan nilai tambah untuk tujuan pariwisata. *Output* akhir dari kajian ini adalah tersusunnya rencana *site plan* penataan lingkungan di situs Ceruk dan Gua Latea, Ceruk Tangkaboba dan Gua Pamona.



Peta 1. Rencana (*siteplan*) Penataan Ruang Situs Ceruk Tangkaboba
(Sumber: BPCB Gorontalo)



Peta 2. Rencana (*siteplan*) Penataan Ruang Situs Gua Latea
(Sumber: BPCB Gorontalo)



Peta 3. Rencana (siteplan) Penataan Ruang Situs Gua Pamona
(Sumber: BPCB Gorontalo)

4. Ekskavasi di Kompleks Makam Raja Mauritz Datu Binangkal Korompot

Pada akhir April 2021, BPCB Gorontalo melaksanakan salah satu upaya pelestarian berupa kegiatan ekskavasi di kompleks Makam Raja Mauritz Datu Binangkal Korompot yang berada di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilakukan atas dasar adanya informasi terkait penataan lingkungan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara di lokasi objek. Rencana penataan lingkungan yang akan dilakukan berupa penataan jalan dengan menggunakan paving blok. Pihak Dinas kemudian melakukan koordinasi dengan BPCB Gorontalo terkait rencana yang dimaksud. Menanggapi hal tersebut, pihak BPCB Gorontalo memberikan rekomendasi bahwa sebelum dilakukan penataan lingkungan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan kajian sehingga penataan yang dilakukan sesuai dengan prinsip pelestarian. Kajian yang direkomendasikan adalah melakukan ekskavasi di sekitar makam Raja Mauritz. Hal tersebut dianggap perlu untuk melihat ada atau tidak struktur makam atau tinggalan arkeologis lainnya yang mungkin telah tertimbun di dalam tanah.

Tim ekskavasi terdiri dari tenaga arkeologi BPCB Gorontalo dan Dinas Kebudayaan Bolaang Mongondow Utara. Terkonfirmasi terdapat 14 titik ekskavasi yang dilakukan di dalam kompleks makam dan bagian luar kompleks makam. Hasil temuan yaitu pecahan gerabah, serpihan tulang, dan pecahan keramik.



(a)

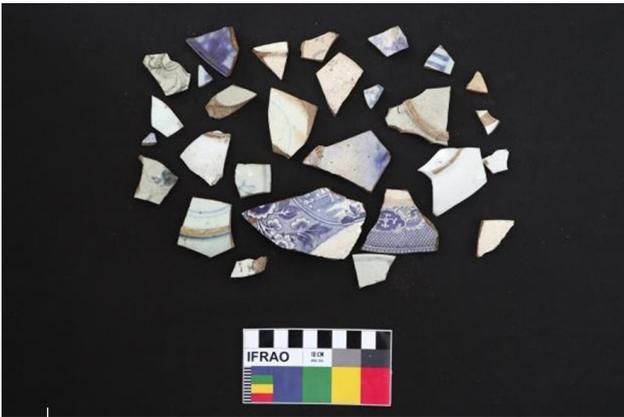


(b)

Foto 5 dan 6. Tampak kotak-kotak ekskavasi di lingkungan Makam Raja Mauritz (a).

Proses kegiatan ekskvasi disebelah makam Raja Mauritz (b)

(Sumber: Dokumentasi BPCB Gorontalo)



(a)



(b)

Foto 7 dan 8. Temuan hasil ekskavasi di kompleks Makam Raja Mauritz berupa pecahan keramik (a) dan pecahan gerabah (b)

(Sumber: Dokumentasi BPCB Gorontalo)

5. Pemugaran Masjid Tua Bungku

Masjid Tua Bungku merupakan salah satu bangunan yang telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan SK Menbudpar Tahun 2003. Secara administrasi Masjid Tua Bungku berada di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Masjid ini merupakan masjid kedua dari Kerajaan Bungku yang di bangun pada tahun 1855 s.d 1856. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Bungku ke-VII yang bernama Mohammad Baba. Pada masa pemerintahan raja Bungku ke-XII, Abdur Rasak melakukan perluasan masjid ini. Bangunan masjid yang sudah berumur ratusan pada tahun 1972 tidak dipergunakan lagi karena telah mengalami kerusakan pada bagian konstruksinya. Pada tahun 1992 sampai dengan 1994 masjid ini dipugar oleh Proyek Ditlinbinjarah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sedangkan pada tahun 2009 pembuatan pagar keliling oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Foto 9. Masjid Tua Bungku
(Sumber: Dokumentasi BPCB Gorontalo, 2015)

Pada akhir Agustus 2021, BPCB Gorontalo melakukan kembali pemugaran di Masjid Tua Bungku. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian studi pemugaran yang telah dilakukan pada tahun 2018 lalu. Hasil rekomendasi kajiannya yaitu perlu dilakukan pemugaran melalui pekerjaan rehabilitasi. Pemugaran sendiri merupakan upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Sedangkan rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial. Proses pemugaran yang dilakukan pada Masjid Tua Bungku dilakukan secara bertahap diawali dengan studi teknis pemugaran, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan pemugaran (dilakukan oleh pihak ketiga penyedia jasa konsultan), dan tahap selanjutnya adalah pemugaran bangunan. Pemugaran yang dilakukan dikerjakan oleh Pihak ketiga dalam hal ini kontraktor berdasarkan acuan perencanaan yang telah dibuat dan disepakati oleh Pihak BPCB Gorontalo dan Pihak Ketiga (kontraktor). Pekerjaan pemugaran ini berlangsung selama selama 120 hari kalender atau 4 bulan masa kerja. Pekerjaan pemugaran meliputi perbaikan rangka atap bangunan masjid, penggantian beberapa bagian tiang utama dan tiang pendukung bagian dalam, dan pengelupasan plesteran dinding, serta beberapa perbaikan lainnya.



(a)



(b)

Foto 10 dan 11. Proses pemugaran Masjid Tua Bungku. Pengelupasan plesteran dinding masjid bagian luar (a), dan pengelupasan plester dinding bagian dalam masjid(kanan)
(Sumber: Dokumentasi BPCB Gorontalo)

6. Kajian Pengembangan Istana Raja Djiloy

Kegiatan Kajian Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah Raja Djiloy dilaksanakan oleh BPCB Gorontalo pada akhir februari 2021. Rumah Raja Djiloy secara administrasi berada di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan kajian pengembangan Rumah Raja Djiloy merupakan kajian ruang tentang peningkatan nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya yang dilakukan melalui penelitian, revitalisasi, dan Adaptasi. Pola rencana pengembangan ruang paling mendasar dan menjadi tujuan dalam kajian ini adalah bagaimana menata lingkungan dalam lahan Rumah Raja Djiloy yang difungsikan untuk memberikan perlindungan yang bersifat permanen pada situs dari bahaya alamiah dan memberikan fasilitas untuk kenyamanan wisatawan.

Dari hasil kajian ini akan memberikan output konsep masterplan pengembangan Rumah Raja Djiloy khususnya terkait penataan ruang yang meliputi penataan taman, akses jalan, penataan ruang informasi, papan informasi, tempat parkir, penataan pesanggrahan, dan penataan fasilitas penunjang lainnya.



Foto 12. Rumah Raja Djiloy dalam kondisi miring akibat gempa yang terjadi pada tahun 2018
(Sumber: Dokumentasi BPCB Gorontalo)



Eskavasi Benteng Otanaha



Pembuatan Film Jalur Rempah



Pembuatan Film Kab. Poso



Monitoring Keterawatan Waruga

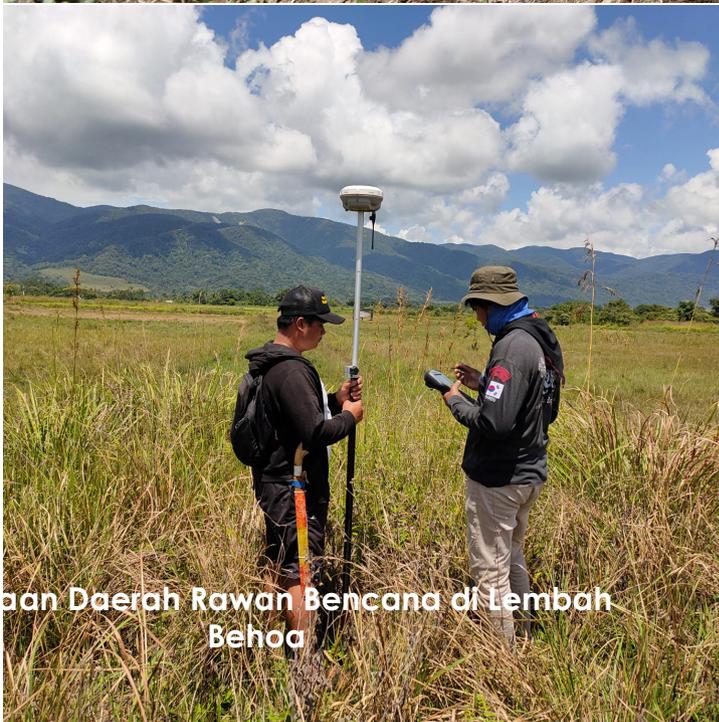


Vaksinasi Tahap II

Pemet



Penyelamatan Pesuwaa



aan Daerah Rawan Bencana di Lembah
Behoa



Pemugaran Masjid Tua Bungku



Eskavasi Makam Raja Mañrits

KLEIDOSKOP



Pembuatan Film Kab. Poso



Eskavasi Makam Raja Maurits



Kajian Pertamanan Tangkaboba



Pembuatan Film Jalur Rempah



Pendataan Bone Bolango



Layanan Informasi QR VR



Pemetaan Benteng Maas



Pembuatan Film Kab. Poso Kajian Pengembangan Kluster Sepe



Penyelamatan Pesuwua



Pembuatan Film Jalur Rempah



Monitoring Keterawatan Ofanaha



Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo

Jl. Anggur No. 01, Kel. Huangobotu

Kec. Duingingi Kota Gorontalo

Tlpn/Fax : (0435) 821070

Email : bp3_gorontalo@yahoo.com